

# Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik

Kabupaten Fakfak 2013



AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



**Analisis  
Penerimaan dan  
Pengeluaran Publik**  
*Kabupaten Fakfak 2013*

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP  
FOR DECENTRALISATION (AIPD)



*Acknowledgement*

Laporan Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik/ *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) ini diterbitkan melalui kerjasama Yayasan BaKTI dengan Pemerintah Australia melalui Program *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation* (AIPD).

*Disclaimer*

Pandangan dan pendapat dalam laporan Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik/ *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) ini bersumber dari Yayasan BaKTI, dan tidak menggambarkan pandangan Pemerintah Australia.

# Kata Pengantar Direktur Program AIPD

Pemerintah Australia mendukung usaha Pemerintah Indonesia untuk memperkuat implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia, terutama melalui *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)*. Program AIPD bertujuan untuk mendorong perbaikan layanan public melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Pada tahun 2013 program AIPD bermitra dengan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) telah melakukan analisis penerimaan dan pengeluaran public dalam bentuk laporan *Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA)* di 20 kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

Laporan PERA ini menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, audit, pengawasan eksternal, dan kerkaitannya dengan indikator-indikator pembangunan di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan perkebunan. Laporan ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait perbaikan aspek pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan dasar dengan memperhatikan isu-isu strategis di Kabupaten Fakfak seperti kemiskinan, kesetaraan gender, HIV/AIDS, bencana alam dan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Pada kesempatan ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kami kepada Tim Peneliti dari Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan peneliti senior dari Universitas Hasanuddin – Yayasan BaKTI Makassar yang telah bekerja keras untuk terwujudnya laporan ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang berperan penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi seluruh proses pembuatan laporan ini.

Kami mengharapkan bahwa laporan kajian PERA ini dapat berkontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak dan pemerhati keuangan dan pembangunan daerah demi terwujudnya perbaikan layanan publik melalui kebijakan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di Kabupaten Fakfak.

Direktur Program



**Jessica Ludwig-Maarooft**

## **KATA SAMBUTAN BUPATI FAKFAK**

Pemerintah Kabupaten Fakfak berkomitmen terus melakukan berbagai upaya penguatan perekonomian rakyat berbasis potensi daerah yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, baik dari sisi pendapatan, kesehatan maupun pendidikan. Upaya-upaya inovatif di bidang pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan pendidikan terus dilakukan. Pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk sektor pengembangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan telah dilakukan. Upaya-upaya ini telah mulai menunjukkan hasil yang terlihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Fakfak yang telah melebihi rata-rata Provinsi.

Pencapaian ini tidak akan mengurangi perhatian dan prioritas pembangunan guna mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial yang menjadi cita-cita pembangunan. Kini pemerintah Kabupaten Fakfak semakin terpacu untuk melakukan peningkatan pelayanan dasar dengan mereplikasi dan melanjutkan program-program yang dianggap berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan tetap melakukan inovasi program yang dapat menambah manfaat bagi pengembangan ekonomi dan peningkatan kesehatan serta pendidikan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif akan menjadi kunci penting dalam berbagai upaya pembangunan dan juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Laporan Kajian Pendapatan dan Belanja Publik di Kabupaten Fakfak ini menjadi alat evaluasi bagi kinerja pemerintah Kabupaten Fakfak dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, pemerintah Kabupaten Fakfak sangat mendukung upaya transparansi pengelolaan keuangan daerah serta terbuka pada rekomendasi-rekomendasi konstruktif untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Fakfak mengucapkan terima kasih untuk komitmen dan upaya yang telah dilakukan oleh Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan Yayasan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dalam melakukan Kajian Pendapatan dan Belanja Publik serta memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Fakfak. Diharapkan publikasi ini dapat dijadikan salah satu referensi penting oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akan sangat berperan dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Fakfak 2010-2015, Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Fakfak yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan yang Berlandaskan Nilai-Nilai Religius dan Kearifan Lokal.

Fakfak, Maret 2014  
Bupati Fakfak



**Drs. Mohamad usuwanas, M.Si**

# Daftar Isi

<i>Acknowledgement/ Disclaimer</i>	ii
Kata Pengantar Direktur Program AIPD	iii
Kata Sambutan Bupati Fakkaf	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Singkatan	ix
Ringkasan Eksekutif	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Karakteristik Daerah	2
1.2. Kinerja Makro Ekonomi	4
1.3. Kinerja Pembangunan Sosial	6
1.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	8
<b>BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>9</b>
2.1. Umum	10
2.2. Analisis Perencanaan dan Penganggaran	11
2.3. Analisis Pelaksanaan Anggaran	11
2.3.1. Manajemen Kas	12
2.3.2. Pengadaan Barang dan jasa	12
2.3.3. Manajemen Aset	13
2.3.4. Akuntansi dan Pelaporan	13
2.3.5. Hutang, Hibah dan Investasi Publik	13
2.4. Pengawasan dan Akuntabilitas	14
2.4.1. Audit Internal	14
2.4.2. Audit eksternal	14
2.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	14
<b>BAB III PENDAPATAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>17</b>
3.1. Gambaran Umum Pendapatan Daerah	18
3.2. Struktur Pendapatan Daerah	19
3.3. Pembiayaan Daerah	20
3.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	21
<b>BAB IV BELANJA DAERAH</b>	<b>23</b>
4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah	24
4.2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi	26
4.3. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Sektor	26
4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	27
<b>BAB V SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS</b>	<b>29</b>
5.1. Sektor Pendidikan	30
5.1.1. Belanja Sektor Pendidikan	30
5.1.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Pendidikan	31
5.1.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	33
5.2. Sektor Kesehatan	34
5.2.1. Belanja Strategis Sektor Kesehatan	34
5.2.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Kesehatan	35
5.2.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	38
5.3. Sektor Infrastruktur	38
5.3.1. Belanja Sektor Infrastruktur	38
5.3.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Infrastruktur	39
5.3.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	40

5.4. Sektor Pertanian dan Perkebunan	41
5.4.1. Belanja Total Sektor Pertanian dan Perkebunan	41
5.4.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Pertanian dan Perkebunan	42
5.4.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	43
<b>BAB VI ISU-ISU STRATEGIS</b>	45
6.1. Analisis Kemiskinan Daerah	46
6.2. Analisis Isu Gender	47
6.3. Isu HIV dan AIDS	49
6.4. Dana Otonomi Khusus	50
6.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	55
Daftar Pustaka	56
Lampiran	57
Lampiran Matriks A Kesimpulan dan Rekomendasi	58
Lampiran Matriks B Master Tabel	61
Lampiran Matriks C Catatan Metodologi PERA	64

## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Fakfak	2
Gambar 1.2	Luas Lahan dan Produksi	3
Gambar 1.3	Luas Hutan Menurut Tata Guna Kesepakatan (TGHK) Kabupaten Fakfak, tahun 2010-2011 (Ha)	4
Gambar 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat	4
Gambar 1.5	Komposisi PDRB Kabupaten Fakfak Tahun 2010.	5
Gambar 1.6.	PDRB Riil Per Kapita Tahun Dasar 2010 Kabupaten Fakfak, Provinsi dan Nasional	5
Gambar 1.7	Tingkat Inflasi Kabupaten Fakfak dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat	6
Gambar 1.8	Jumlah Penduduk di Kabupaten Fakfak	6
Gambar 1.9.	Komposisi Penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2011	7
Gambar 2.1.	Dimensi dalam Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak	10
Gambar 3.1	Nilai dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Ril Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2011	18
Gambar 3.2.	Perbandingan Pendapatan Daerah Riil Per Kapita Kabupaten Fakfak, Manokwari, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2011	18
Gambar 3.3.	Struktur Pendapatan Daerah Ril Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2011	19
Gambar 3.4.	Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012	20
Gambar 3.5.	Komposisi Retribusi Daerah Kabupaten Fakfak, Tahun 2009-2011	20
Gambar 3.6.	Perkembangan Pembiayaan Daerah (Surplus-Defisit) APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2011	21
Gambar 4.1	Perkembangan Total Belanja Riil Kabupaten Fakfak, 2007-2011	24
Gambar 4.2	Perkembangan Belanja Kabupaten FakFak dan Tiga Kabupaten Terpilih, 2007-2011	24
Gambar 4.3	Perkembangan Belanja Riil Perkapita Kabupaten Fakfak, 2007-2012	25
Gambar 4.4	Komparasi Belanja Riil Perkapita Kabupaten Fakfak dan Tiga Kabupaten Lainnya	25
Gambar 4.5.	Belanja Pusat melalui Mekanisme APBN di Kabupaten Fakfak, 2011	26
Gambar 4.6	Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2007-2011	26
Gambar 5.1.	Total Belanja Sektor Pendidikan di Kabupaten Fakfak 2007-2012	30
Gambar 5.2	Belanja Daerah Sektor Pendidikan Kabupaten Fakfak dan Provinsi/Kabupaten Terpilih.	30
Gambar 5.3	Analisis Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Tingkat Kabupaten/Kota	31
Gambar 5.4	Jumlah dan Rasio Sekolah Murid	31
Gambar 5.5	Jumlah Guru dan Rasio Murid-Guru	32
Gambar 5.6	APS kabupaten Fakfak dan Papua Barat	32
Gambar 5.7.	Rata-rata lama sekolah Kabupaten Fakfak dan Papua Barat.	33
Gambar 5.8	Angka Melek Huruf	33
Gambar 5.9.	Total Belanja Sektor Kesehatan di Kabupaten Fakfak 2007-2012	34
Gambar 5.10.	Belanja Total Sektor Kesehatan di Kabupaten Fakfak dan Provinsi Periode 2007-2011	34
Gambar 5.11.	Analisis Belanja Klasifikasi Ekonomi Sektor Kesehatan di Kabupaten Fakfak	35
Gambar 5.12	Jumlah dan Rasio Fasilitas	35

Gambar 5.13 Jumlah Tenaga Kesehatan	36
Gambar 5.14. Rata-rata Jumlah Balita dan Perkembangan Porsi Balita yang Diimunisasi	36
Gambar 5.15. Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Kematian Ibu Hamil Bersalin	37
Gambar 5.16. Presentase Status Gizi Balita	37
Gambar 5.17 Total Belanja Sektor Infrastruktur di Kabupaten Fakfak 2007-2011	38
Gambar 5.18. Analisis Belanja Klasifikasi Ekonomi Sektor Infrastruktur di Kabupaten Fakfak	38
Gambar 5.19 Panjang Jalan	39
Gambar 5.20 Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan	39
Gambar 5.21 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Transportasi	40
Gambar 5.22. Proporsi Rumahtangga dengan Air Minum layak	40
Gambar 5.23. Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Listrik	40
Gambar 5.24. Total Belanja Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Fakfak Tahun 2007-2011	41
Gambar 5.25. Belanja Klasifikasi Ekonomi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kab. Fakfak, 2011	42
Gambar 5.26. Luas Areal dan Produksi Sektor Perkebunan	42
Gambar 5.27. Luas Area (Ha) Perkebunan Menurut Komoditi	43
Gambar 5.28. Total Produksi (Ton) Perkebunan Per Komoditi	43
Gambar 6.1. Komparasi Persentasi Penduduk Miskin Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat	46
Gambar 6.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Fakfak, Tahun 2006-2010	46
Gambar 6.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender serta IPM di Kabupaten Fakfak, Tahun 2006-2010	47
Gambar 6.4. Jumlah Pengidap dan Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Fakafak, Tahun 2006-2011	49
Gambar 6.5. Karakteristik Penderita HIV dan AIDS Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Fakfak, Tahun 2006-2011	49
Gambar 6.6. Penyebaran Jumlah Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Distrik di Kabupaten Fakfak	50
Gambar 6.7. Perkembangan Dana Otsus di Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012 (miliar rupiah)	51
Gambar 6.8 Pertumbuhan dan Porsi Dana Otsus Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak	51
Gambar 6.9. Perkembangan Dana Otsus Per Kapita Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012	52
Gambar 6.10. Alokasi Sektoral Dana Otsus Kabupaten Fakfak, Tahun 2011	52
Gambar 6.11. Realisasi Anggaran Pendidikan Dana Otsus Berdasarkan Program Kabupaten Fakfak, Tahun 2011 (Juta Rupiah)	53
Gambar 6.12. Alokasi Dana Otsus Urusan Kesehatan Kabupaten Fakfak, Tahun 2011	53
Gambar 6.13. Persentase Alokasi Dana Otsus Untuk Infrastruktur Kabupaten Fakfak Berdasarkan Program, Tahun 2011	54
Gambar 6.14. Persentase Alokasi Dana Otsus untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Fakfak Berdasarkan SKPD Pengelola, Tahun 2011	54

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Fakfak Menurut Distrik	3
Tabel 1.2. TPAK dan TPT Kabupaten Fakfak dan Papua Barat periode tahun 2007-2011	7
Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Fakfak, Provinsi dan Nasional 2007-2011	7
Tabel 2.1 Grade/Skor Menurut Bidang dan Kategori PKD di Kabupaten Fakfak	21
Tabel 5.1. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Th. 2008 – 2010	37
Tabel 6.1 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Fakfak, Tahun 2010	48



## Daftar Singkatan

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APS	= Angka Partisipasi Sekolah
BPK	= Badan Pemeriksa Keuangan
BPBD	= Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHTB	= Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS	= Badan Pusat Statistik
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DAU	= Dana Alokasi Umum
DBH	= Dana Bagi Hasil
DDA	= Daerah Dalam Angka
DPASPKD	= Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah
DPPKAD	= Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HIV/AIDS	= <i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>
IDG	= Indeks Pemberdayaan Gender
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IPG	= Indeks Pembangunan Gender
KUA APBD	= Kebijakan Umum APBD
KPBA	= Kantor Penanggulangan Bencana Alam
LKPD	= Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPSE	= Lembaga Pengadaan Secara Elektronik
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PFM/PKD	= Public Finance Management / Pengelolaan Keuangan Daerah
PPK SKPD	= Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
PDB/PDRB	= Produk Domestik Bruto / Produk Domestik Regional Bruto
PBB	= Pajak Bumi Bangunan
RKASPKD	= Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah
RKPD	= Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJM	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJPD	= Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SOP	= Standar Operasional dan Prosedur
SDM	= Sumberdaya Manusia
SiLPA	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
SPIP	= Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SD/MI	= Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah
SKPD	= Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SPM	= Standar Pelayanan Minimal
TPAK	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka
TGHK	= Tata Guna Hutan Kesepakatan
TGR	= Tuntutan Ganti Rugi
UKM	= Unit Usaha Kecil dan Menengah

# Ringkasan Eksekutif



Pala merupakan komoditi perkebunan yang menjadi primadona di Kabupaten Fakfak, yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah komoditi tersebut merupakan penggerak perekonomian masyarakat lokal. Komoditi Pala belum menunjukkan tingkat produksi yang optimal karena penanganannya belum diikuti dengan upaya perbaikan input produksi. Walaupun demikian kontribusi terhadap PDRB telah mencapai 6,52 persen karena telah mencapai pasaran ekspor, begitu pula dengan komoditas-komoditas perkebunan lainnya seperti kelapa, kakao, dan cengkeh. Selain memiliki kapasitas produksi yang terbatas, juga karena hasil olahan daging pala belum memenuhi standar kualitas dan daya saing. Dalam kurun waktu 2007-2011 perekonomian kabupaten Fakfak tumbuh secara fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian. Walaupun pertumbuhan PDRB per kapita kabupaten Fakfak dalam lima tahun rata-rata sebesar 6,59 persen, namun trennya mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa output nilai tambah yang dihasilkan oleh Kabupaten Fakfak masih dalam kategori rendah apabila dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat.

Penduduk di kabupaten Fakfak tumbuh dengan angka yang relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar 1,71 persen per tahun, namun porsi penduduk Fakfak terhadap provinsi mengalami penurunan dari 9,2 persen menjadi 8,7 persen pada tahun 2011. Penduduk usia balita lebih mendominasi komposisi penduduk, yang mencapai 21,2 persen kemudian penduduk usia sekolah dasar Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami fluktuasi selama kurun waktu lima tahun terakhir, dengan kecenderungan lebih rendah pada kurun waktu 2007-2011, sedangkan tingkat pengangguran berfluktuasi. Trend Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa perekonomian Kabupaten Fakfak belum mampu pertambahan angkatan kerja.

Upaya pemerintah mengatasi masalah publik dengan mengalokasikan belanja mendukung investasi publik, menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan publik secara umum belum mampu memberikan respons yang lebih baik. Berdasarkan analisis pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan mekanisme perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berjalan dengan baik yang indikasinya nampak pada defisit belanja.

Pertumbuhan riil pendapatan daerah kabupaten Fakfak berada di bawah provinsi dan kabupaten terpilih lainnya. PAD kabupaten Fakfak terkecil dibandingkan kabupaten lainnya, pertumbuhan PAD kabupaten Fakfak mengalami kenaikan pada tahun 2007-2009 dan secara keseluruhan sumber pendapatan dari pendapatan asli daerah dibawah 3%. Ketergantungan fiskal yang besar terhadap pemerintah pusat perlu diimbangi dengan menggai potensi yang lebih besar dalam menghasilkan pendapatan. Seperti halnya produk pala yang masih bisa di olah lebih maksimal, dalam penganggaran dan pelaksanaan penjualannya. Dunia usaha restoran dan perhotelan yang berkembang pesat dikabupaten Fakfak, ternyata belum mampu memberikan sumbangsi maksimal dalam hal pajak dan retribusi bagi daerah. Begitupun dengan potensi alam seperti struktur tanah beserta kandungannya yang belum bisa menarik minat investor dalam menanamkan modalnya. Terkait dengan kondisi tersebut maka daerah dalam hal ini adalah pemerintah perlu meningkatkan usaha dalam menghasilkan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, meninjau ulang regulasi seperti pajak dan retribusi, serta melakukan upaya kerjasama yang dapat menarik investor, guna mendapatkan peningkatan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ataupun, pemerintah dapat mengembangkan potensi tanaman lain seperti buah durian dan cengkeh yang tumbuh merata di seluruh kabupaten, diolah dan dijadikan produk unggulan untuk di export maupun dipasarkan secara regional sehingga bisa menjadi sumber pendapatan tetap daerah.

Belanja daerah masih didominasi oleh belanja langsung (modal), dan berdasarkan sektor strategis alokasikan terbesar disektor infrastruktur, diikuti dengan sektor kesehatan, pendidikan dan pertanian. Letak geografis Fakfak yang berbukit memerlukan jumlah anggaran yang besar dalam pembangunan fisik yang dilakuakan oleh pemerintah sejalan dengan RPJMD yang ditetapkan. Sehingga untuk sektor lainnya mendapatkan alokasi yang kecil. Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan antara sektor strategis sebaiknya memperhatikan keseimbangan anggaran dan sasaran dari kegiatan yang diusulkan, jangan sampai terdapat gap yang jauh dan sasaran program yang tidak seimbang antara sektor, misalnya pembangunan fisik sekolah (belanja modal) harus diikuti dengan penambahan tenaga pengajar (belanja pegawai). Serta sesuaikan program pembelanjaan setiap SKPD dengan visi, misi serta renstra kabupaten fak-fak yang telah dibuat. Misalnya sektor pertanian, dimana potensi tanaman pala merupakan produk unggulan kabupaten Fakfak, maka perlu ditingkatkan lagi anggaran untuk alokasi belanja sektor pertanian dan perkebunan agar searah dengan sasaran pembangunan daerah.

Perkembangan belanja sektor pendidikan berfluktuatif dimana terjadi kenaikan pada alokasi belanja pegawai

yang diikuti dengan peningkatan jumlah guru setiap tahunnya. Alokasi belanja langsung didominasi oleh belanja barang dan jasa yang searah dengan peningkatan jumlah sekolah yang ada setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan alokasi belanja klasifikasi ekonomi dimana didominasi oleh belanja pegawai sebesar 70,2% dengan kecenderungan berfluktuasi. Kinerja dan hasil pembangunan di sector pendidikan relatif baik walaupun masih kekurangan guru pada jenjang pendidikan SMA, yang dilihat dari rasio guru-murid yang cenderung semakin besar. Hasil pembangunan sektor pendidikan relatif cukup memuaskan karena dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf kabupaten Fakfak selalu berada diatas rata-rata provinsi dan menempati urutan ke dua atau tiga tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Hasil ini mendukung kabupaten Fakfak memiliki IPM tertinggi ke dua di provinsi Papua Barat. Secara umum peran pemerintah disektor pendidikan sudah baik dengan adanya pembangunan yang signifikan, untuk itu harus dipertahankan dan dijaga kualitas pendidikan dikabupaten fak-fak agar bisa terus baik dan lebih mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi.

Rasio fasilitas dan tenaga kesehatan per 10.000 penduduk menunjukkan kabupaten Fakfak mengalami kekurangan tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan. Hal ini sangat mempengaruhi out put atau hasil pelayanan kesehatan yang dapat dilihat dari meningkatnya kasus kematian bayi setiap tahun, masih terdapat pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun, hanya 19 persen balita yang mendapat imunisasi, status gizi kurang dan buruk pada balita yang meningkat di tahun 2011. Hal ini berbanding dengan alokasi belanja pegawai yang dilakukan dengan rata-rata sebesar 57% dari total alokasi belanja sektor kesehatan. Hal ini menunjukkan masih kurang tepatnya pengelolaan dan perekrutan pegawai sektor kesehatan yang dilakukan oleh dinas terkait. Untuk itu dalam alokasi jumlah sumberdaya manusia sektor kesehatan, harus ditentukan formasi yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhan setiap unit kesehatan dengan memperhitungkan beban setiap tenaga, sehingga bisa ditemukan jumlah tenaga yang diperlukan beserta kualifikasi keahlian yg dibutuhkan.

Alokasi belanja sektor infrastruktur kabupaten Fakfak didominasi oleh belanja modal yaitu sebesar 92,4% dari total belanja sektor infrastruktur dengan kecenderungan terus meningkat dari tahun 2007-2011. Hal ini sejalan dengan perkembangan infrastruktur jalan setiap tahun terus meningkat. Panjang jalan kabupaten fakfak terpanjang ke tiga di provinsi Papua Barat. Sebagian besar jalan terdiri dari jalan kabupaten, namun kualitas jalan aspal mengalami penurunan di tahun 2011 dimana sebagian besar jalan belum dilakukan pengaspalan. Tingkat Keramaian arus transportasi darat, udara dan laut menunjukkan perkembangan suatu kota atau kabupaten. Hasil dari pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa Akses rumahtangga terhadap air bersih di kabupaten Fakfak bergerak fluktuatif selama periode 2007 – 2010. Namun masih memiliki persentase tertinggi di provinsi Papua Barat pada tahun 2007 dan 2009-2010. Walaupun kondisi geografis kabupaten Fakfak yang berbukit-bukit namun lebih dari 80 persen rumahtangga dapat mengakses air bersih. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan saluran air bersih yang membaik. Proporsi rumahtangga di Kabupaten Fak-fak dalam mengakses listrik selama periode 2007 – 2010 terlihat menurun 1,8 persen dari 81,63 persen menjadi 79,83 persen. Penurunan jumlah rumahtangga dalam mengakses listrik mengindikasikan bertambahnya rumahtangga miskin sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan penerangan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan yang berfokus pada pelayanan fisik (jalan) tidak sejalan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat (sosial) dimana bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Sektor perkebunan sebagai sektor unggulan kabupaten Fakfak namun luas areal tanaman perkebunan tersebut mengalami penurunan pada setiap tahun menurun. Produksi Pala setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini berbanding terbalik dengan luas areal perkebunan Pala atau dengan kata lain produksi tanaman pala meningkat bukan karena penambahan luas areal tanam namun disebabkan karena intensifikasi terhadap komoditi tersebut. Hal ini mengindikasikan petani pala ataupun perhatian pemerintah yang menekankan pada intensifikasi pertanian yaitu tidak menambah luas lahan namun lebih menitik beratkan pada peningkatan produksi dengan cara perbaikan teknik budidaya, bantuan bibit dan sarana produksi yang mendukung serta peningkatan belanja pegawai mendominasi sebesar 40% dari total belanja sektor pertanian dan perkebunan. Namun jika dilihat perkebunan sebagai sektor unggulan, alokasi belanja yang diberikan sangat kecil hanya 2 % dari alokasi belanja. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa menaikkan jumlah alokasi anggaran sektor pertanian dan perkebunan, agar bisa meningkatkan jumlah produksi dengan penambahan luas lahan.

Upaya pengentasaan kemiskinan di Kabupaten Fakfak masih bertumpu pada program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah secara Nasional, terutama melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program-program pengentasaan kemiskinan yang dikreasikan secara lokal oleh

pemerintah daerah, tampaknya masih sangat terbatas. Jika diamati, program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui dua skema utama, yaitu *pertama*, menurunkan atau memperkecil beban pengeluaran penduduk miskin. Skema ini muncul dalam bentuk pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis, raskin, BLT), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya). *Kedua*, meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin. Skema ini muncul terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur perdesaan (misalnya pasar, jalan desa, penyediaan transportasi, dsb), penyediaan skim bantuan modal usaha, dsb.

Tambahan dana dari dana Otsus dimaksudkan untuk menunjang sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Realisasi dana otsus rata-rata untuk ke empat sektor utama yaitu 83 persen yang tertinggi infrastruktur mencapai 98 persen dan yang terendah pendidikan mencapai 72 persen. Untuk sektor pendidikan alokasi anggaran lebih difokuskan pada pendidikan anak usia dini, sektor kesehatan lebih difokuskan pada puskesmas, posyandu di dinas Kesehatan, sektor infrastruktur lebih difokuskan pada pembanguna jalan dalam menghubungkan beberapa daerah yan masih terisolasi sedangkan pemberdayaan ekonomi rakyat lebih terfokus pada pemberian bantuan uang tunai. Mekanisme pemberian bantuan dana otsus tersebut masih perlu dibenahi sehingga pengalokasian benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap masyarakat secara umum.

# 1

# Pendahuluan

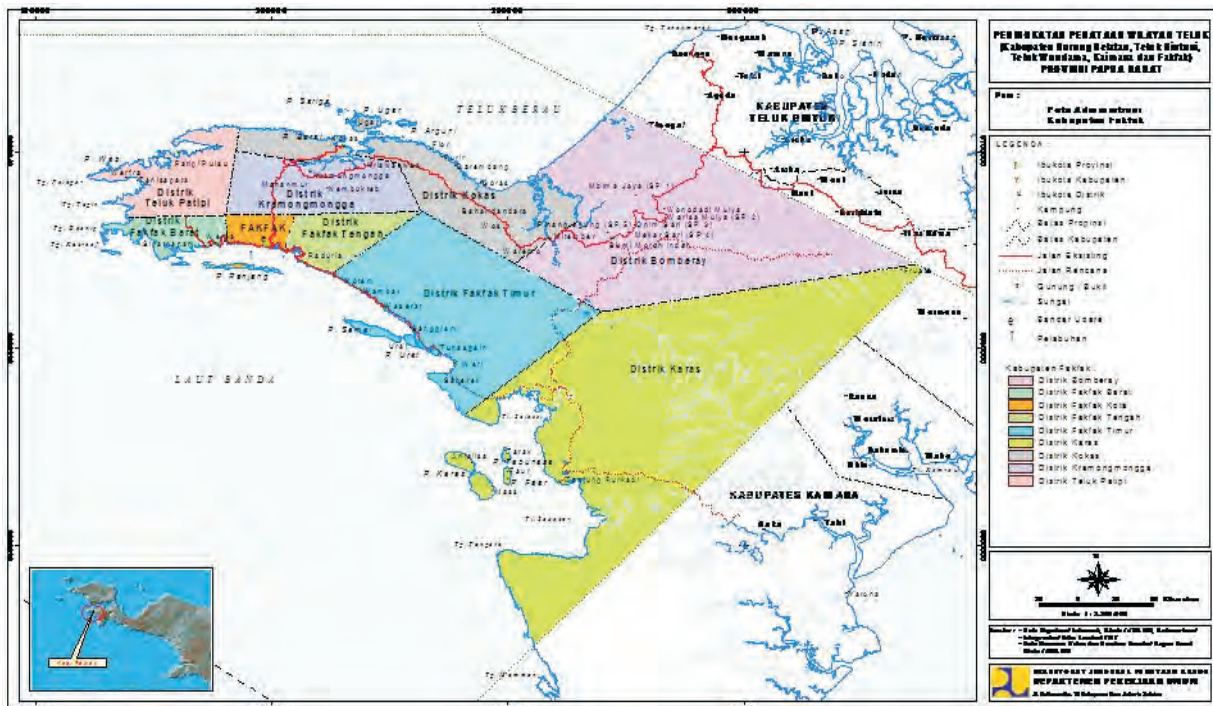


## 1.1. Karakteristik Daerah

Kabupaten Fakfak terletak di posisi yang strategis bagian selatan Propinsi Papua Barat dan sebagai pintu gerbang sekaligus daerah penghubung di Kawasan Timur Indonesia. Posisi Kabupaten Fakfak cukup strategis, selain berbatasan dengan Kabupaten di Provinsi Papua Barat seperti Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana serta Kabupaten Sorsel, juga berbatasan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Maluku diantaranya Kabupaten Tual, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Ciri khas yang masih bertahan hingga saat ini yaitu 7 kerajaan atau petuanan dengan pola kekerabatan yang kental, sikap hormat menghormati, tolong-menolong serta tenggang rasa yang masih tinggi. Meskipun memiliki pola kekerabatan yang kental namun tidak membuat masyarakat Kabupaten Fakfak tertutup terhadap pendatang, justru masyarakatnya memiliki sifat yang ramah dan toleran terhadap pendatang.

Adat istiadat di Kabupaten Fakfak khususnya komunitas yang tinggal di kampung-kampung masih bersifat mengikat. Perubahan dinamika lingkungan seperti meningkatnya akses dalam memperoleh informasi dan komunikasi telah menyebabkan meningkatnya interaksi sosial sehingga adat-istiadat yang tadinya mengikat berangsur mengarah kepada adat-istiadat yang bersifat transisi. Terdapat beberapa suku, seperti Mbaham, Ma'ta, Mor, Onim, Irrurutu dan Arguni yang memiliki bahasa tersendiri. Pada aspek pemerintahan, terdapat 7 (tujuh) kerajaan atau petuanan yang terdiri atas, Petuanan Ati-Ati di Werpigang, Petuanan Fatagar di Fakfak, Petuanan Arguni di Arguni, Petuanan Sekar di Kokas, Petuanan Werluar di Kokas, Petuanan Rumbati di Rumbati dan Petuanan Patipi di Patipi Pasir, dimana hal ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan pemerintahan, seperti adat istiadat upacara "tombor mage" atau taruh harta untuk acara perkawinan.

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Fakfak



Sumber : Kabupaten Fakfak dalam angka ( BPS,2012).

Kabupaten Fakfak telah dimekarkan menjadi Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002. Secara geografis, Kabupaten Fakfak terletak pada  $131^{\circ} 53' 03''$  BT -  $133^{\circ} 29' 19''$  BT dan  $2^{\circ} 30' 58''$  -  $3^{\circ} 57' 51''$  LS. Luas Kabupaten Fakfak setelah pemekaran adalah  $14.320 \text{ km}^2$  yang terdiri atas 9 (sembilan) distrik dan terbagi dalam 122 kampung pada tahun 2010. Wilayah yang mempunyai luas terbesar adalah Distrik Karas, yaitu 17,40% dari luas total wilayah Kabupaten Fakfak.

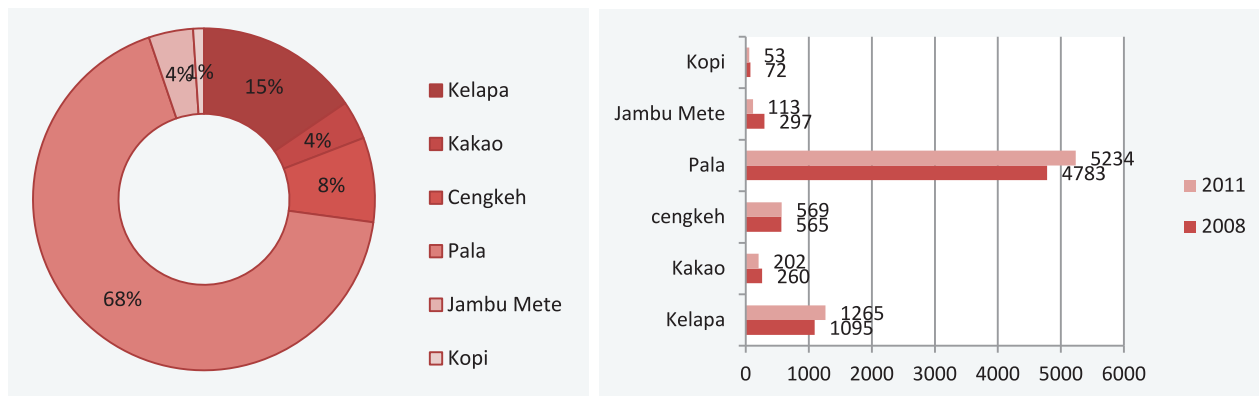
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Fakfak Menurut Distrik

No	Distrik	Jumlah Kampung/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Proporsi (%)
1	Fakfak Barat	10	1.685	11,77
2	Fakfak Timur	14	1.721	12,01
3	Fakfak	13	820	5,73
4	Kokas	23	1.786	12,47
5	Karas	7	2.491	17,40
6	Fakfak Tengah	12	705	4,92
7	Kramongmongga	16	1.478	10,32
8	Teluk Patipi	19	1.724	10,04
9	Bomberay	11	1.910	13,34
Jumlah		122	1.4320	100

Sumber: Kabupaten Fakfak dalam Angka, 2012

**Kabupaten Fakfak memiliki potensi sumber daya alam pada sektor perkebunan yang relatif cukup besar.** Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2014 disebutkan bahwa tanaman pala telah menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat lokal. Kontribusi komoditas pala terhadap PDRB sebesar 6,52 persen. Pala negeri (*Myristica argentea*) memiliki keunggulan komparatif terhadap komoditi perkebunan lainnya dan produksinya telah mencapai pasaran ekspor. Namun komoditas pala masih memiliki kapasitas produksi yang terbatas dan hasil olahan daging pala juga belum memenuhi standar kualitas dan daya saing yang memadai. Komoditas sektor perkebunan lainnya seperti kakao, cengkeh, juga belum menunjukkan tingkat produktifitas yang berarti. Luas area Kelapa dan Pala mengalami peningkatan, sedangkan kakao, cengkeh, jambu mete dan kopi mengalami penurunan luasan dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 1.2 Luas Lahan dan Produksi



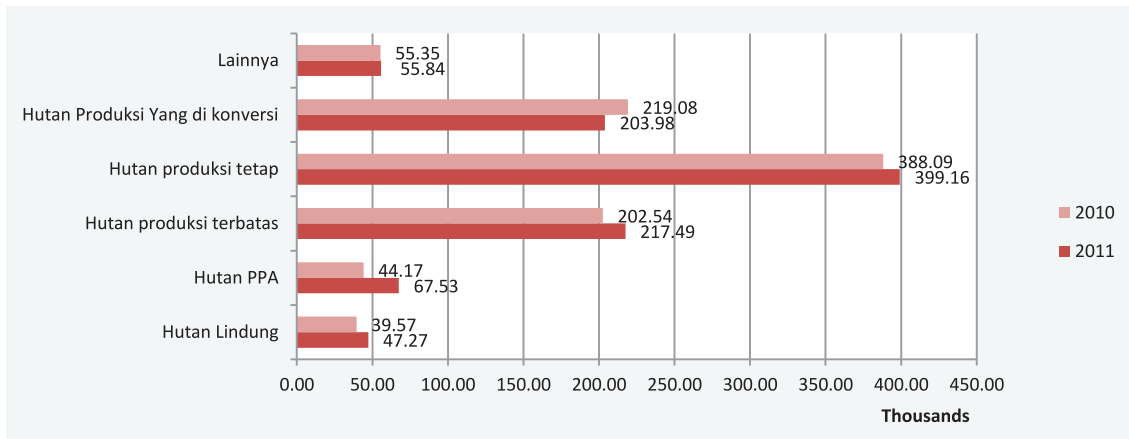
Sumber : Fakfak Dalam Angka (2012), BPS

**Potensi hutan yang dimanfaatkan terbatas pada potensi kayu (*timber*) dengan penebangan yang hanya memanfaatkan potensi (*stock*) alami.** Potensi-potensi lain dari hutan seperti tanaman obat, aneka tanaman eksotik seperti tanaman hias dan anggrek, fauna-fauna endemik dan khas seperti buaya, belum diupayakan secara optimal. Areal hutan yang mencapai 991.272,81 ha dari luas wilayah Fakfak 14.320 km<sup>2</sup>, memberikan kontribusi sebesar 6,52% terhadap PDRB pada tahun 2011, baik yang berasal dari kayu bulat maupun industri pengolahan kayu hulu (*plywood*).

Luasan hutan berdasarkan kegunaannya bertambah kecuali hutan produksi yang dapat di konversi. Luasan hutan yang sudah beralih kegunaan sebesar 19.000 Ha dan yang menjadi kebun pala sebesar 451 Ha.



Gambar 1.3 Luas Hutan Menurut Tata Guna Kesepakatan (TGHK) Kabupaten Fakfak tahun 2010-2011 (Ha)

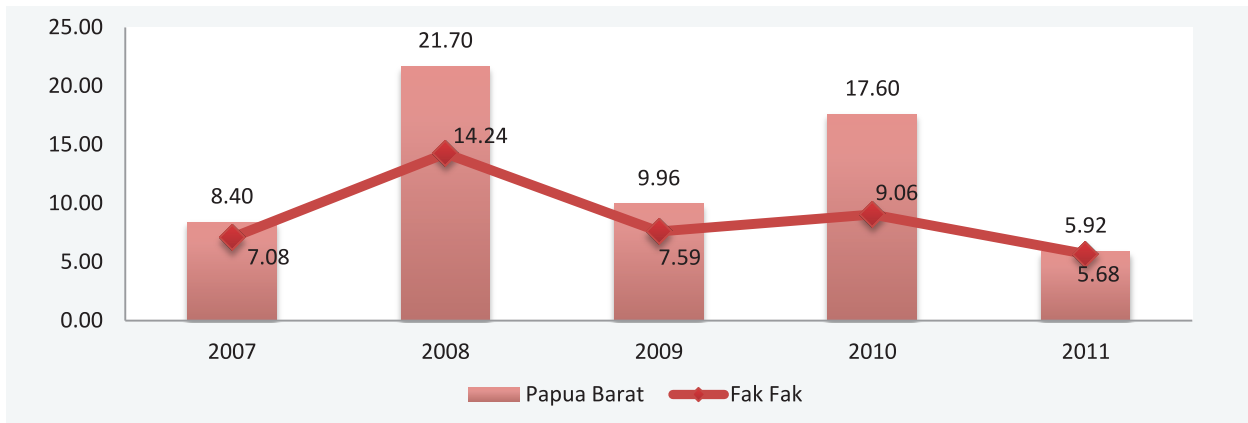


Sumber : Fakfak Dalam Angka (2012), BPS

## 1.2. Kinerja Makro Ekonomi

Dalam kurun waktu 2007-2011 perekonomian Kabupaten Fakfak tumbuh secara fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2008, perekonomian Fakfak mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, yaitu 14,24 persen, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Setelah itu, Pertumbuhan Ekonomi cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2011, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Fakfak selama periode 2007-2011 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Fakfak secara regional masih berada pada kategori rendah.

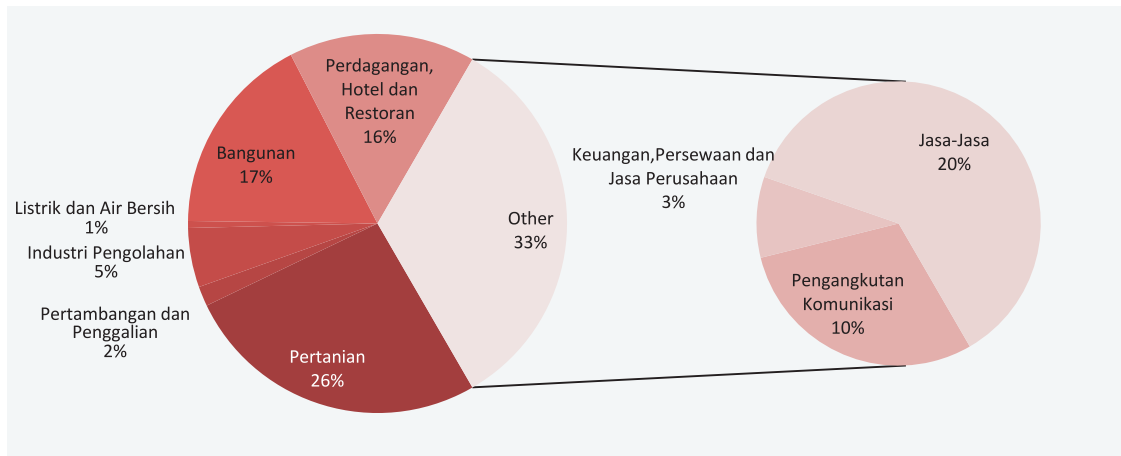
Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat



Sumber : Fakfak Dalam Angka, BPS

Sektor pertanian masih mendominasi pembentukan PDRB Kabupaten Fakfak walaupun dengan kecenderungan yang makin berkurang. Selama kurun waktu 2007-2010, kontribusi sektor pertanian rata-rata sebesar 26 persen per tahun dengan kecenderungan yang menurun. Sektor pertanian masih merupakan sektor penggerak perekonomian Kabupaten Fakfak, disamping sektor lainnya yang memberikan kontribusi yang cukup berarti seperti sektor jasa yang mencapai 20 persen dan sektor bangunan sebesar 17 persen. Kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDRB cenderung meningkat selama kurun waktu tersebut.

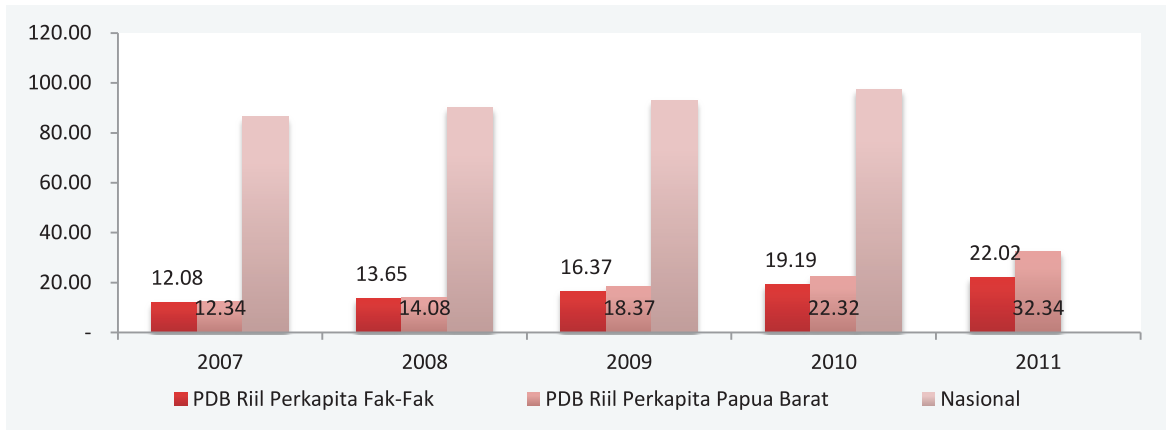
Gambar 1.5 Komposisi PDRB Kabupaten Fakfak Tahun 2010.



Sumber: Fakfak Dalam Angka, BPS

**Dalam kurun waktu 2007-2011 PDRB per kapita riil Kabupaten Fakfak terus mengalami penurunan secara konsisten.** Walaupun pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Fakfak dalam lima tahun rata-rata sebesar 6,59 persen, namun trennya mengalami penurunan di tahun 2011. PDRB per kapita kabupaten Fakfak masih lebih rendah daripada PDRB per kapita rata-rata provinsi Papua Barat, maupun nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh Kabupaten Fakfak masih berada di bawah provinsi maupun nasional. Nilai tambah yang masih dalam kategori rendah tersebut diikuti dengan inflasi yang melewati angka dua digit di tahun 2008, yang mengindikasikan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menurun di tahun tersebut walaupun pada tahun berikutnya mengalami perbaikan seiring dengan peningkatan nilai tambah daerah.

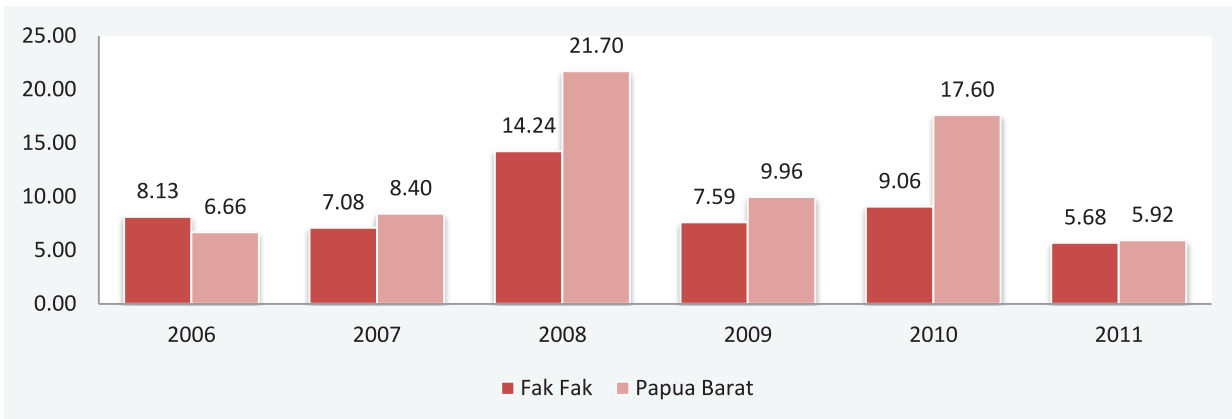
Gambar 1.6. PDRB Riil Per Kapita Tahun Dasar 2010 Kabupaten Fakfak, Provinsi dan Nasional



Sumber: Fakfak Dalam Angka, BPS

**Dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, laju inflasi di Kabupaten Fakfak relatif rendah selama kurun 2006-2011.** Inflasi Kabupaten Fakfak dalam kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi, hal serupa terjadi pula pada provinsi Papua Barat. Ini menunjukkan bahwa angka inflasi di Kabupaten Fakfak belum dapat dikendalikan, walaupun telah mengalami penurunan hingga 5,68 di tahun 2011. Peran pemerintah daerah perlu difokuskan pada ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang rentan terhadap inflasi.

Gambar 1.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Fakfak dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat

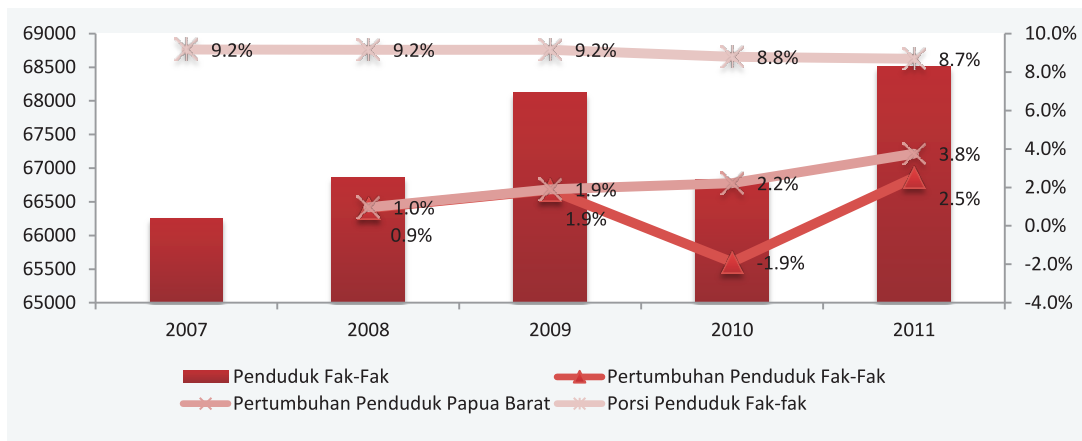


Sumber : Fakfak Dalam Angka, BPS

### 1.3. Kinerja Pembangunan Sosial

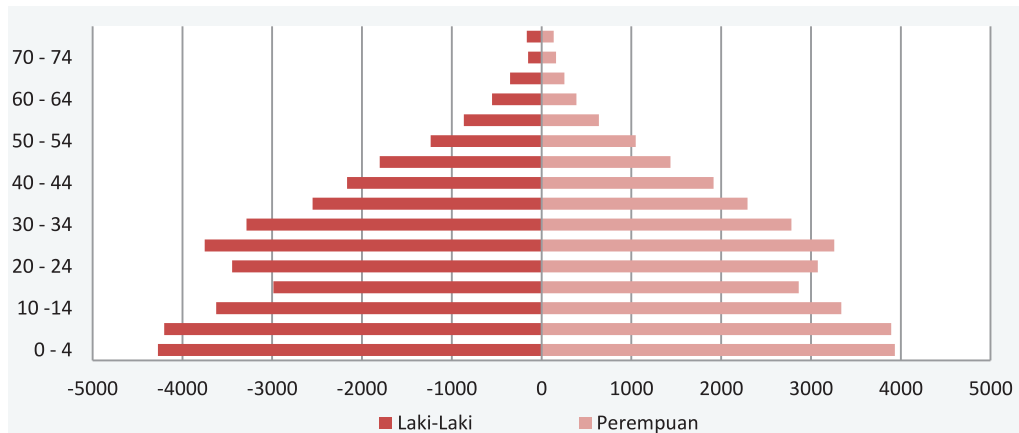
Penduduk kabupaten Fakfak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,71 persen per tahun selama kurun waktu 2006-2011. Walaupun penduduk di Kabupaten Fakfak tumbuh dengan angka yang relatif tinggi yaitu rata-rata sebesar 1,71 persen per tahun, namun porsi penduduk Fakfak terhadap provinsi mengalami penurunan dari 9,2 persen menjadi 8,7 persen pada tahun 2011. Ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk kabupaten lain bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Fakfak. Jumlah penduduk di kabupaten Fakfak pada tahun 2006 hanya sebesar 67.680 jiwa, kemudian meningkat menjadi 69.098 jiwa pada tahun 2011. Angka ini menempatkan Fakfak pada urutan keempat terbesar di Papua Barat. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Gambar 1.8 Jumlah Penduduk di Kabupaten Fakfak



Sumber: Fakfak Dalam Angka, BPS

Gambar 1.9. Komposisi Penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2011



Sumber : Fakfak Dalam Angka, BPS

**Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Fakfak berfluktuasi selama kurun waktu lima tahun terakhir.** Pada tahun 2007 TPAK Kabupaten Fakfak sebesar 67,76 persen menurun menjadi 59,12 persen pada tahun 2009 namun meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 71,01 persen dan menurun kembali pada tahun 2011 menjadi 66,67 persen. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum TPAK di Kabupaten Fakfak mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan dengan provinsi, TPAK Kabupaten Fakfak secara umum relatif lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif yang ingin bekerja di Kabupaten Fakfak relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat.

Tabel 1.2. TPAK dan TPT Kabupaten Fakfak dan Papua Barat periode tahun 2007-2011

Wilayah	TPAK (dalam persen)					TPT (dalam persen)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Fak-Fak	67,76	66,89	59,12	71,01	66,67	4,99	4,75	2,71	3,14	5,13
Papua Barat	66,13	67,69	64,08	64,21	67,24	5,22	6,13	6,94	5,31	5,87
Nasional	66,99	67,18	67,23	67,72	68,34	9,11	8,39	7,87	7,14	6,54

Sumber: Fak-fak Dalam Angka, BPS

**Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Fakfak berfluktuasi selama kurun waktu 2007-2011.** Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Fakfak berkisar antara 2,71 persen hingga 5,13 persen dimana angka TPT tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2009. TPT Kabupaten Fakfak selalu berada di bawah TPT provinsi dan Nasional selama periode 2007-2011. Meski demikian dalam tiga tahun terakhir, TPT Kabupaten Fakfak cenderung meningkat yang mengindikasikan bahwa penambahan angkatan kerja tidak sepenuhnya dapat terserap dalam pasar kerja.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan selama kurun waktu 2007-2011.** Rata-rata peningkatan IPM kabupaten Fakfak dalam kurun waktu 2007-2011 adalah sebesar 0,49 per tahun. Pada tahun 2007 IPM Kabupaten Fakfak sebesar 63,8 kemudian meningkat menjadi 71,74 pada tahun 2011. IPM kabupaten Fakfak lebih tinggi dibandingkan dengan IPM rata-rata provinsi dan berada di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Fakfak relatif lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat.

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Fakfak, Provinsi dan Nasional 2007-2011

Wilayah	2007	2008	2009	2010	2011
Fak-Fak	63,8	70,24	70,80	71,46	71,74
Papua Barat	64,0	64,40	64,93	65,51	66,70
Nasional	70,59	71,17	71,76	72,27	73,00

Sumber : Fakfak Dalam Angka, BPS

## 1.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

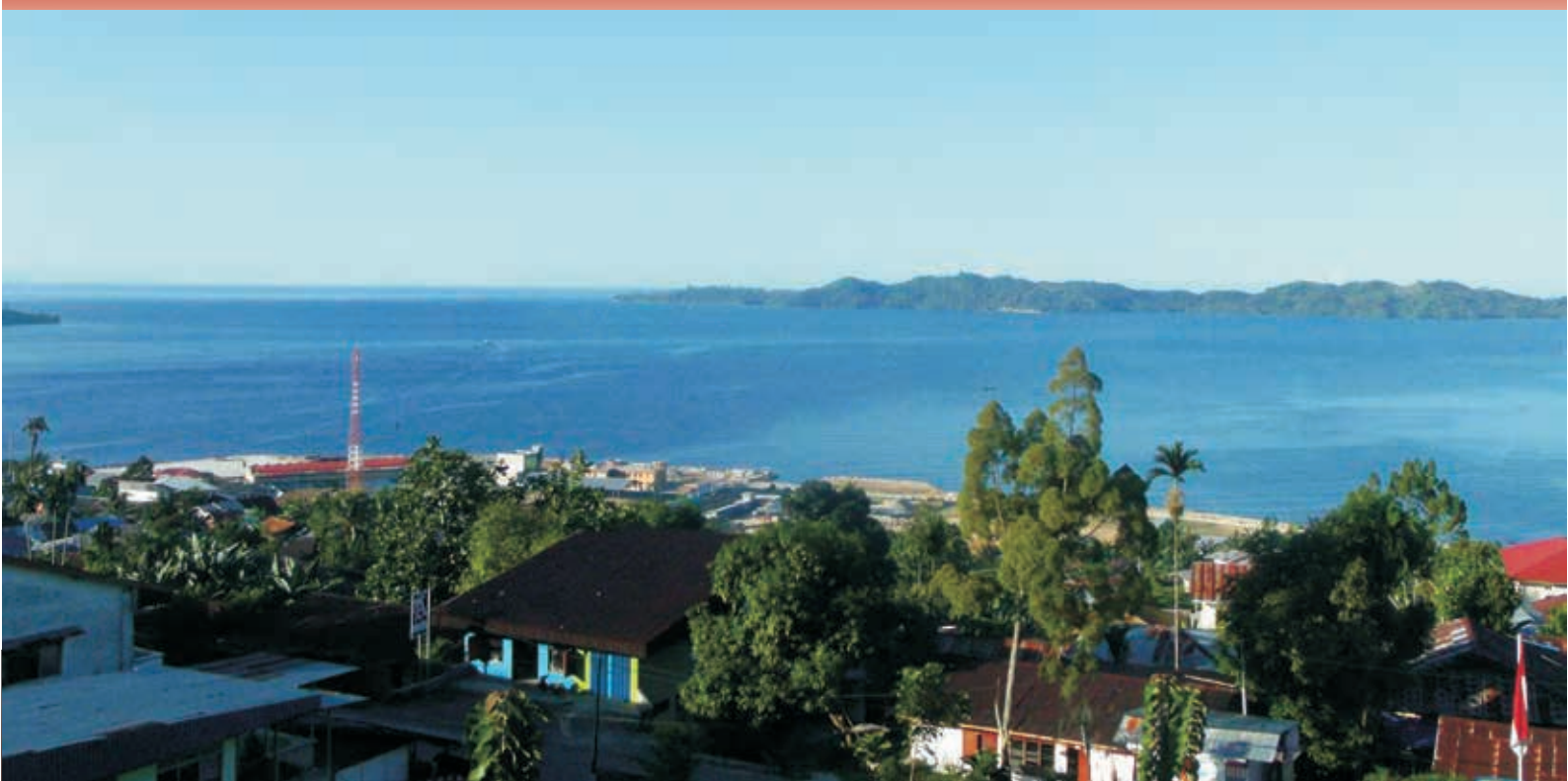
**Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2010-2011 masih dominan walaupun cenderung menurun.** Meskipun transformasi ekonomi berjalan lambat yang ditunjukkan dengan masih dominannya sektor pertanian, Kabupaten Fakfak berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mendekati pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2011. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Fakfak sebaiknya difokuskan pada sektor pertanian sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

**Perluasan lapangan kerja di sektor kunci perlu dibangun untuk meningkatkan penyerapan angkatan kerja.** Untuk itu, pembangunan ekonomi Kabupaten Fakfak juga lebih diarahkan pada sektor-sektor kunci seperti sektor pertanian; tanpa mengabaikan sektor lain seperti perdagangan, hotel dan restoran; industri pengolahan; dan pertambangan dan penggalian. Pada sektor pertanian, pemerintah daerah perlu mendorong pengolahan produk pertanian ke arah industri hilir. Peningkatan produksi di industri hilir selain untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

**Sarana dan prasarana transportasi sebagai penghubung ke daerah lain perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.** Posisi geografis Kabupaten Fakfak yang strategis berada di antara dua provinsi yaitu Papua Barat dan Maluku dapat menjadi potensi Fakfak sebagai daerah transit atau penghubung. Oleh karena itu, sarana dan prasarana infrastruktur khususnya transportasi perlu dikembangkan.

# 2

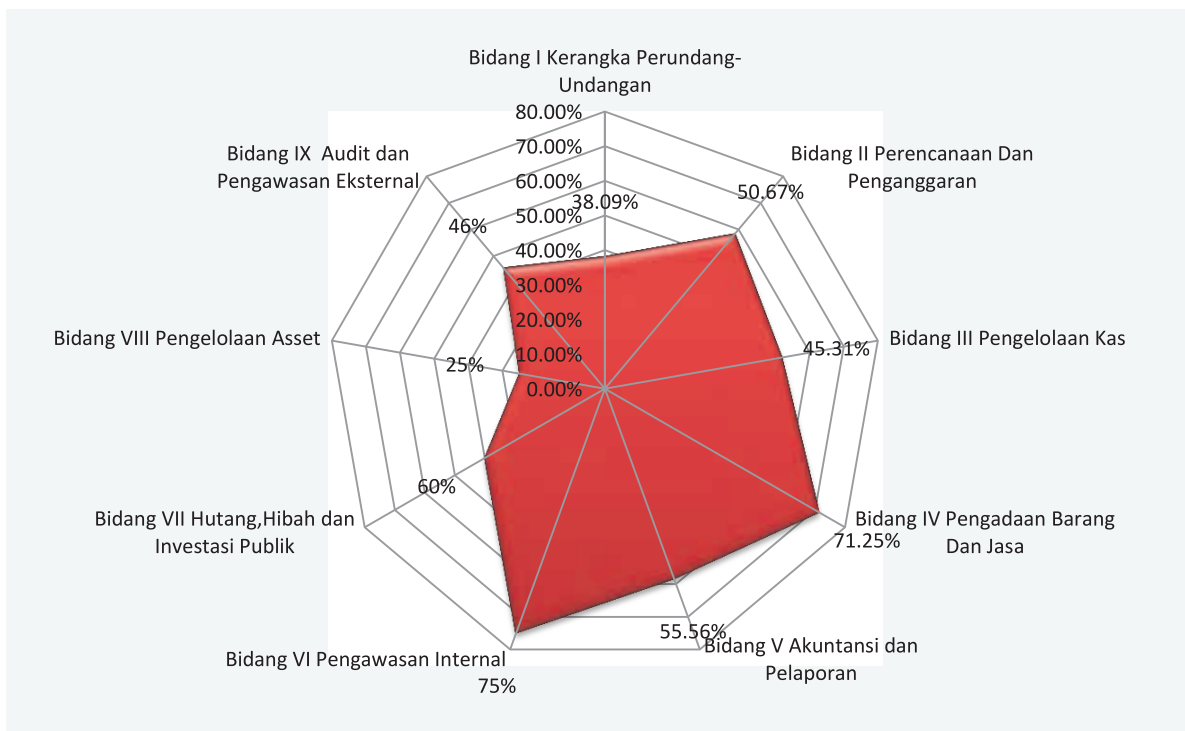
## Pengelolaan Keuangan Daerah



## 2.1. Umum

**Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) atau *Public Finance Manajement (PFM)* merupakan kegiatan diagnostik dengan mengumpulkan informasi mengenai kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.** Tujuan analisis adalah untuk memperoleh gambaran sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan PKD secara efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Informasi yang dikumpulkan menyangkut 9 bidang strategis pengelolaan keuangan pemerintah yaitu: 1) Kerangka Peraturan Perundangan Daerah; 2) Perencanaan dan Penganggaran; 3) Pengelolaan kas; 4) Pengadaan Barang dan Jasa; 5) Akuntansi dan Pelaporan; 6) Pengawasan Internal; 7) Hutang dan Investasi Publik; 8) Pengelolaan Aset; dan 9) Pengawasan Eksternal. Untuk penyederhanaan, bidang-bidang strategis tersebut selanjutnya dikelompokkan kedalam tiga bidang utama, yaitu: Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; dan *Oversight* dan Akuntabilitas.

Gambar 2.1. Dimensi dalam Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak



Sumber: PFM Fakfak 2012

**Pengelolaan keuangan publik di kabupaten Fakfak secara umum masih perlu dibenahi karena hasil Audit BPK memberi opini menolak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).** Capaian dari bidang yang dinilai, menunjukkan nilai yang masih rendah pada kisaran 25 sampai dengan 75 persen atau secara rata-rata berada pada angka 50%. Bidang yang dianggap paling lemah (25%) dicapai oleh pengelolaan Aset, kemudian kerangka peraturan perundangan (38,10%) dan tertinggi (75%) dicapai pengendalian internal. Prosedur pencatatan, perolehan, penilaian, pemindahtanganan dan penghapusan serta pelaporan aset daerah) belum disertai dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan yang cukup, belum ada perda yang mengatur sanksi terhadap pengelola, pengurus barang (berupa tuntutan ganti rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah.

Tabel: 2.1 Grade/Skor Menurut Bidang dan Kategori PKD di Kabupaten Fakfak

BIDANG	SKOR	GRADE (%)
<b>I. Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>7,6</b>	<b>50,67</b>
<b>II. Pelaksanaan Anggaran</b>	<b>46,9</b>	<b>48,85</b>
Pengelolaan Kas	14,5	45,31
Pengadaan Barang dan Jasa	11,4	71,25
Pengelolaan Aset	5	25,00
Hutang dan Investasi Publik	6	60,00
<b>III. Oversight dan Akuntabilitas</b>	<b>25</b>	<b>52,08</b>
Pengawasan Internal	12	75,00
Audit dan Pengawasan Eksternal	5	45,45
Kerangka Peraturan Perundangan Daerah	8	38,10
<b>Total statemen</b>	<b>79,5</b>	<b>50,00</b>

Sumber: Hasil survei PKD tahun 2012

## 2.2. Analisis Perencanaan dan Penganggaran

**Bidang Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Fak-Fak pada hakekatnya masih memerlukan perbaikan dan pembenahan ditandai skor capaian hanya sebesar 50,67%.** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah disusun tapi belum disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Dokumen RPJMD, KUA dan PPAS tahun anggaran 2012 belum seluruhnya mencantumkan indikator yang dapat diukur secara kuantitatif. Penyusunan APBD tahun anggaran 2012 belum berpedoman pada analisis standar belanja. Dokumen Renstra SKPD belum semuanya memuat pagu indikatif yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, bahkan masih ada SKPD yang belum mempunyai RENSTRA. Dokumen perencanaan dan penganggaran tidak mudah di akses oleh masyarakat, dan dalam evaluasi kegiatan yang di laksanakan oleh SKPD belum melibatkan masyarakat.

**Perbedaan antara target dan realisasi APBD Fak-Fak tidak menunjukkan angka yang melampaui batas, namun masih menyisahkan silpa yang cukup besar.** Selisih target anggaran belanja dengan realisasi selama 3 tahun terakhir rata-rata 4,4 persen dan target pendapatan dengan realisasi rata-rata 1,27 persen. Selisih masih kurang dari 10 persen sebagai batas maksimal ketentuan. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Fak-Fak dalam 3 tahun terakhir selalu menunjukkan adanya silpa rata-rata sekitar 49 milyar.

**Dokumen rencana jangka panjang (RPJPD 2006 – 2025) dan rencana lima tahunan (RPJMD 2010 – 2014) Kabupaten Fak-Fak belum semuanya dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur secara kuantitatif.** RPJMD Kabupaten Fak-Fak belum mengintegrasikan indikator capaian Standar Pelayanan Minimal, terutama pada sektor-sektor yang terkait langsung dengan pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan). Renstra dan renja SKPD belum dilengkapi dengan pagu indikatif dan indikator terukur yang dibuat dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA-PPAS sudah di lakukan tapi masyarakat tidak mudah mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran.

**Akses publik terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah Kabupaten Fak-fak belum cukup baik.** Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) berupa ringkasan pidato Bupati dan dokumen penganggaran (ringkasan APBD) di Kabupaten tidak mudah diakses oleh masyarakat luas. Dokumen perencanaan hanya dapat diakses oleh masyarakat yang ikut musrenbang, sedangkan dalam bentuk website, informasi pada media masa maupun sosialisasi langsung belum dilakukan.

## 2.3. Analisis Pelaksanaan Anggaran

**Kinerja pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Fak-Fak secara umum masih perlu ditingkatkan.** Ada 5 aspek PKD dalam kelompok bidang ini yaitu: manajemen kas; pengadaan barang dan jasa; akuntansi dan pelaporan; manajemen aset; pengelolaan hutang, investasi dan hibah. Total skor yang diperoleh kelima aspek PKD ini sebesar 48,85% atau masih dalam kategori belum baik. Penilaian yang lemah diperoleh bidang pengelolaan aset (25%), diikuti pengelolaan kas (45,31%), sementara yang relatif berkinerja baik ditunjukkan oleh aspek pengelolaan hutang dan investasi (60%), dan pengadaan barang dan jasa (71,25%).



### 2.3.1. Manajemen Kas

**Kinerja pengelolaan atau manajemen kas untuk memastikan pengelolaan dana yang efisien di Kabupaten Fak-Fak dalam masih perlu ditingkatkan.** Pengelolaan kas merupakan proses penentuan besaran kas yang dianggarkan sampai dengan pertanggungjawaban atas kas masih perlu perbaikan. Kebijakan, prosedur dan pengendalian pengelolaan kas yang efisien telah dibuat, ditandai penyusunan anggaran kas didasarkan rancangan DPA dan rancangan waktu pelaksanaan kegiatan. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kadang masih terlambat, sebagai akibat dari ketersediaan dana pada bulan-bulan tertentu tidak mencukupi.

**Penerimaan Kas, pembayaran Kas, serta surplus kas temporer, secara umum telah dikelola dan dikendalikan dengan cukup baik.** Seluruh PAD disetorkan kedalam rekening kas daerah berdasarkan regulasi yang telah dibuat, terdapat buku rekapitulasi penerimaan harian dan semua tempat penyimpanan uang SKPD merupakan rekening atas nama Pemerintah Daerah, laporan realisasi anggaran kas dibuat setiap satu kali dalam tiga bulan. Rekonsiliasi bank belum dilakukan secara berkala misalnya setiap bulan, dan surplus kas tidak diinvestasikan dalam investasi jangka pendek.

**Sistem penetapan dan penagihan pendapatan daerah sudah dilakukan secara baik namun peningkatan dan penanganan manajemen pendapatan masih perlu diperbaiki.** Tersedianya rincian Informasi atau data pendukung penetapan dan penagihan pajak untuk setiap pembayar pajak dan sistem penetapan dan penagihan sudah terintegrasi tetapi layanan untuk menanggapi pertanyaan pembayar pajak belum menjadi bidang sendiri dalam struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Fak-Fak. Sanksi terhadap penunggak pajak belum berjalan secara optimal dan rekonsiliasi harian belum dilakukan oleh BUD terhadap rekening Bank yang terkait dengan pendapatan Daerah.

**Realisasi PAD dari penerimaan pajak dan retribusi dalam beberapa tahun terakhir relatif menurun, dan didominasi oleh penerimaan dari penyertaan modal pada BUMD.** Kedepan diharapkan perolehan PAD dari penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat meningkat dengan mulai diterapkannya UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi yang mengalihkan BPHTB dan PBB menjadi kewenangan pemerintah daerah pada tahun 2014. Penerimaan Pendapatan Asli daerah tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010. Tahun 2011 PAD yang diperoleh sebesar **10,299,418,352** dan pada tahun 2010 jumlah penerimaan PAD sebesar **11,538,339,630**.

**Institusi pengelola keuangan daerah yang terpadu sudah terbentuk di Kabupaten Fak-Fak.** Pemerintah daerah Fak-Fak telah melaksanakan amanat PP 58/2005 yang menyatakan bahwa perlu dibentuknya sebuah satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang memadukan fungsi: pendapatan, pelaporan, penganggaran dan perbendaharaan. Urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan urusan pendapatan sudah merupakan urusan bagian DPPKAD.

**Regulasi daerah terkait dengan PKD Kabupaten Fak-Fak masih belum lengkap.** Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah daerah diamanatkan untuk membuat regulasi daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Diantara regulasi yang belum dibuat adalah: (i) Perkada tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; (ii) Perkada tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan (iii) Perkada mengenai analisis standar belanja.

### 2.3.2. Pengadaan Barang dan Jasa

**Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Fak-Fak termasuk dalam kategori berkinerja baik.** Pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa sudah berjalan dengan baik dan mengarah pada peningkatan kompetisi, peningkatan nilai uang (penghematan) belanja dan menciptakan transparansi yang lebih baik. Beberapa aspek yang masih harus dibenahi yaitu: a) proses pengadaan barang/jasa belum menggunakan e-procurement atau layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) karena masalah koneksi internet belum maksimal; b) stakeholder belum paham mekanisme kerja pengadaan secara elektronik; c) belum ada kantor/sekretariat tetap ULP walaupun struktur organisasinya sudah ditetapkan; dan d) belum ada penandatanganan pakta integritas para pejabat pengadaan dan panitia pengadaan barang/jasa.

### 2.3.3. Manajemen Aset

**Pengelolaan aset daerah Kabupaten Fak-Fak termasuk dalam kategori berkinerja Buruk.** Pemerintah Daerah belum mengikuti pelaporan manajemen aset sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Diantara kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan bidang PKD ini adalah: (i) sistem pencatatan aset daerah belum terstandarisasi; (ii) inventarisasi persediaan barang pada tingkat SKPD tidak dilaksanakan setiap tahun; dan (iii) laporan barang milik daerah tidak dibuat sehingga sumber data pelaporan aset dalam neraca daerah tidak jelas.

**Sistem dan prosedur pencatatan barang daerah, baik perolehan, penilaian, penghapusan maupun pelaporannya tidak efektif.** Belum ada pencatatan barang milik daerah dalam bentuk daftar barang pengguna berdasarkan penggolongan dan kodifikasi barang. Belum dilakukan inventarisasi barang secara berkelanjutan dalam bentuk kartu pencatatan kedalam kartu inventarisasi barang sehingga pelaporan aset dalam neraca disangsikan kebenarannya. Sistem dan prosedur pencatatan barang daerah, baik perolehan, penilaian, penghapusan maupun pelaporannya masih dilakukan secara manual.

### 2.3.4. Akuntansi dan Pelaporan

**Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan fungsi akuntansi dan keuangan relatif masih kurang.** Kepala bagian/bidang di DPPKAD dan PPK di Pemerintah Kabupaten Fak-Fak yang berlatar belakang akuntansi dan manajemen keuangan masih sangat terbatas. Kondisi ini diperparah karena seringnya terjadinya mutasi dan tidak adanya pelatihan akuntansi dan penatausahaan keuangan daerah secara rutin kepada staf keuangan SKPD. Akibat Kurangnya Sumber daya Manusia yang memiliki latar belakang akuntansi adalah apabila terjadi salah input di sistem, mereka kesulitan mengetahui dimana kesalahan tersebut terjadi. Hal yang hampir sama ditemui apabila BPK melakukan audit, maka staf mengalami kesulitan dalam melakukan klarifikasi.

**Sistem informasi akuntansi dan manajemen belum terintegrasi secara menyeluruh.** Laporan keuangan dan laporan kinerja belum dihasilkan dalam sebuah sistem yang terintegrasi walaupun terdapat buku jurnal, buku besar, buku besar pembantu dan neraca saldo yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan (SIMDA). Transaksi dan saldo keuangan pemerintah daerah sudah dicatat dengan cukup baik, terlihat dari telah dilaksanakannya praktik akuntansi berpasangan, sudah terdapat pos-pos laporan keuangan minimal tahun 2010 ditingkat DPPKAD, tetapi untuk neraca awal disetiap SKPD belum dibuat, disebabkan sumber daya manusia untuk fungsi akuntansi di setiap SKPD belum ada, dan terkendala dalam penilaian Aset karena tidak ada pencatatan Aset sebelumnya..

**Laporan keuangan dan informasi manajemen Kabupaten Fak-Fak dilaksanakan kurang baik dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.** Dari 4 indikator yang ada baru 2 indikator yang dapat dipenuhi dengan baik, yakni: a) adanya laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati; dan b) laporan keuangan sudah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan manual akuntansi pengelolaan keuangan daerah belum tersedia.

### 2.3.5 Hutang, Hibah dan Investasi Publik

**Pengelolaan keuangan daerah pada bidang hutang, hibah dan investasi publik berkinerja cukup baik.** Kebijakan, prosedur, dan pengendalian pinjaman daerah telah sesuai dengan kerangka kebijakan Nasional namun pengelolaan investasi daerah berupa penyertaan modal belum sesuai Kerangka Kebijakan Nasional. Temuan BPK diantaranya penyertaan modal pada PDAM Fak-Fak, Perusahaan Daerah, dan Hotel Grand Papua tidak didukung bukti kepemilikan. Pencantuman pinjaman dan investasi daerah di dalam laporan keuangan memenuhi syarat dari segi pengamanan, dan telah mendapat persetujuan DPRD berarti secara politis mendapat legitimasi yang kuat. Demikian juga *debt service coverage ratio* pinjaman daerah yang tidak melebihi 2,5% merupakan tindakan untuk meminimalkan risiko. Transaksi hibah dicatat dalam laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan, dari segi akuntansi telah menjamin akuntabilitas terhadap transaksi hibah tersebut. Namun pemberian hibah tanpa melalui publikasi informasi terhadap penerimaan dan kegiatan yang dibiayai hibah, menjadikan praktik pemberian hibah tersebut belum memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas dengan baik.

## 2.4. Pengawasan dan Akuntabilitas

Kinerja pengawasan (*oversight*) dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah (PKD) Kabupaten Fak-Fak termasuk dalam kategori sedang. Kinerja masing-masing bidang yang termasuk dalam kelompok bidang ini akan dibahas pada dua (2) bagian berikut.

### 2.4.1. Audit Internal

**Audit internal** PKD Kabupaten Fak-Fak memiliki kinerja yang tergolong dalam kategori baik. Inspektorat Kabupaten Fak-Fak melaksanakan tugas audit internal secara efektif dengan berpedoman pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Standar Audit Internal. SOP dan Standar Audit Internal disusun mengacu pada Permendagri No. 23/2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Perbup tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kabupaten Fak-Fak. Beberapa factor penyebab sehingga Inspektorat belum mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal diantaranya adalah: 1) sumber daya manusia Inspektorat Fak-Fak masih sangat terbatas; 2) staf yang berkualifikasi jabatan fungsional auditor belum sampai 50%; 3) belum adanya SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi; dan 4) anggaran yang dialokasikan kepada Inspektorat Fak-Fak sangat terbatas.

**Audit Internal sudah sangat baik dilaksanakan dan sesuai dengan program dan prosedur audit yang telah dibuat. Inspektorat secara regular juga sudah menguji sistem Pengendalian intern yang ada dan implementasinya.** Program dan prosedur audit sudah secara regular dikaji ulang dan direvisi, laporan audit internal juga sudah menyatakan ruang lingkup pemeriksaan sebelum memberikan pendapat, dan laporan audit internal dikirimkan kepada walikota/bupati dengan tembusan ke inspektorat Provinsi dan BPK, namun inspektorat tidak mengaudit seluruh kegiatan pemerintah termasuk kegiatan komersil pemerintah karena keterbatasan anggaran operasional. Temuan Audit *sebagian Besar telah ditindak lanjuti oleh Bupati* setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

### 2.4.2. Audit eksternal

**Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) berdasarkan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk kategori belum baik.** Beberapa hal yang mengemuka dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang menjadi dasar pemberian opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih cukup besar dan manajemen aset yang masih lemah.

**Akses publik terhadap LKPD dan LHP masih sangat terbatas.** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak dipublikasikan pada media masa setempat ataupun media elektronik. Masyarakat kurang dilibatkan dalam sidang pembahasan laporan hasil audit laporan keuangan pemerintah di DPRD sehingga terkesan hasil audit hanya boleh diketahui oleh pihak eksekutif dan legislative saja, dan hasil laporan audit eksternal selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*).

**Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif terhadap manajemen keuangan daerah tidak efektif.** DPRD tidak melakukan analisa dan evaluasi terhadap laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk enam bulan berikutnya dan tidak memberikan rekomendasi atau dukungan kepada pihak yang berwenang atas tindak lanjut terhadap temuan BPK.

## 2.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas, peran anggota DPRD sebagai pengawas eksekutif, dan akses publik terhadap dokumen anggaran masih harus ditingkatkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut di atas sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) meningkatkan sinergitas program antar SKPD dalam mewujudkan program prioritas pembangunan dengan menggunakan indikator dan target kinerja serta capaian yang terukur; (3) meningkatkan kualitas dan kemampuan Aparatur Pemerintah dan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi; dan (4) memberikan pemahaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tentang proses perencanaan dan penganggaran. Bentuk program yang direkomendasikan untuk dilaksanakan antara lain: (1) pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk eksekutif dan legislatif; (2) pelatihan monitoring dan evaluasi untuk

aparatur pemerintah dan anggota DPRD; (3) pelatihan aparat pemerintah mulai di tingkat Kampung sampai di tingkat Kabupaten tentang cara menginput data beserta data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen perencanaan; (4) Pelatihan monitoring perencanaan dan penganggaran bagi masyarakat (LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dll) dalam rangka penguatan *Civil Society*.

Pengelolaan pendapatan dan membenahan kelembagaan serta ketersediaan regulasi daerah terkait masih perlu ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah: (1) meningkatkan kapasitas manajemen pendapatan; (2) layanan pembayar pajak perlu di tingkatkan; dan (3) peningkatan dan penanganan manajemen pendapatan harus dimaksimalkan. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa program seperti: (a) Pelatihan dan pendampingan teknis untuk sistem administrasi dan penagihan pajak, khususnya PBB; dan (b) Meningkatkan jumlah SDM yang memahami bidang perpajakan; (c) Studi atau penelitian tentang potensi pajak di Kabupaten Fak-Fak; dan (d) Pelatihan dan pendampingan pembuatan regulasi Perkada tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

**Pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Fak-Fak seharusnya ditunjang melalui pengadaan layanan elektronik dan penguatan kelembagaan ULP dan peningkatan sumber daya manusia.** Rekomendasi yang dianjurkan adalah: (1) Meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa (2) pembuatan sistem Pengadaan Pelayanan Elektronik (3) Pelatihan Penggunaan Pelayanan Pengadaan Elektronik kepada seluruh *stakeholders* (4) Peningkatan Kapasitas Koneksi Internet.

**Manajemen Aset Kabupaten Fak-Fak berkinerja Paling Buruk dari semua bidang PKD.** Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan bidang PKD ini adalah: (i) sistem pencatatan aset daerah belum terstandarisasi; (ii) inventarisasi persediaan barang pada tingkat SKPD tidak dilaksanakan setiap tahun; (iii) laporan barang milik daerah tidak dibuat sehingga sumber data pelaporan aset dalam neraca daerah tidak jelas. Rekomendasi yang penting untuk dilakukan adalah: (1) Mengadakan Pelatihan dan Pendampingan tentang Permendagri No 17 tahun 2007; (2) Pengadaan sistem informasi barang daerah (SIMBADA) berbasis komputer; dan (3) Pelatihan Simbada berbasis Komputer.

**Peningkatan kualitas SDM dan Sistem Informasi serta Pelaporan Keuangan harus mendapatkan perhatian secara lebih serius.** Beberapa rekomendasi yang penting untuk dilaksanakan seperti: 1) Meningkatkan kapasitas SDM berlatar belakang akuntansi pada posisi penting pengelolaan keuangan; 2) Meningkatkan kualitas sistem informasi yang dapat mengintegrasikan setiap bagian. Sedangkan beberapa program yang bisa dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah: a) Pelatihan dan pendampingan teknis di bidang akuntansi terkait penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai PP 71 pada tahun 2014; b) Pendampingan teknis sistem informasi akuntansi yang terintegrasi; dan c) Peningkatan jumlah SDM berlatar belakang Akuntansi.

**Pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.** Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan seperti: 1) meningkatkan peran auditor internal melalui peningkatan sumberdaya anggaran serta SDM auditor fungsional yang berkualitas; 2) meningkatkan komunikasi untuk mendukung audit eksternal serta tindak lanjut temuan audit eksternal. Beberapa program yang sesuai untuk menunjang tujuan ini adalah: a) Pelatihan dan pendampingan teknis untuk memperkuat fungsi audit internal dan penambahan SDM auditor fungsional; b) Peningkatan jumlah SDM berlatar belakang akuntansi dan berkualifikasi JFA; dan c) Memberikan alokasi anggaran yang lebih besar bagi Inspektorat.



# 3

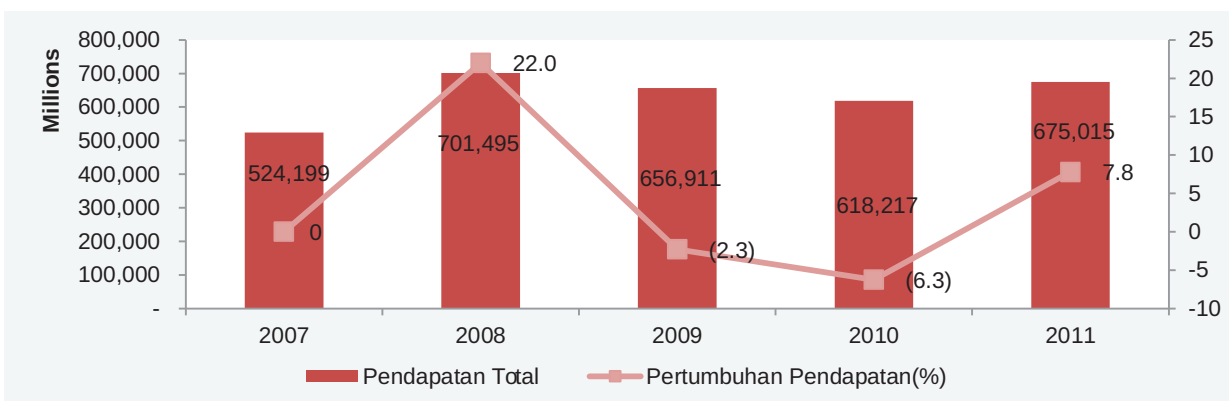
## Pendapatan dan Pembiayaan Daerah



### 3.1. Gambaran Umum Pendapatan Daerah

**Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak berfluktuasi dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2007-2011.** Pendapatan daerah ril Kabupaten Fakfak meningkat sebesar 27,90 persen dalam lima tahun pengamatan, dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 4.25 selama periode 2007-2011. Pertumbuhan pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2008, sebaliknya penurunan terbesar dialami pada tahun 2010. Penurunan pertumbuhan pendapatan daerah ril selain disebabkan oleh pemisahan aset akibat pemekaran Kabupaten Kaimana menjadi daerah otonom baru, juga didorong oleh belum optimalnya mobilisasi pendapatan daerah dan ketergantungan pada *fiscal transfer* yang masih sangat besar. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Fakfak harus mendesain upaya mobilisasi dan pengelolaan pendapatan secara tepat, bukan hanya untuk menjamin peningkatan pendapatan daerah secara umum, tetapi juga agar mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkesinambungan sehingga dapat menekan ketergantungan fiskal dalam jangka panjang.

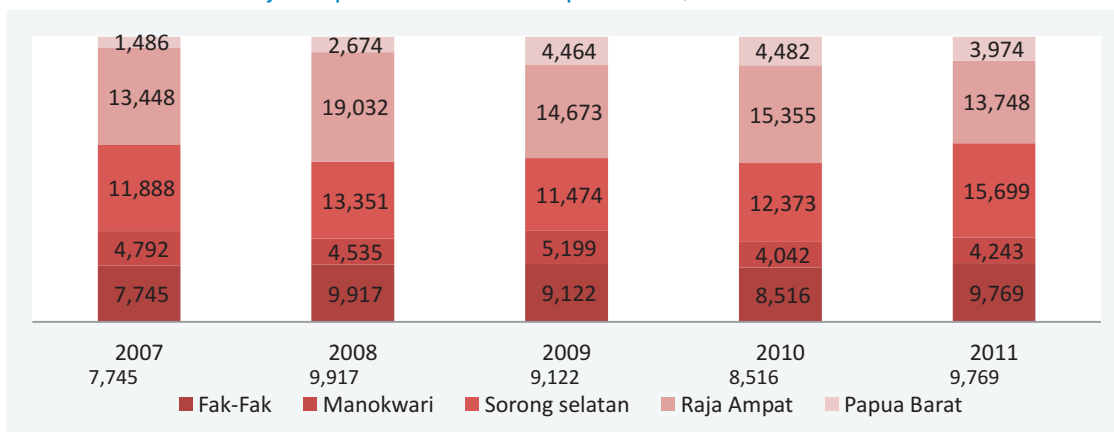
Gambar 3.1 Nilai dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Ril Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2007 Perubahan dan 2008-2011 Realisasi

**Pendapatan daerah ril per kapita Kabupaten Fakfak meskipun menunjukkan peningkatan signifikan, tetapi cenderung berfluktuasi selama periode 2007-2011.** Pendapatan daerah per kapita Kabupaten Fakfak meningkat dari hanya Rp 7,7 juta pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp 9,8 juta pada tahun 2011, dengan capaian tertinggi sebesar Rp 9,9 juta pada tahun 2008. Meskipun mencapai peningkatan signifikan, pendapatan daerah ril per kapita Kabupaten Fakfak tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan daerah per kapita Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorsel. Hanya lebih tinggi dari pendapatan daerah ril per kapita Kabupaten Manokwari. Fakta ini mengindikasikan masih rendahnya pendapatan daerah yang dapat dibelanjakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fakfak secara luas.

Gambar 3.2. Perbandingan Pendapatan Daerah Ril Per Kapita Kabupaten Fakfak, Manokwari, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, Tahun 2007-2011

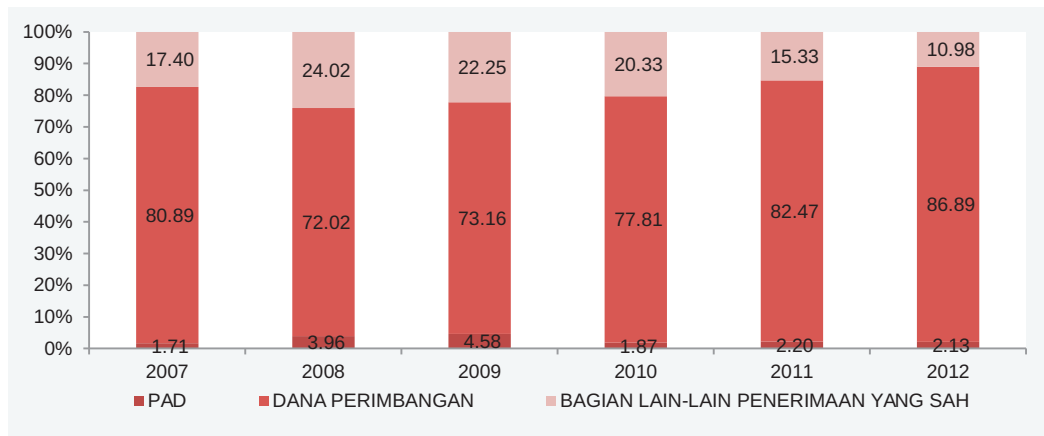


Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Manokwari, Sorsel, Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, 2007-2011

## 3.2. Struktur Pendapatan Daerah

Ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Fakfak bukan hanya masih tinggi, tapi juga cenderung meningkat selama periode 2007-2011. Hal ini nampak pada postur pendapatan daerah Kabupaten Fakfak yang didominasi oleh dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2007-2011 bahkan nampak kontribusi PAD sangat rendah dan cenderung menurun. Fakta ini menunjukkan rendahnya kapasitas fiskal daerah dan tingginya ketergantungan fiskal daerah, khususnya terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kontribusi dana perimbangan meningkat dari hanya 72,02 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 86,89 persen pada tahun 2012. Pada tahun tersebut lain pendapatan daerah yang sah berkontribusi masing-masing sebesar 24,02 persen pada tahun 2008 dan 10,98 persen pada tahun 2012. Artinya, pada tahun 2008 kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Fakfak hanya 3,96 persen, dan semakin menurun menjadi hanya 2,13 persen pada tahun 2012. Kondisi ini harus menjadi perhatian penting SKPD terkait, karena daerah ini tidak selamanya dapat bergantung pada sumber pendapatan dari transfer fiskal dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Daerah harus membangun kapasitas fiskalnya sendiri, dan itu adalah sumber utamanya dari PAD, sehingga mendesak untuk melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan mobilisasi pendapatan asli daerah.

Gambar 3.3. Struktur Pendapatan Daerah Riil Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2011

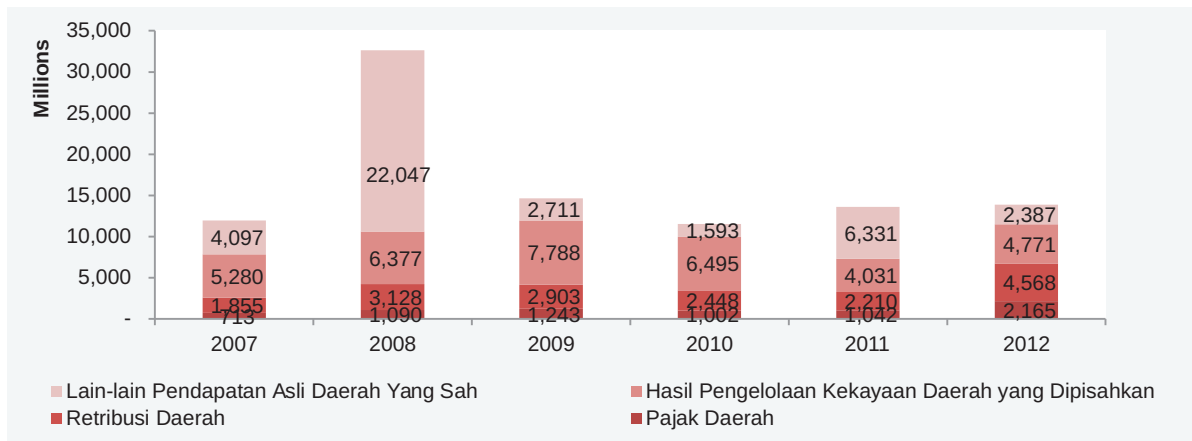


Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, 2007 APBD Perubahan, 2008-2011 APBD Realisasi, dan 2012 APBD Pokok

**Postur PAD Kabupaten Fakfak didominasi oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali pada tahun 2008 dan 2011 didominasi lain-lain PAD yang sah.** Komponen-komponen pembentuk PAD secara total selama periode 2007-2012, 7,38 persen dikontribusi oleh pajak daerah, retribusi daerah berkontribusi sebesar 17,41 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi sebesar 35,35 persen, serta kontribusi terbesar 39,85 persen dikontribusi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terutama diperoleh dari jasa giro. Artinya, secara umum PAD Kabupaten Fakfak sangat mengandalkan sumber penerimaan lain-lain yang sah yaitu jasa giro. Sedangkan untuk pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan belum memberikan kontribusi yang besar. Padahal potensi pajak dan retribusi daerah sebetulnya lumayan besar, seperti pajak hiburan, restoran, tetapi selama ini pengelolaannya belum diintensifkan sehingga banyak potensi pendapatan daerah yang tidak dapat direalisasikan secara optimal.



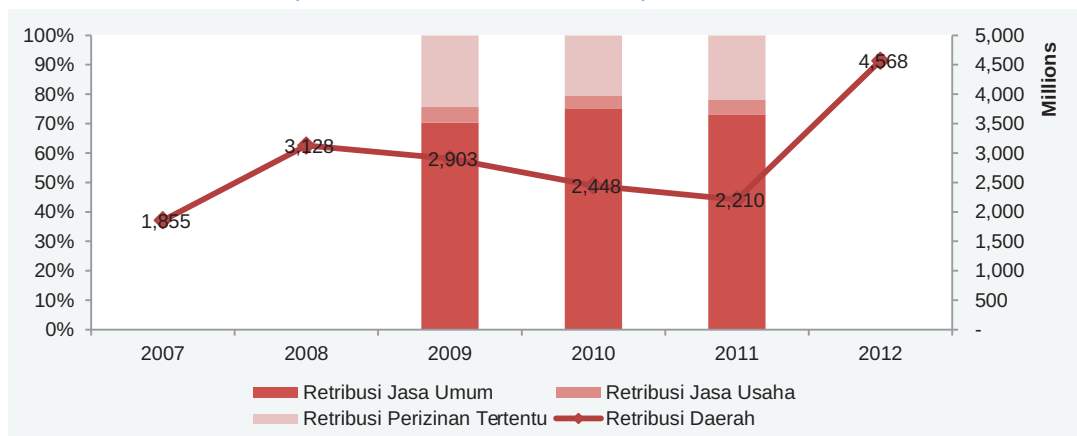
Gambar 3.4. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012

**Retribusi daerah Kabupaten Fakfak didominasi obyek retribusi jasa umum selama periode 2009-2011.** Penerimaan dari retribusi pada tahun 2008 mengalami kenaikan kemudian terjadi penurunan pada tahun 2009-2011. Rincian retribusi terbesar diperoleh dari jasa umum seperti pelayanan kebersihan dan pelayanan kesehatan, retribusi perizinan tertentu dan retribusi jasa usaha. Jika dilihat sumber retribusi terkecil yaitu jasa usaha, tidak sebanding dengan jumlah jasa usaha yang ada di kabupaten Fakfak, seperti pasar, restoran dan perhotelan yang berkembang pesat. Nampaknya kemampuan mobilisasi retribusi daerah belum berjalan optimal, terutama karena masih terbatasnya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi kesehariannya. Dengan demikian, diperlukan kebijakan strategis dari pemerintah daerah untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, sehingga pada saatnya nanti sumber-sumber retribusi daerah akan bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Dukungan regulasi terhadap retribusi daerah sangat diperlukan guna memperbesar sumber-sumber retribusi daerah.

Gambar 3.5. Komposisi Retribusi Daerah Kabupaten Fakfak, Tahun 2009-2011



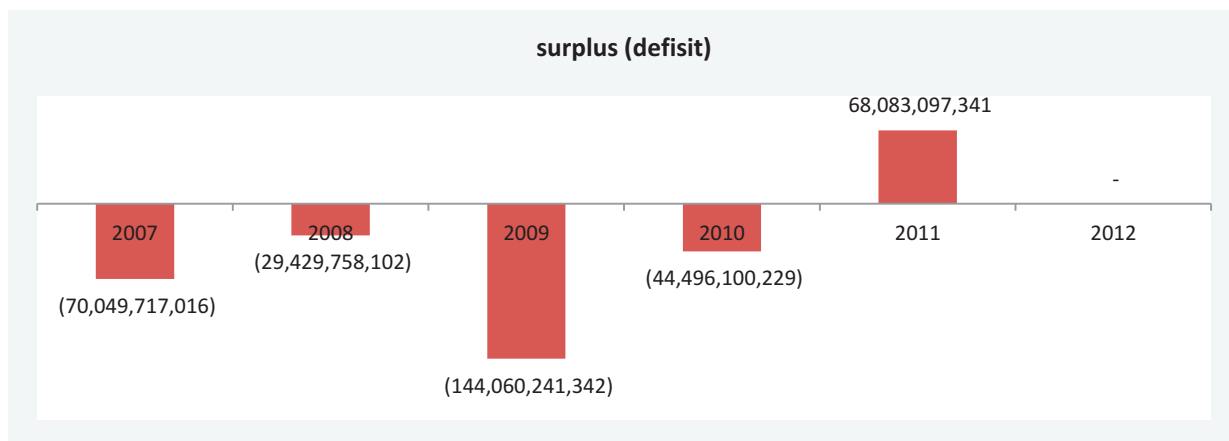
Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012.

### 3.3. Pembiayaan Daerah

APBD Kabupaten Fakfak berhasil mencapai surplus pada tahun 2011, setelah empat tahun sebelumnya berturut-turut mengalami defisit. Defisit terbesar dialami pada tahun 2009 mencapai Rp 144,06 milyar, jauh melebihi ketentuan perundangan yang hanya membolehkan defisit pembiayaan paling besar 3 persen dari APBD. Meskipun angka defisit pada tahun 2007 dan 2010 juga melebihi angka 3 persen, tetapi tidak sebesar yang dialami pada tahun 2009 tersebut. Kondisi ini hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Fakfak ke depan, karena dapat berdampak beban keuangan daerah dan

membebanikan perekonomian daerah secara keseluruhan. Terjadinya defisit disebabkan oleh peningkatan program dan kegiatan pemerintah yang berfokus pada pembangunan fasilitas fisik daerah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana dalam RPJMD kabupaten Fakfak yaitu menyediakan fasilitas pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2011 terjadi perubahan fokus pembangunan pemerintah, yaitu lebih berfokus pada jasa pelayanan kepada masyarakat (non-fisik) berupa bantuan sosial. Menurunnya belanja fisik mengakibatkan total belanja berkurang sehingga posisi kesimbangan pendapatan dan belanja daerah menjadi surplus. Defisit yang terjadi pada tahun 2007-2011 dibiayai dari penerimaan sisa lebih perhitungan tahun lalu, sumber lain-lain dan penerimaan pinjaman dan obligasi. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk penyertaan modal dan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.

Gambar 3.6. Perkembangan Pembiayaan Daerah (Surplus-Defisit) APBD Kabupaten Fakfak, Th. 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2011.

### 3.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

**Ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Fakfak bukan hanya masih tinggi, tapi juga cenderung meningkat selama periode 2007-2011.** Hal ini nampak pada postur pendapatan daerah Kabupaten Fakfak yang didominasi oleh dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2007-2011 bahkan nampak kontribusi PAD sangat rendah dan cenderung menurun. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah bahkan tidak mencapai 4 persen setiap tahunnya. Kondisi ini harus menjadi perhatian penting SKPD terkait, karena daerah ini tidak selamanya dapat bergantung pada sumber pendapatan dari transfer fiskal dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk itu, direkomendasikan secara umum agar pemerintah daerah membangun kapasitas fiskalnya sendiri, dan itu adalah sumber utamanya dari PAD, sehingga mendesak untuk melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan mobilisasi pendapatan asli daerah. Secara khusus pemerintah daerah menyusun pemetaan pendapatan asli daerah berdasarkan obyek pendapatan, kewilayahan dan potensi ekonomi masyarakatnya. Sebelum sampai kepada program intensifikasi pendapatan daerah, pemerintah daerah harus memiliki peta pajak daerah, peta retribusi daerah, dan peta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya dalam suatu sistem informasi keuangan daerah, setelah itu intensifikasi pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah.

**APBD Kabupaten Fakfak secara umum mengalami defisit, bahkan melebihi ketentuan perundangan maksimal tiga persen.** Defisit rata-rata di atas tiga persen dari APBD, sehingga menyalahi ketentuan perundangan yang mensyaratkan defisit maksimal tiga persen dari APBD tahun bersangkutan. Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat berdampak pada kurang sehatnya keuangan daerah karena beban defisit yang besar dan dapat membebani perekonomian daerah secara keseluruhan. Untuk itu, direkomendasikan agar pemerintah daerah menekan pembiayaan defisit pada level maksimal tiga persen serta fokus menutupi defisit yang tidak tergantung pada utang daerah dan mengelola alokasi defisit pada pembangunan fasilitas fisik daerah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Secara khusus pemerintah daerah perlu memberikan perhatian pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, agar defisit anggaran yang terjadi tepat sasaran serta tidak melemahkan keuangan daerah dan membebani perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus mencermati alokasi anggaran hingga satuan tiga, bahkan harus menciptakan keseimbangan belanja, antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, khususnya keseimbangan antara belanja pegawai dengan belanja modal.



# 4

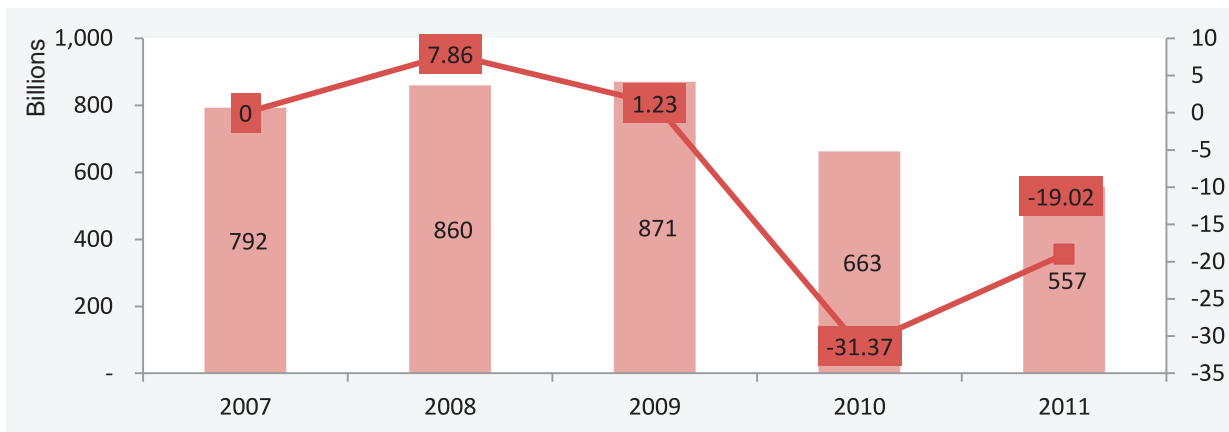
## Analisis Belanja Daerah



## 4.1. Gambaran Umum Belanja Daerah

Hingga tahun 2009, belanja riil pemerintah Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan, namun pada dua tahun berikutnya mengalami penurunan cukup tajam. Pada tahun 2009, belanja daerah sebesar Rp 871 milyar menurun drastis menjadi Rp 557 milyar di tahun 2011 atau dengan kata lain, pertumbuhan belanja daerah menurun drastis dari 1,23 persen di tahun 2009 menjadi -19,02 persen di tahun 2011. Belanja daerah pada tahun 2011 jauh lebih rendah dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Penurunan secara riil belanja daerah turut mempengaruhi pelayanan publik baik secara kuantitas maupun kualitas. Walaupun terjadi penurunan total belanja, namun secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten FakFak adalah positif sebesar 4,13 persen. Penyumbang terbesar belanja daerah adalah belanja langsung 56 persen per tahun dan porsi belanja tidak langsung sebesar 44 persen.

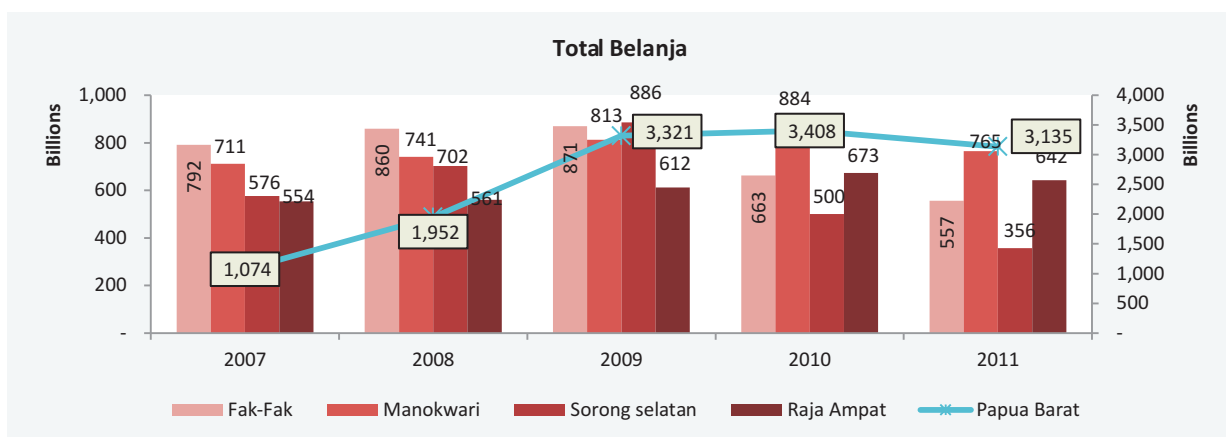
Gambar 4.1 Perkembangan Total Belanja Riil Kabupaten Fakfak, 2007-2011



Sumber : 2007 APBD Perubahan, 2008-2011 Realisasi dan 2012 Induk, data diolah.

Jika dibandingkan pertumbuhan belanja Kabupaten Fakfak dengan tiga kabupaten studi, Kabupaten FakFak menempati posisi tertinggi. Kabupaten Raja Ampat bertumbuh dengan rata-rata (-0,24 persen), Manokwari (-0,56 persen) dan Sorong Selatan (-6,34 persen). Untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik, maka belanja daerah secara riil perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penetapan rencana belanja daerah perlu memperhitungkan kenaikan tingkat harga di Kabupaten Fak-Fak.

Gambar 4.2 Perkembangan Belanja Kabupaten FakFak dan Tiga Kabupaten Terpilih, 2007-2011

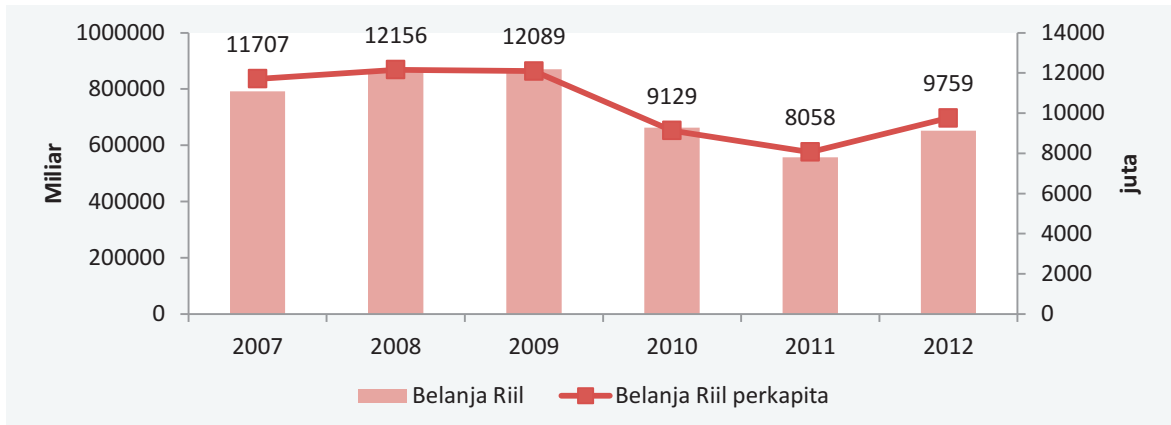


Sumber: APBD Kabupaten Fakfak 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi dan 2012 Induk, data diolah.

Belanja riil perkapita Kabupaten Fakfak berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Belanja perkapita mengalami peningkatan pada periode 2007-2009, dan menurun pada dua periode berikutnya. Dalam lima tahun tersebut, belanja riil per kapita bertumbuh sangat lambat dan mencapai angka -8,23 persen per tahun. Belanja per kapita tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 12.156 juta dan terendah sebesar Rp 8.058 juta pada tahun 2011. Pada tahun 2011, setiap penduduk memperoleh alokasi belanja secara riil hanya Rp 8 juta jauh

lebih rendah dari tahun 2008 yang mencapai Rp 12 juta per orang. Untuk tetap mempertahankan nilai belanja riil untuk setiap penduduk pada tahun-tahun mendatang, maka tingkat inflasi harus terjaga stabil dan relative rendah. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu faktor yang dapat menstabilkan tingkat harga.

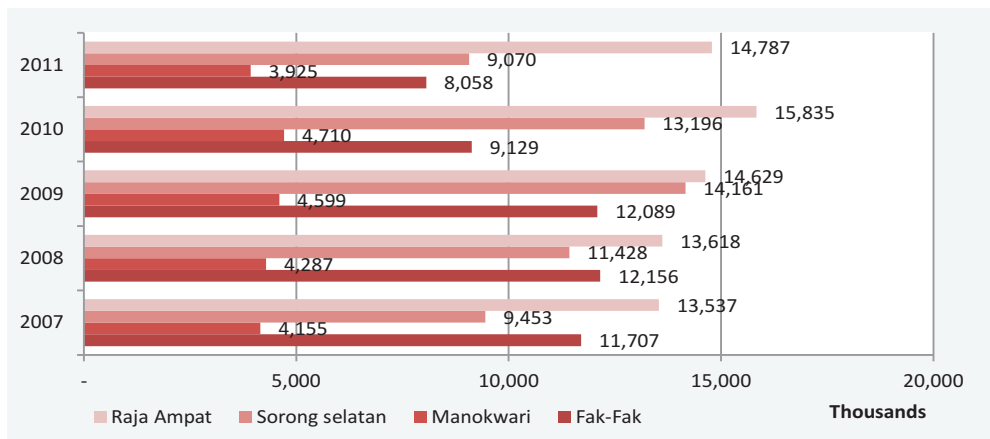
Gambar 4.3 Perkembangan Belanja Riil Perkapita Kabupaten Fakfak, 2007-2012



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi dan 2012 Induk, data diolah.

**Belanja perkapita di Kabupaten Fakfak berada pada posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat.** Adanya perbedaan belanja per kapita terutama disebabkan oleh perbedaan jumlah penduduk di masing-masing daerah. Secara rata-rata, belanja per kapita di Kabupaten Fakfak sebesar Rp 10,62 juta. Artinya setiap penduduk di Kabupaten Fakfak memperoleh alokasi belanja baik dalam bentuk pelayanan publik maupun dalam bentuk lainnya sebesar Rp 10,62 juta per tahun. Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten yang paling sedikit jumlah penduduknya sehingga setiap penduduk memperoleh alokasi belanja berkisar Rp 15 juta per tahun.

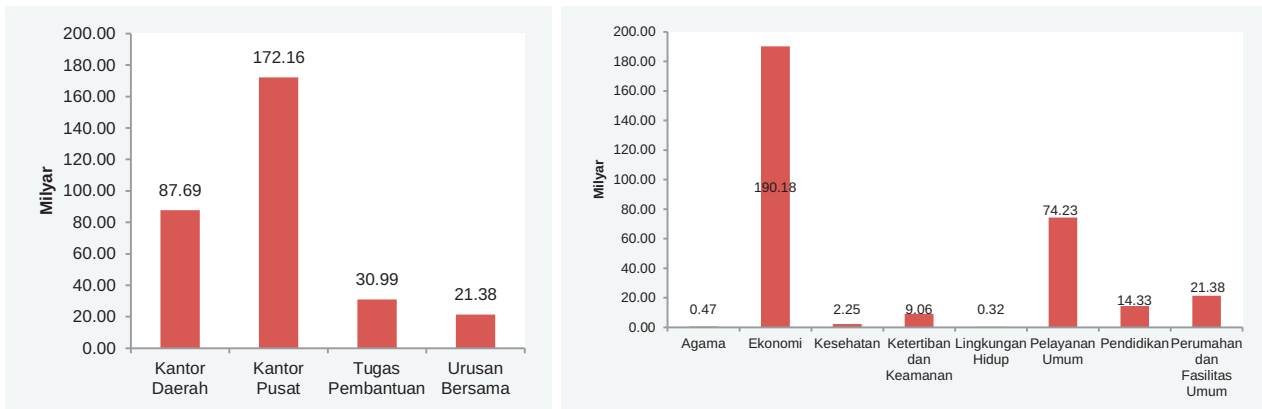
Gambar 4.4 Komparasi Belanja Riil Perkapita Kabupaten Fakfak dan Tiga Kabupaten Lainnya, 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Fak-fak 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi dan 2012 Induk, data diolah.

**Belanja pemerintah pusat melalui mekanisme APBN di Kabupaten Fakfak relative besar dibandingkan dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat.** Pada tahun 2011, dana APBN yang dibelanjakan di Kabupaten Fakfak sebesar Rp 312 miliar. Dana tersebut dikelola oleh Kantor Pusat sebesar Rp 172 miliar atau sekitar 55 persen dari total belanja pusat di kabupaten ini. Selebihnya dikelola oleh Kantor Daerah sebanyak Rp 87,6 miliar atau sekitar 28 persen, dan selebihnya oleh Urusan bersama dan pemerintah daerah melalui tugas pembantuan. Belanja pusat menurut klasifikasi fungsi lebih didominasi oleh fungsi ekonomi sebesar Rp 190,18 milyar (61 persen). Dari angka tersebut, sebagian besar atau sekitar 87 persen dikelola oleh Kantor Pusat. Besarnya belanja pusat untuk fungsi ekonomi sejalan dengan kondisi Kabupaten Fakfak yang saat ini membutuhkan dukungan penganggaran untuk mendorong aktivitas perekonomian di daerahnya.

Gambar 4.5. Belanja Pusat melalui Mekanisme APBN di Kabupaten Fakfak, 2011

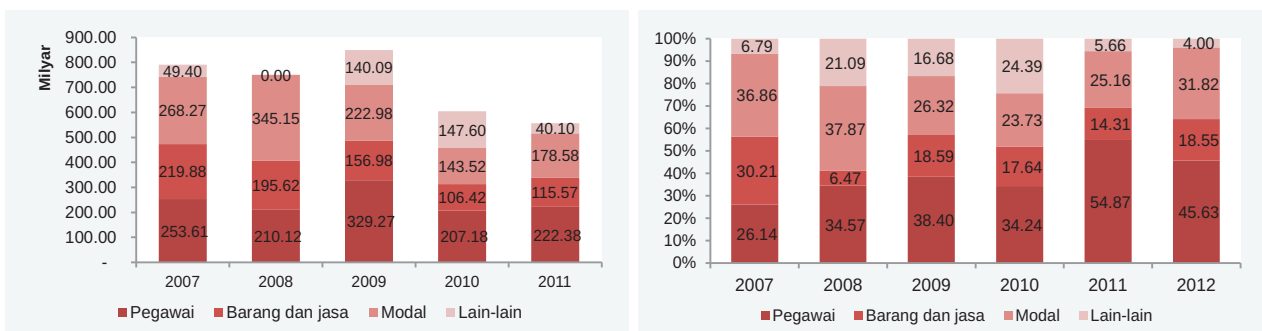


Sumber: Kementerian Keuangan DJPK, 2013

## 4.2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Belanja daerah Kabupaten Fakfak didominasi oleh belanja pegawai dengan proporsi yang meningkat dari tahun 2007-2012. Secara umum alokasi belanja pegawai rata-rata sebesar 38,97 persen (Rp 283,9 milyar). Pada tahun 2007-2008 alokasi belanja didominasi oleh belanja modal yaitu sebesar 36,86 persen (2007) dan 37,87 persen (2008), sementara pada tahun 2009-2012 alokasi belanja didominasi oleh belanja pegawai rata-rata 43,29 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode 2007-2012 terjadi pergeseran alokasi belanja dari belanja modal ke belanja pegawai. Tingginya belanja modal pada 2007-2008 dikarenakan tingginya tingkat pembangunan fasilitas fisik meliputi sekolah, rumah sakit, jalan dan lainnya. Pada tahun 2009-2012 tingkat pembangunan fisik menurun dan tingkat belanja pegawai meningkat yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pegawai sebanyak 522 orang.

Gambar 4.6 Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2007-2011



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi dan 2012 Induk, data diolah.

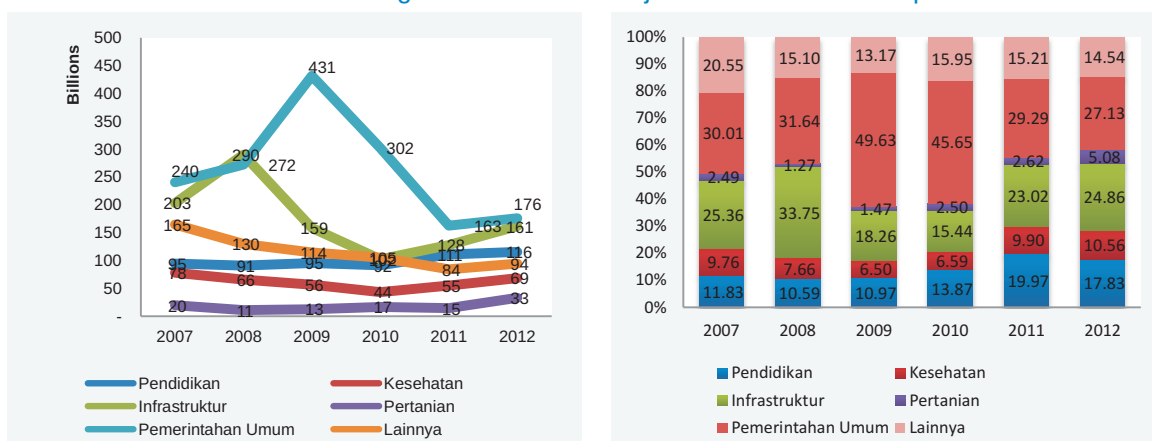
## 4.3. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Sektor

Sektor pemerintahan umum memperoleh alokasi belanja terbesar diantara sektor-sektor lainnya. Dalam kurun waktu 2007-2011, rata-rata belanja untuk sektor pemerintahan umum sebesar Rp 281 milyar atau rata-rata 37,24 persen per tahun. Walaupun porsi belanja sektor pemerintahan umum relative besar, namun pada dua tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan porsi belanja untuk pemerintahan umum hanya berdampak pada sektor pendidikan yang juga mengalami peningkatan belanja di tahun 2010.

Dukungan anggaran untuk sektor infrastruktur di Kabupaten Fak-Fak belum maksimal. Hal ini tercermin dari belanja yang dialokasikan untuk sektor tersebut sangat berfluktuasi. Porsi belanja tertinggi sebesar 33,75 persen di tahun 2008 dan terendah sebesar 15,44 persen di tahun 2010 atau rata-rata 23,16 persen dari total belanja daerah. Perhatian pemerintah untuk sektor infrastruktur mulai nampak pada tahun 2011 yaitu proporsinya terhadap total belanja meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Bahkan pada APBD pokok 2012, direncanakan meningkat menjadi 24 persen. Peningkatan porsi belanja di tahun 2011 sebagai akibat dari penurunan porsi belanja pemerintahan umum.

Dalam kurun waktu 2007-2011, alokasi belanja yang cukup konsisten peningkatannya adalah sektor pendidikan. Sejak tahun 2008, porsi belanja sektor pendidikan sebesar 10,59 persen meningkat hampir dua kali lipat menjadi 19,97 persen di tahun 2011. Meskipun alokasi belanja sektor tersebut meningkat namun proporsinya masih lebih rendah dari regulasi nasional sebesar 20 persen. Selama periode tersebut, proporsi belanjanya secara rata-rata 13,44 persen. Kondisi yang sama untuk sektor kesehatan, dukungan anggaran untuk mendorong sektor tersebut juga terkategori rendah yakni hanya berkisar rata-rata 8,08 persen per tahun. Sektor yang paling rendah memperoleh alokasi belanja selama periode 2007-2011 adalah sektor pertanian rata-rata 2,07 persen per tahun.

Gambar 4.7 Perkembangan dan Porsi Belanja Riil Sektoral di Kabupaten Fakfak



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi dan 2012 Induk, data diolah.

## 4.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Belanja daerah Kabupaten Fakfak mengalami penurunan pada periode 2007-2011. Penurunan belanja daerah pada dua tahun terakhir terutama dikontibusi oleh penurunan belanja modal dan penurunan sektor pemerintahan umum. Penurunan belanja daerah berpengaruh terhadap belanja per kapita yang juga mengalami penurunan. Selama periode pengamatan, belanja pegawai cenderung meningkat dan belanja modal cenderung menurun. Sementara belanja menurut sektor, meskipun kecenderungan mengalami penurunan pada dua tahun terakhir namun proporsinya masih mendominasi diantara sektor lainnya. Terkait dengan gambaran tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Fakfak masih perlu ditingkatkan terutama pada perencanaan anggaran. Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- (i) Peningkatan kapasitas perencana program dalam menyusun rencana anggaran yang berbasis sektor prioritas
- (ii) Peningkatan porsi belanja untuk infrastruktur melalui penghematan belanja pada sektor pemerintahan umum
- (iii) Peningkatan porsi belanja untuk sektor pertanian sebagai leading sektor di Kabupaten Fakfak melalui penghematan belanja untuk barang dan jasa
- (iv) Peningkatan porsi belanja untuk sektor pendidikan hingga memenuhi regulasi nasional 20 persen.





# 5

## Analisis Sektor Strategis

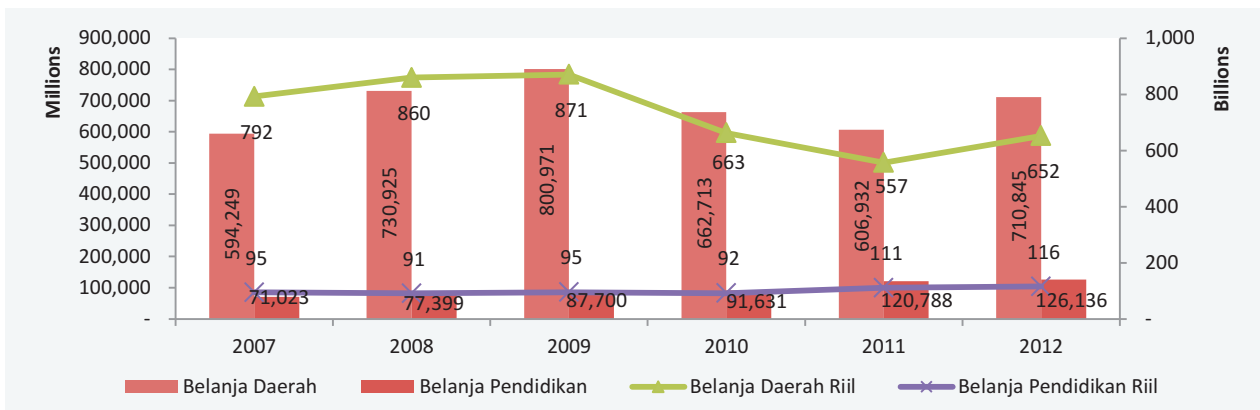


## 5.1. Sektor Pendidikan

### 5.1.1. Belanja Sektor Pendidikan

Proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah di Kabupaten Fakfak sebesar 17% cenderung meningkat kurun waktu 2007-2012. Pada tahun 2011, proporsi belanja pendidikan terhadap total belanja daerah sudah mencapai 19,9 %, namun pada 2007-2010 berfluktuasi, dimana terjadi penurunan di tahun 2007 sebesar 12% dan kembali turun masing sebesar 10,6% di tahun 2008 dan sebesar 10,9% di tahun 2009, namun demikian di tahun 2010 kembali naik sebesar 13,8%. Belanja sektor pendidikan berfluktuasi dengan total belanja daerah yang menurun, menyebabkan proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah terus membesar.

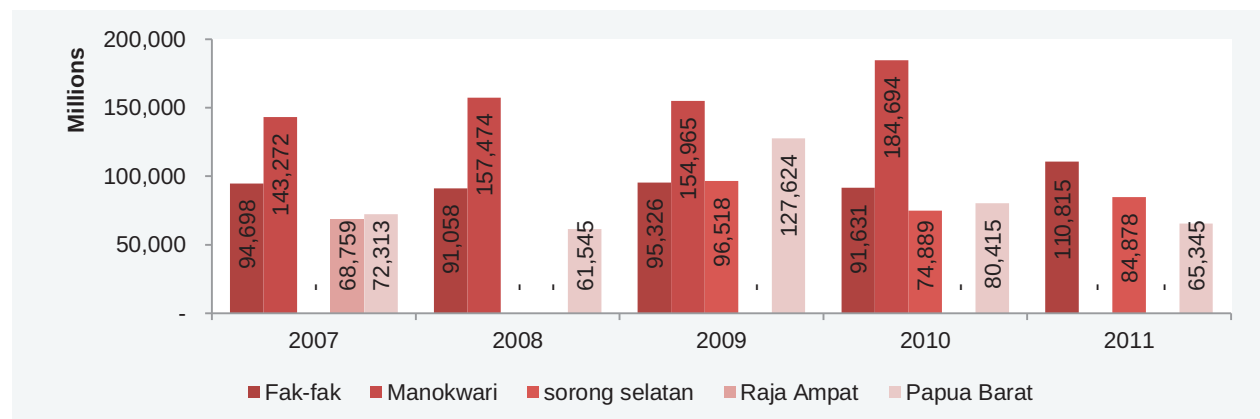
Gambar 5.1. Total Belanja Sektor Pendidikan di Kabupaten Fakfak 2007-2012



Sumber: APBD kabupaten Fakfak, 2007 Perubahan, 2008-2011 realisasi, 2012 induk.

Rata-rata belanja sektor pendidikan di Kabupaten Fakfak terbesar kedua, dibandingkan kabupaten lainnya. Secara umum belanja sektor pendidikan empat kabupaten, didominasi oleh Kabupaten Manokwari dengan alokasi belanja pendidikan tertinggi yaitu sebesar Rp 128.080.907.065; disusul Kabupaten Fakfak sebesar Rp 96.705.361.617; Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp 51.257.134.190, dan Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp 13.751.823.180.

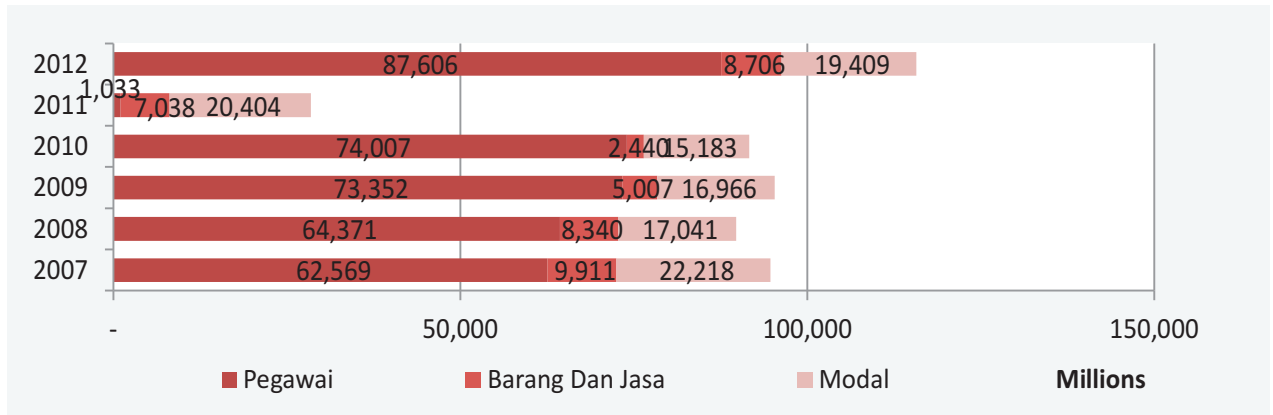
Gambar 5.2 Belanja Daerah Sektor Pendidikan Kabupaten Fakfak dan Provinsi/Kabupaten Terpilih.



Sumber: APBD kabupaten Fakfak, 2007 Perubahan, 2008-2011 realisasi, 2012 induk.

Belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi di Kabupaten Fakfak dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai. Rata-rata proporsi belanja sektor pendidikan adalah 70,2% untuk belanja pegawai, 21,8% untuk belanja modal dan 8% dialokasikan untuk belanja barang dan jasa.

Gambar 5.3 Analisis Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Tingkat Kabupaten/Kota

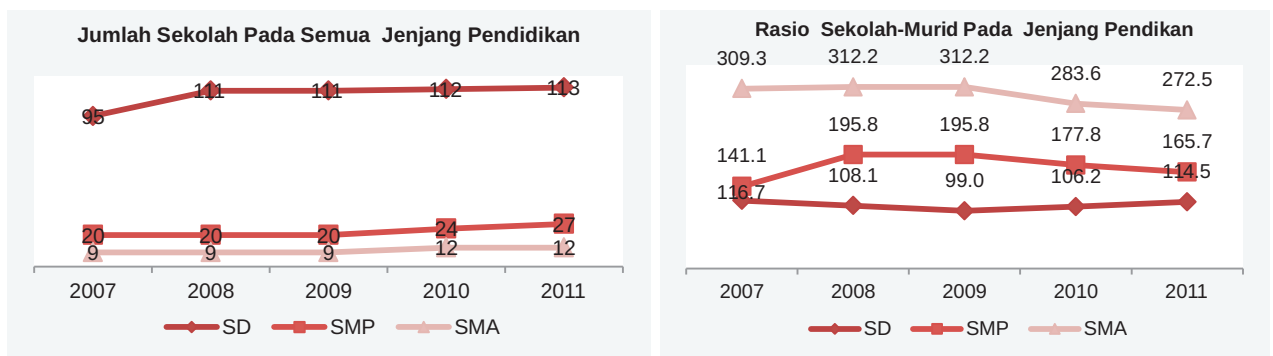


Sumber: APBD kabupaten Fak-fak, 2007 Perubahan, 2008-2011 realisasi, 2012 induk.

### 5.1.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Pendidikan

**Rasio Murid-Sekolah (RMS)** pada jenjang pendidikan SMA dan SMP selama periode 2008 - 2011 semakin mengecil dibandingkan jenjang pendidikan SD. Kondisi ini disebabkan oleh penambahan jumlah sekolah sebanyak 3–7 bangunan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA pada periode tersebut. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar rasio sekolah-murid. Tahun 2011, di jenjang pendidikan SD, setiap sekolah rata-rata mampu menampung 114 murid; di jenjang pendidikan SMP rata-rata mampu menampung 165 murid dan untuk jenjang pendidikan SMA rata-rata mampu menampung 272 murid. Keseluruhan angka ini relatif lebih rendah dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2007 dan jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, Kabupaten Fakfak relatif lebih baik dibandingkan dengan capaian provinsi Papua Barat, kecuali pada jenjang pendidikan SMA. Kedepan, perlu dilakukan penambahan jumlah sekolah untuk dapat mencapai rata-rata rasio murid-sekolah di jenjang pendidikan menengah atas provinsi Papua Barat.

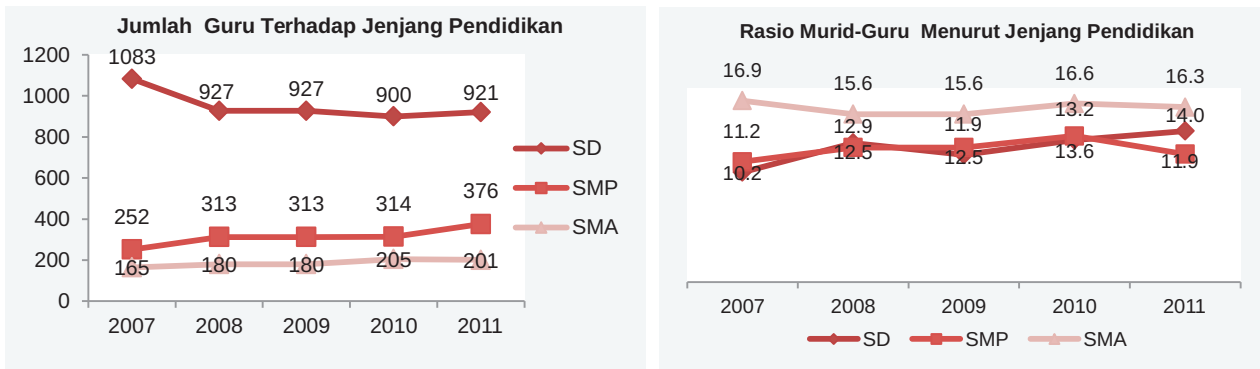
Gambar 5.4 Jumlah dan Rasio Sekolah Murid



Sumber: Daerah dalam angka Kabupaten Fakfak 2008– 2012 BPS, diolah.

**Rasio Murid-Guru (RMG)** pada semua jenjang pendidikan selama periode 2007–2011 mengalami perubahan yang fluktuatif. Semakin besar RMS, secara relatif semakin kurang baik kinerja sektor pendidikan. Tahun 2011, di jenjang pendidikan SD, setiap guru rata-rata mampu membina 14 murid, di jenjang pendidikan SMP, guru rata-rata mampu membina 12 murid sekolah. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA, setiap guru rata-rata mampu membina 19 murid. Keseluruhan angka ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2007. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, RMS kabupaten ternyata lebih baik, kecuali pada jenjang pendidikan SMA. Dengan demikian, pada tahun berikutnya perlu adanya kebijakan penambahan jumlah guru atau tenaga pengajar khususnya di jenjang pendidikan SMA.

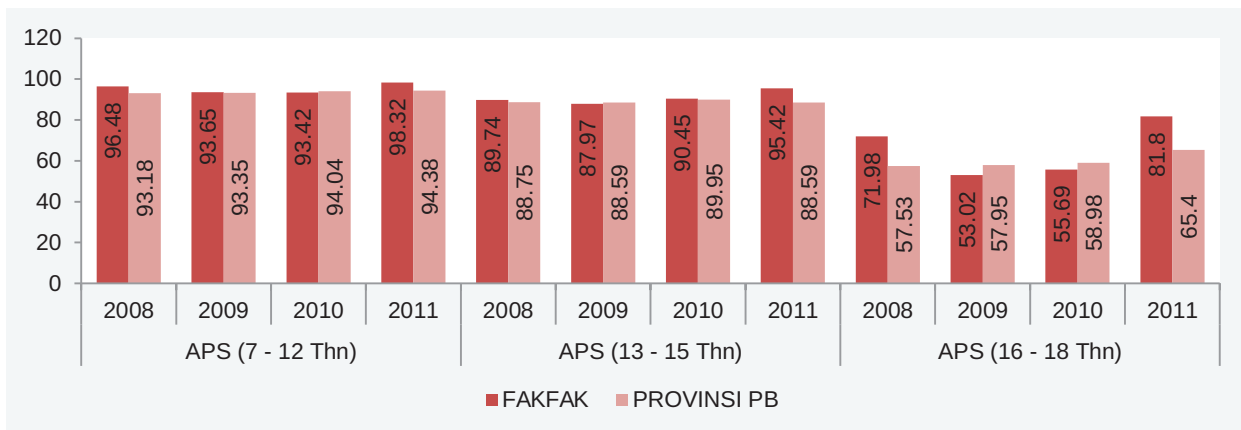
Gambar 5.5 Jumlah Guru dan Rasio Murid-Guru



Sumber: Daerah Kabupaten Fakfak Dalam Angka 2008 – 2012 BPS, data diolah.

**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Fakfak relatif lebih tinggi dibandingkan dengan APS Provinsi Papua Barat di semua jenjang pendidikan kurun waktu 2008-2011.** Tahun 2011, APS SD/MI (6-12 tahun), SMP/MTs (13-15 tahun) dan SMA/SMK/MA (16-18 tahun) masing-masing sebesar 98,32%, 95,42%, dan 81,8%, yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi masing-masing 94,38%, 88,59%, dan 65,4%. Selanjutnya, peningkatan APS dari tahun 2008 hingga 2011 di jenjang pendidikan SD/MI (7-12 tahun) rata-rata 1,84; APS SMP/MTs (13-15 tahun) rata-rata 5,58 dan APS SMA/SMK/MA (16-18 tahun) rata-rata 9,82.

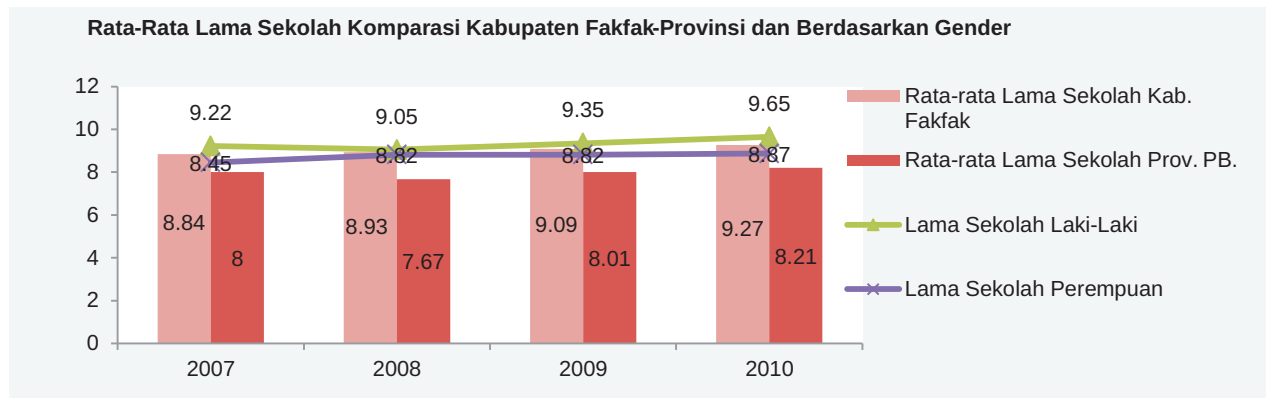
Gambar 5.6 APS kabupaten Fakfak dan Papua Barat



Sumber: Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2008 – 2011

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Fakfak meningkat pada periode 2007 – 2010 melebihi peningkatan rata-rata Provinsi Papua Barat.** Tahun 2010 RLS kabupaten menempati urutan ke dua tertinggi (9,27) setelah Kota Sorong (10,59) sementara RLS provinsi hanya sebesar 8,21. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di tingkat kabupaten telah menikmati pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun. Namun dari jumlah masyarakat yang telah menempuh pendidikan dasar, ternyata lebih didominasi oleh kelompok laki-laki dibandingkan perempuan, hal ini ditunjukkan oleh angka RLS laki-laki yang selalu lebih tinggi dari rata-rata RLS perempuan periode 2007 – 2010. RLS laki-laki tahun 2010 sebesar 9.65 tahun lebih tinggi 0.78 dibandingkan RLS perempuan 8.87. Angka ini mengindikasikan bahwa laki-laki lebih banyak yang menamatkan pendidikan dasar SD dan SMP dibandingkan perempuan atau perempuan lebih banyak putus sekolah pada pendidikan dasar SD dan SMP dibandingkan laki-laki.

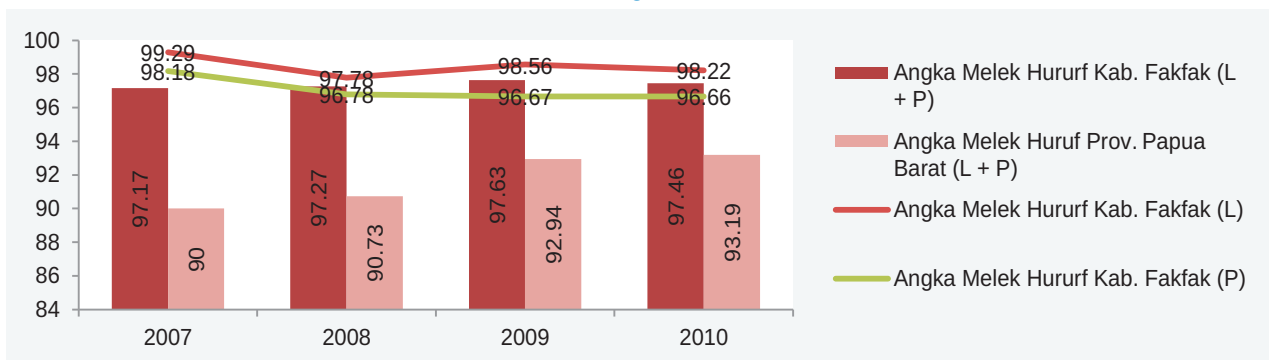
Gambar 5.7. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Fakfak dan Papua Barat.



Sumber: Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2008 - 2012

**Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Fakfak terlihat konstan berkisar pada persentase 97% dan meningkat 0,29 pada periode 2007 – 2010, namun masih lebih baik dari rata-rata AMH Provinsi Papua Barat.** Tahun 2010 AMH kabupaten menempati urutan ke dua tertinggi yaitu 97,46% setelah Kota Sorong 99,13% dan tampak lebih tinggi dari kabupaten lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa penduduk di tingkat kabupaten lebih banyak mengenyam pendidikan dibandingkan kabupaten lainnya. Namun, pada tahun 2010 penduduk laki-laki di kabupaten ini ternyata memiliki nilai AMH (98,22%) lebih tinggi dibandingkan dengan AMH perempuan (96,66%). Angka ini mengindikasikan bahwa lebih banyak perempuan yang belum pernah menikmati pendidikan formal ataupun non formal dibandingkan laki-laki atau laki-laki lebih memiliki kesempatan menikmati pendidikan dibandingkan perempuan.

Gambar 5.8 Angka Melek Huruf



Sumber: Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2008 - 2012

### 5.1.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

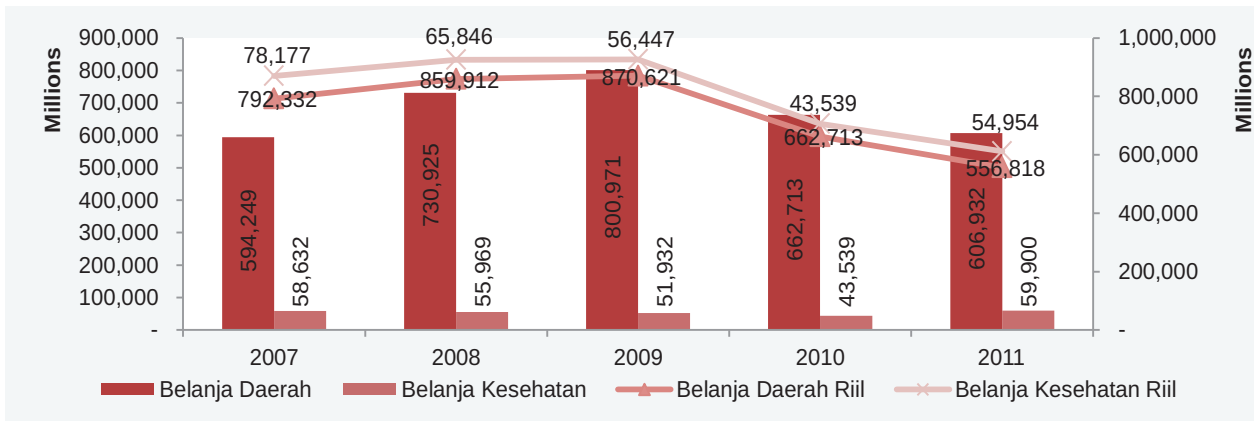
Perkembangan belanja sektor pendidikan berfluktuatif dimana terjadi kenaikan pada alokasi belanja pegawai yang diikuti dengan peningkatan jumlah guru setiap tahunnya. Alokasi belanja langsung didominasi oleh belanja barang dan jasa yang searah dengan peningkatan jumlah sekolah yang ada setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan alokasi belanja klasifikasi ekonomi dimana didominasi oleh belanja pegawai sebesar 70,2% dengan kecenderungan berfluktuasi. Kinerja pembangunan di sektor pendidikan relatif baik walaupun masih ada kekurangan antara lain; jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA yang belum proporsional dengan jumlah murid. Hasil pembangunan sector pendidikan relatif cukup memuaskan karena dari beberapa indikator seperti APS, RLS dan AMH Kabupaten Fakfak selalu berada diatas angka rata-rata provinsi Hasil ini mendukung kabupaten Fakfak memiliki IPM tertinggi ke dua di provinsi Papua Barat. Kedepan, upaya pemerintah harus dipertahankan dengan mengalokasikan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keluaran dan hasil di sektor pendidikan.

## 5.2. Sektor Kesehatan

### 5.2.1. Belanja Strategis Sektor Kesehatan

Total belanja sektor kesehatan Kabupaten Fakfak rata-rata 8% dari total belanja daerah. Secara rata-rata riil belanja sektor kesehatan adalah Rp 59.792.637.798, namun demikian pada kurun waktu 2007-2011 alokasi ini mengalami penurunan.

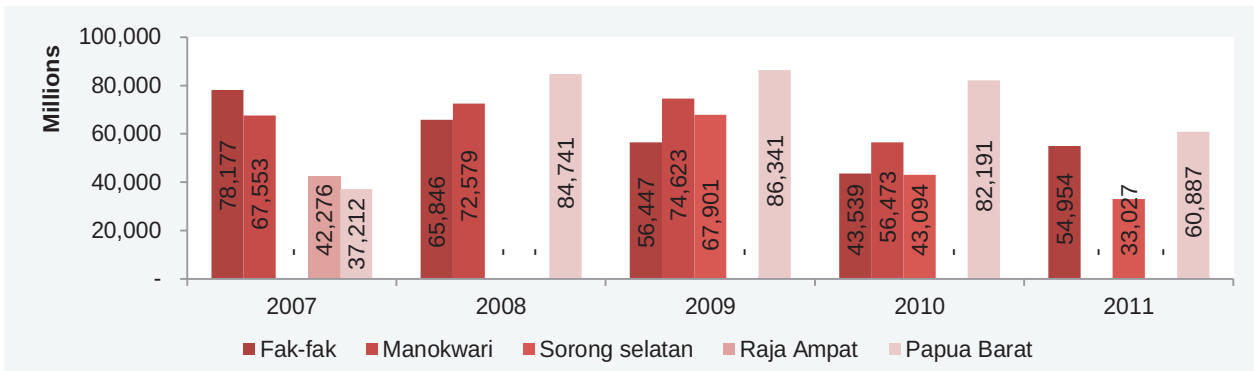
Gambar 5.9. Total Belanja Sektor Kesehatan di Kabupaten Fakfak 2007-2012



Sumber: APBD kab.Fak-fak tahun 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi, 2012 Induk.

**Belanja daerah di sektor kesehatan Kabupaten Fakfak tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya.** Secara rata-rata belanja sektor kesehatan tertinggi di kabupaten ini kurun waktu 2008-2011 lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain, walau sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 dan tahun 2010. Belanja sektor kesehatan tingkat kabupaten, tertinggi dicapai pada tahun 2011.

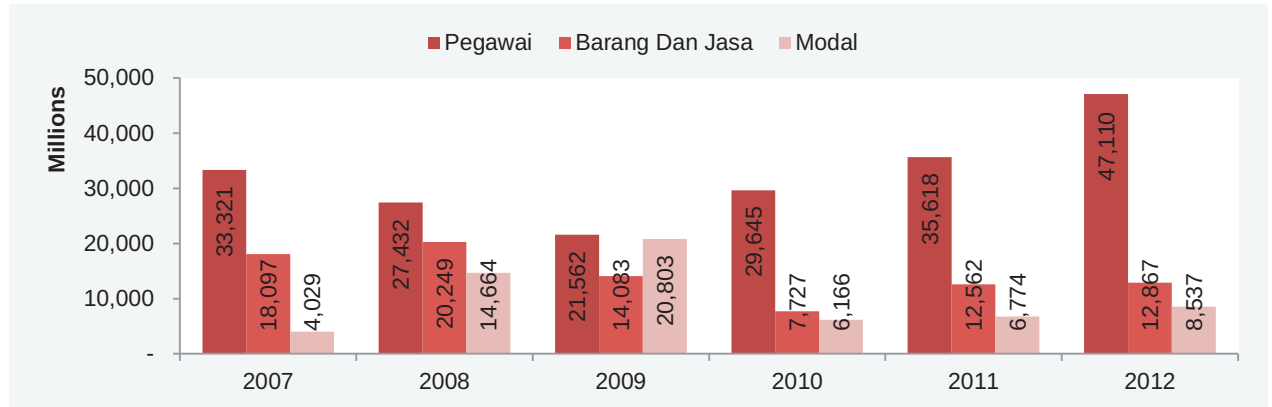
Gambar 5.10. Belanja Total Sektor Kesehatan di Kabupaten Fakfak dan Provinsi Periode 2007-2011



Sumber: APBD kab.Fak-fak tahun 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi, 2012 Induk. Data diolah.

**Belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi sektor kesehatan di Kabupaten Fakfak didominasi oleh belanja pegawai.** Secara umum belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi tingkat kabupaten didominasi oleh belanja pegawai sebesar 57,1% dari belanja total atau sebesar Rp 32.448.002.282, selanjutnya belanja modal sebesar 25,1% atau sebesar 14.264.290.464 dari belanja total dan alokasi untuk belanja barang dan jasa sebesar 17,9% atau sebesar 10.162.179.415 dari belanja total.

Gambar 5.11. Analisis Belanja Klasifikasi Ekonomi Sektor Kesehatan di Kabupaten Fakfak Periode 2007-2012.

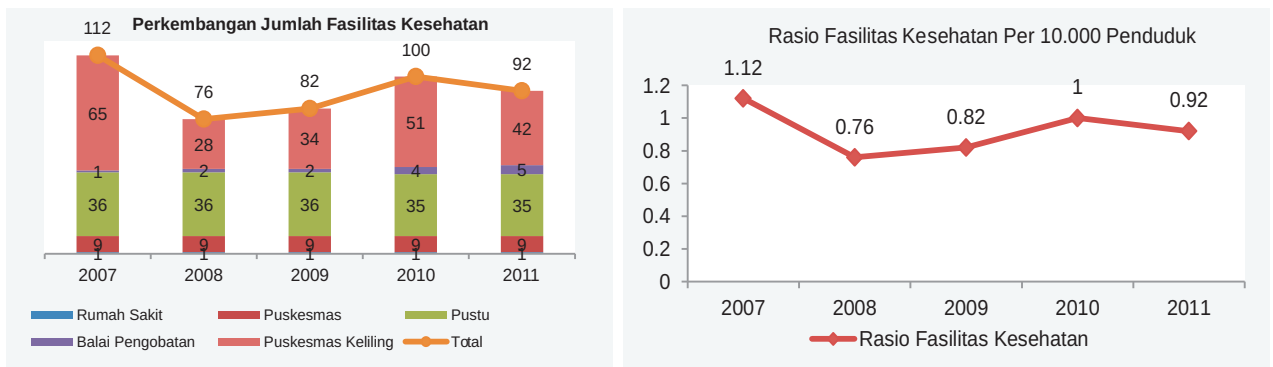


Sumber: APBD kab.Fakfak tahun 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi, 2012 Induk, data diolah.

## 5.2.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Kesehatan

**Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk di Kabupaten Fakfak bergerak fluktuatif.** Pada tahun 2007 rasio fasilitas kesehatan sebesar 1,12 menurun 0,2 menjadi 0,92 di tahun 2012. Hal ini disebabkan terjadi penurunan dalam penyediaan fasilitas kesehatan pada periode 2007-2012.

Gambar 5.12 Jumlah dan Rasio Fasilitas

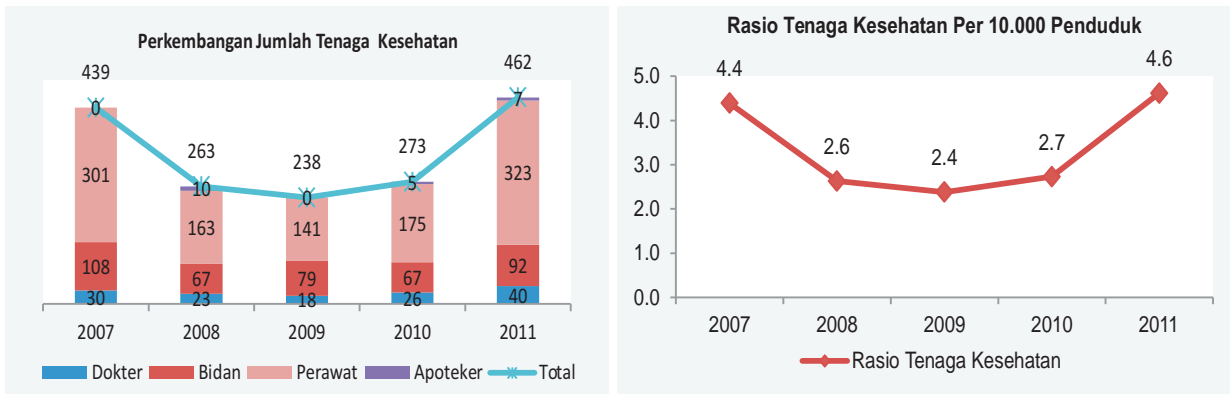


Sumber: Dinas Kesehatan, dalam Statistik Daerah Kab. Fakfak 2008 - 2012

**Rasio tenaga kesehatan per 10.000 penduduk di Kabupaten Fakfak bergerak menurun pada periode 2008–2009 namun kembali meningkat di kurun waktu 2010 – 2011.** Turun naiknya nilai rasio tersebut berhubungan dengan terjadinya pengurangan dan penambahan jumlah tenaga medis pada tahun-tahun tersebut. Rasio tenaga kesehatan per 10.000 penduduk selama periode 2007-2010 sebesar 4,4 meningkat menjadi 4,6 di tahun 2011. Angka tersebut tidak menunjukkan peningkatan yang berarti selama 5 tahun terakhir. Nilai rasio sebesar 4,6 pada tahun 2011 ini, menunjukkan setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 4–5 tenaga medis yang menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyediaan tenaga medis di tingkat kabupaten. Kurangnya tenaga medis di tingkat kabupaten pada akhirnya mempengaruhi output pelayanan kesehatan yang dicapai.



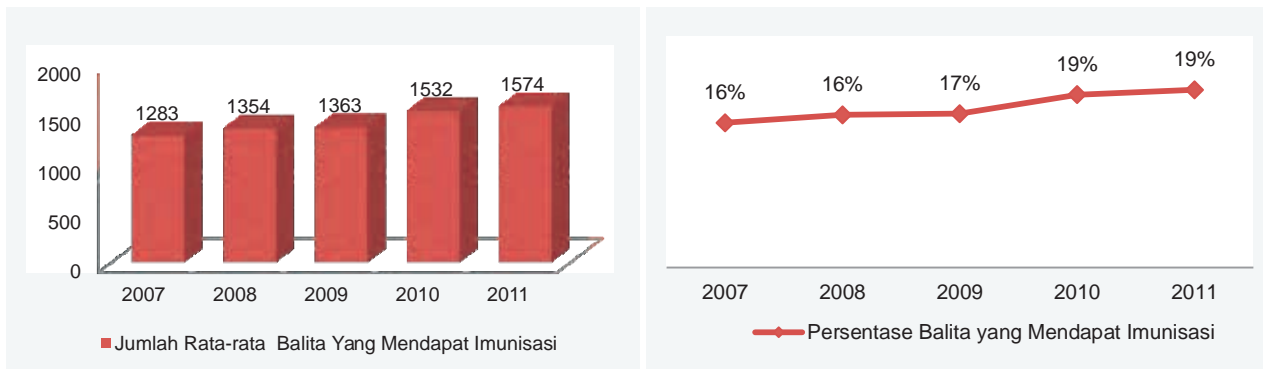
Gambar 5.13 Jumlah Tenaga Kesehatan



Sumber: Dinas Kesehatan, dlm Statistik Daerah Kab. Fakfak 2008 – 2012

Rata-rata jumlah balita yang mendapat imunisasi (BCG, DPT dan Polio) di Kabupaten Fakfak selama periode tahun 2007–2011 terus meningkat namun tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Balita yang mendapat pelayanan imunisasi hanya sebesar 16% dari total jumlah bayi di wilayah ini pada tahun 2007, yang mengalami peningkatan tidak terlalu tinggi sebesar 3% menjadi 19% di tahun 2011.

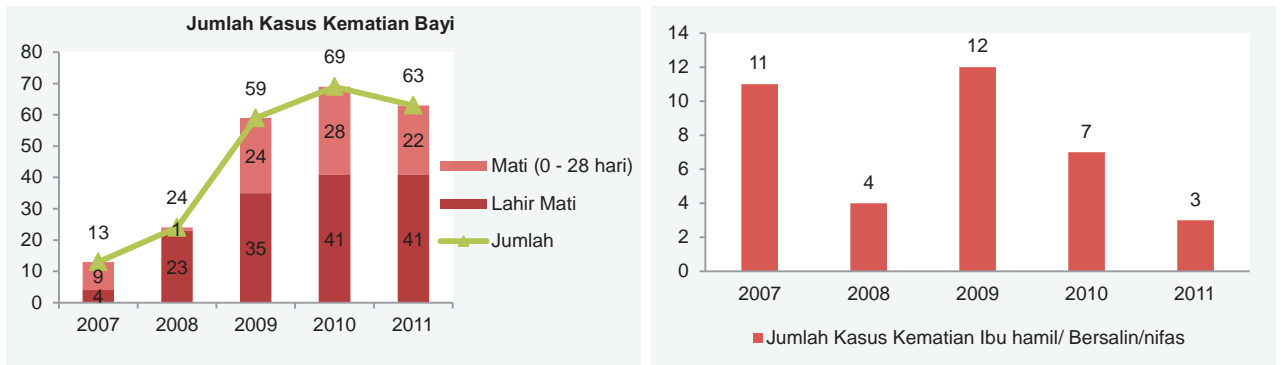
Gambar 5.14. Rata-rata Jumlah Balita dan Perkembangan Porsi Balita yang Diimunisasi



Sumber, Dinas Kesehatan, dlm Statistik Daerah Kab. Fakfak 2008 – 2012. Data diolah

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan selama periode 2007–2011 bergerak secara fluktuatif. Tahun 2011, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 1495 kelahiran dibandingkan dengan dukun yang hanya menangani 145 kelahiran. Tingginya pertolongan persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan dapat memberi peluang bagi menurunnya tingkat kematian ibu bersalin atau nifas. Hal ini sesuai dengan data kematian ibu hamil/bersalin dan nifas yang cenderung menurun di tahun 2012 menjadi 3 kasus. Namun demikian, jumlah kasus kematian bayi selama periode 2007-2011 tampak meningkat dari 13 kasus menjadi 69 kasus ditahun 2010 dan 63 kasus ditahun 2011. Hal ini disebabkan jumlah fasilitas dan tenaga medis yang berkurang pada tahun tersebut sehingga mempengaruhi kecilnya akses terhadap pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan, selain itu juga dipengaruhi oleh adanya perbaikan dalam sistem pencatatan kelahiran dan kematian ibu dan bayi, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat.

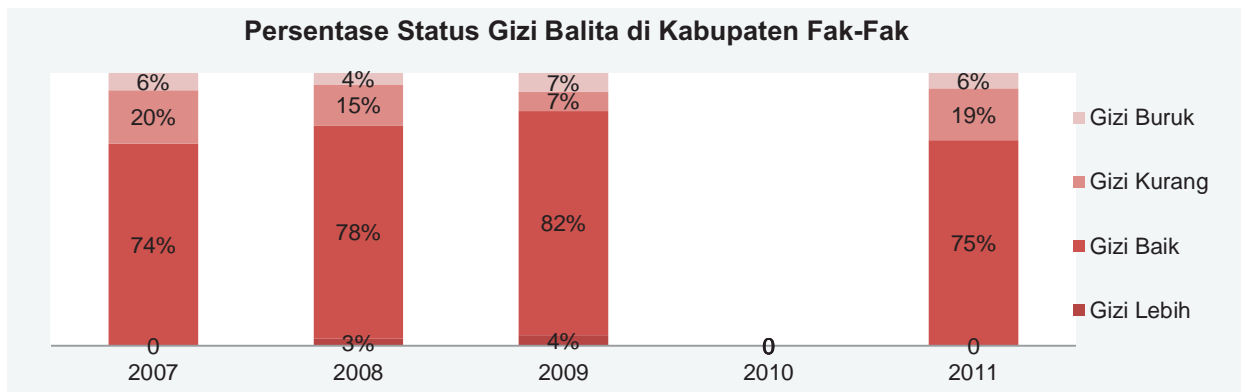
Gambar 5.15. Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Kematian Ibu Hamil Bersalin



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Fakfak

Status gizi balita di Kabupaten Fakfak umumnya berada pada kategori gizi baik, walaupun perkembangan status gizi kurang dan buruk mengalami pergerakan yang fluktuatif. Periode 2007-2009 terjadi penurunan angka status gizi balita dari 26% menjadi 14%, namun ditahun 2011 terjadi peningkatan menjadi 25%. Peningkatan kasus gizi buruk ini, disebabkan oleh pola asuh anak, pola usapan gizi bayi yang cenderung dipengaruhi oleh tinggi rendahnya perekonomian rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga.

Gambar 5.16. Presentase Status Gizi Balita



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Fakfak.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Fakfak meningkat lebih cepat dibanding angka provinsi. Namun demikian, angka ini masih lebih rendah dari Kota Sorong. Selama periode 2008–2010 AHH kabupaten menempati urutan ke dua tertinggi (70,52 tahun) dibandingkan kabupaten lainnya setelah Kota Sorong (71,95) dan lebih tinggi dari rata-rata provinsi sebesar 68,51 tahun. Meningkatnya angka ini, cenderung memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Fakfak kedepan, baik secara absolut maupun relatif.

Tabel 5.1. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 – 2010

Kabupaten/ Kota	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Fakfak</b>	69.81	70.16	70.52
Kaimana	69.26	69.48	69.65
Teluk Wondama	67	67.25	67.51
Teluk Bintuni	67.55	67.88	68.21
Manokwari	67.38	67.67	68
Sorong Selatan	66.33	66.49	66.66
Sorong	67.12	67.49	67.85
Raja Ampat	65.43	65.75	66.17
Kota Sorong	71.12	71.53	71.95
Tambrau	-	66.09	66.15
Maybrat	-	66.03	66.33
<b>Papua Barat</b>	67.9	68.2	68.51

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2010.

### 5.2.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

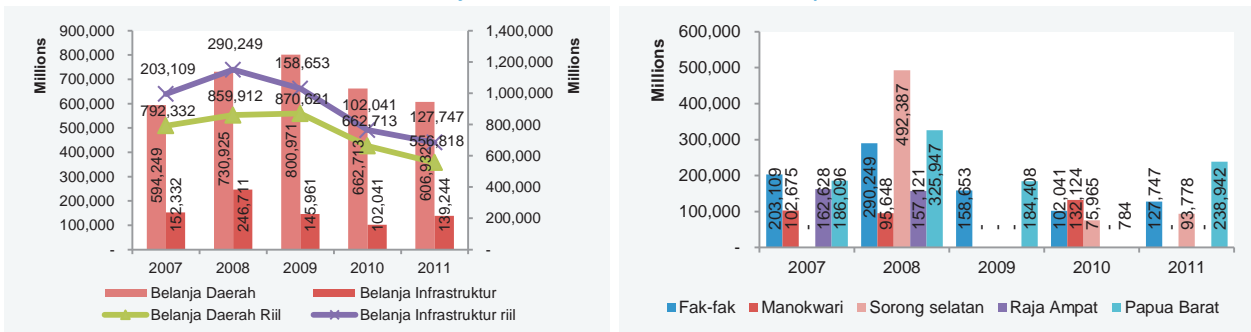
Rasio fasilitas dan tenaga kesehatan per 10.000 penduduk di Kabupaten Fakfak mengalami kekurangan tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan. Hal ini sangat mempengaruhi output atau hasil pelayanan kesehatan yang dapat dilihat dari meningkatnya kasus kematian bayi setiap tahun, masih terdapat pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun, hanya 19% balita yang mendapat imunisasi, status gizi kurang dan buruk pada balita yang meningkat di tahun 2011. Hal ini berbanding terbalik dengan alokasi belanja pegawai yang rata-rata sebesar 57% dari total alokasi belanja sektor kesehatan. Tampaknya, pengelolaan dan perekrutan pegawai sektor kesehatan yang dilakukan oleh dinas terkait masih kurang tepat, untuk itu kedepan, alokasi jumlah sumberdaya manusia sektor kesehatan harus ditentukan formasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan setiap unit kesehatan dengan memperhitungkan beban setiap tenaga.

## 5.3. Sektor Infrastruktur

### 5.3.1. Belanja Sektor Infrastruktur

Belanja infrastruktur cenderung mengalami penurunan walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2008. Kecenderungan penurunan alokasi belanja infrastruktur seiring dengan penurunan belanja daerah, dimana rata-rata alokasi belanja infrastruktur sebesar 23,19% diperuntukkan untuk menunjang ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung dan lain-lain. Belanja sektor infrastruktur kabupaten tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

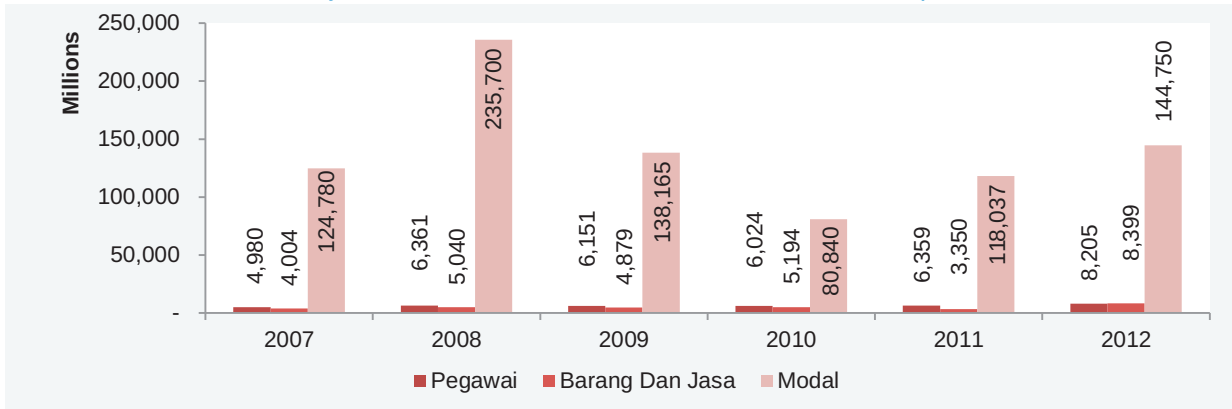
Gambar 5.17 Total Belanja Sektor Infrastruktur di Kabupaten Fakfak 2007-2011



Sumber : APBD kab.Fakfak tahun 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi, 2012 Induk.

Alokasi belanja modal mendominasi belanja daerah sektor infrastruktur secara berfluktuasi. Alokasi belanja modal rata-rata sebesar 92,4% atau sebesar 140.378.698.084, belanja pegawai sebesar 4,2% atau sebesar 6.346.800.273 dan belanja barang dan jasa sebesar 3,4% atau sebesar 5.144.202.148.

Gambar 5.18. Analisis Belanja Klasifikasi Ekonomi Sektor Infrastruktur di Kabupaten Fakfak Th. 2007-2011.

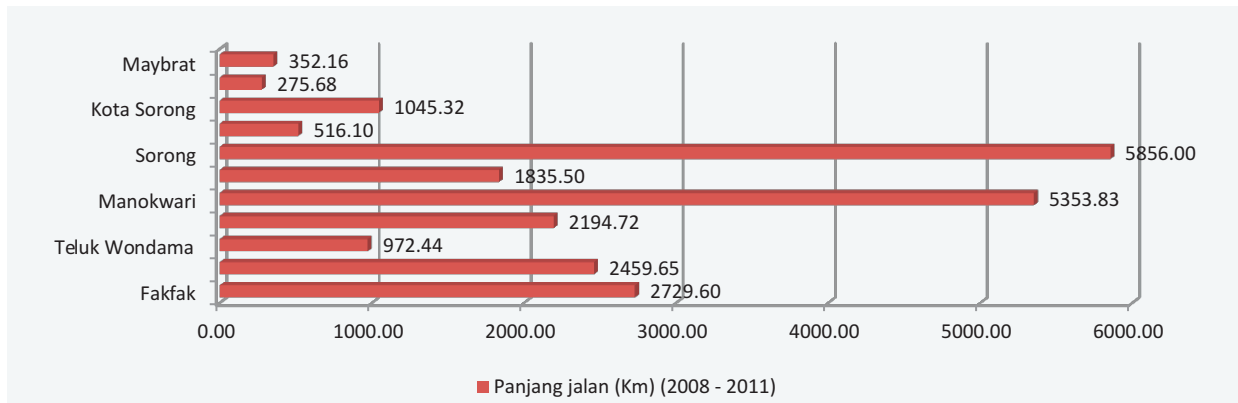


Sumber : APBD kab.Fak-fak tahun 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi, 2012 Induk.

### 5.3.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Infrastruktur

Transportasi darat, ketersediaan prasarana jalan mengalami peningkatan secara konsisten. Panjang jalan Kabupaten Fakfak terpanjang ke-tiga setelah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari, walaupun sebagian besar terdiri dari jalan kabupaten/kota dibandingkan dengan panjang jalan provinsi dan jalan negara. Periode 2007-2010, panjang jalan kabupaten/kota meningkat per tahun, sementara panjang jalan provinsi dan jalan negara tidak mengalami peningkatan berarti. Peningkatan ketersediaan prasarana jalan ini sangat menunjang mobilitas penduduk yang semakin meningkat serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

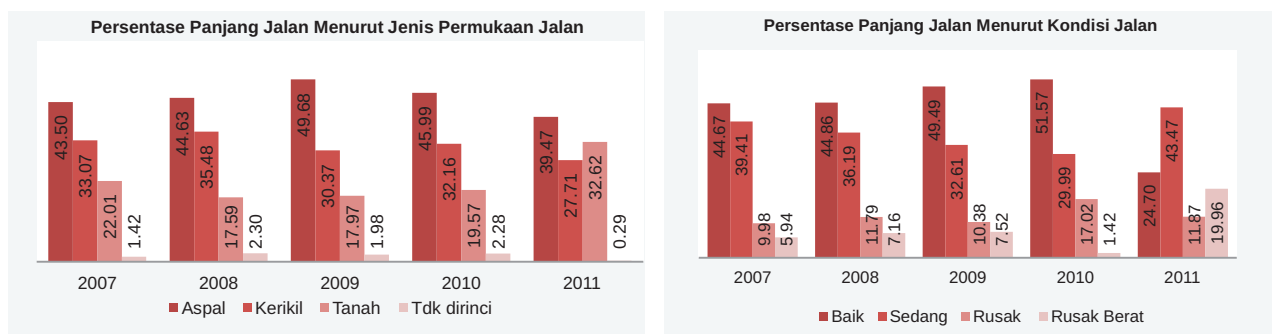
Gambar 5.19 Panjang Jalan



Sumber : Fakfak dalam angka, diolah.

Kualias dan kondisi jalan di Kabupaten Fakfak sebagian besar telah teraspal dengan panjang jalan aspal yang meningkat pada periode 2007–2009 dan menurun hingga tahun 2011. Penurunan ini diikuti dengan meningkatnya jalan dengan kondisi tanah dan kerikil serta disebabkan rusaknya jalan aspal sehingga pada tahun 2011, sebanyak 43,47% jalan dengan kualitas sedang, hanya 24,70% kualitas baik, sedangkan 31,83% jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kondisi jalan tentu saja akan mempengaruhi akses masyarakat terhadap peningkatan jumlah transportasi darat untuk masuk dan keluar wilayah.

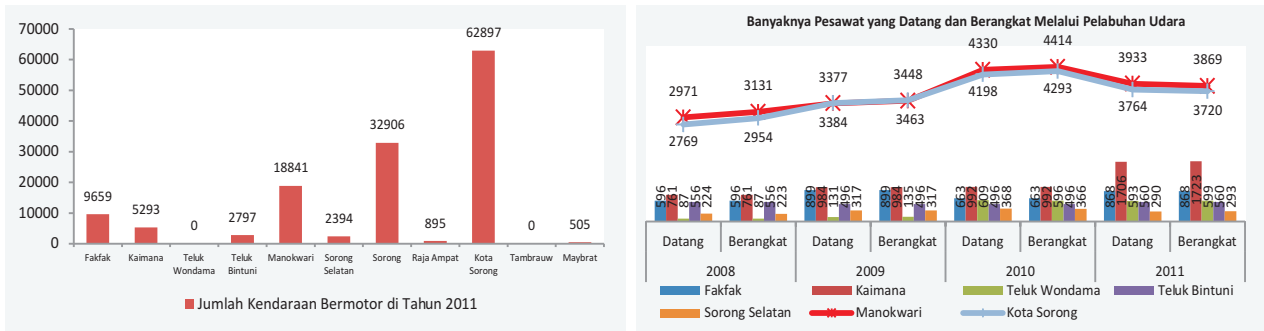
Gambar 5.20 Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan



Sumber : Fakfak dalam angka, BPS.

Kabupaten Fakfak memiliki jumlah kendaraan terbanyak ke empat di provinsi Papua Barat setelah Kota Sorong. Kabupaten Fakfak menempati urutan ke empat teramai berdasarkan banyaknya penerbangan udara yang membawa penumpang datang dan pergi setelah Kabupaten Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Kaimana. Tingkat keramaian arus transportasi darat, udara dan laut menunjukkan perkembangan suatu kota atau kabupaten.

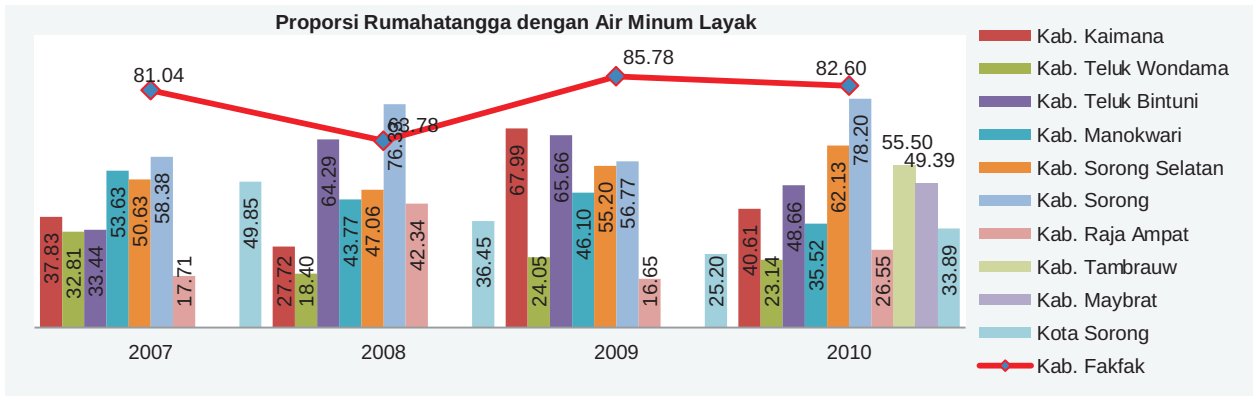
Gambar 5.21 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Transportasi



Sumber : Fakfak dalam angka, BPS.

**Akses rumahtangga terhadap air bersih di Kabupaten Fakfak bergerak fluktuatif selama periode 2007 – 2010.** Namun masih memiliki persentase tertinggi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2007 dan 2009 -2010. Walaupun kondisi geografis Kabupaten fakfak yang berbukit-bukit namun lebih dari 80% rumahtangga dapat mengakses air bersih. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan saluran air bersih yang membaik.

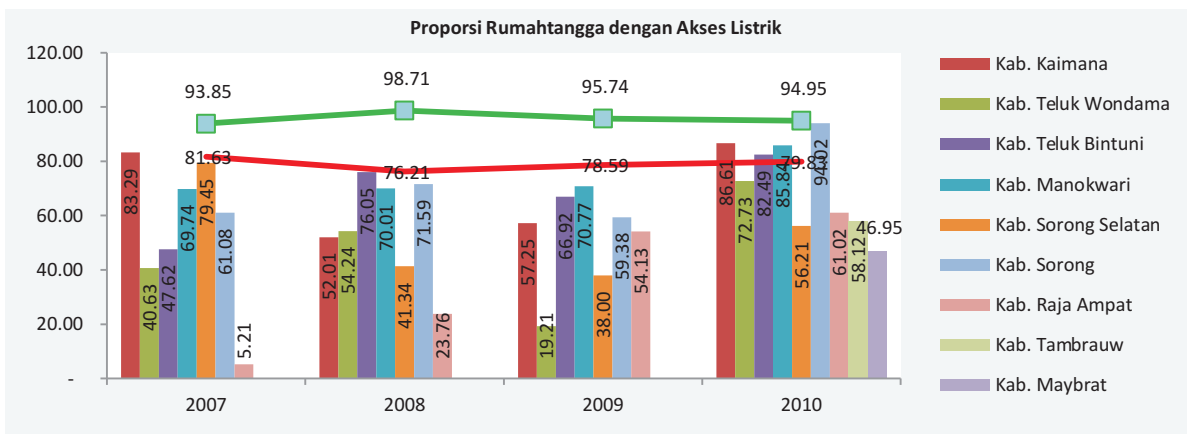
Gambar 5.22. Proporsi Rumahtangga dengan Air Minum layak



Sumber : Fakfak dalam angka (2008-2011), BPS.

**Proporsi rumahtangga dalam mengakses listrik selama periode 2007–2010 mengalami penurunan dari 81,63% menjadi 79,83%.** Proporsi rumahtangga di Kabupaten Fakfak yang mengakses listrik di tahun 2007 menempati urutan tiga terbesar di Provinsi Papua Barat dan tahun 2008-2009 menempati urutan ke dua setelah Kota Sorong, namun pada tahun 2010, menurun menempati urutan ke enam. Penurunan jumlah rumahtangga dalam mengakses listrik mengindikasikan bertambahnya rumahtangga miskin sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan penerangan.

Gambar 5.23. Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Listrik



Sumber : Fakfak dalam angka 2007-2010, BPS.

### 5.3.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

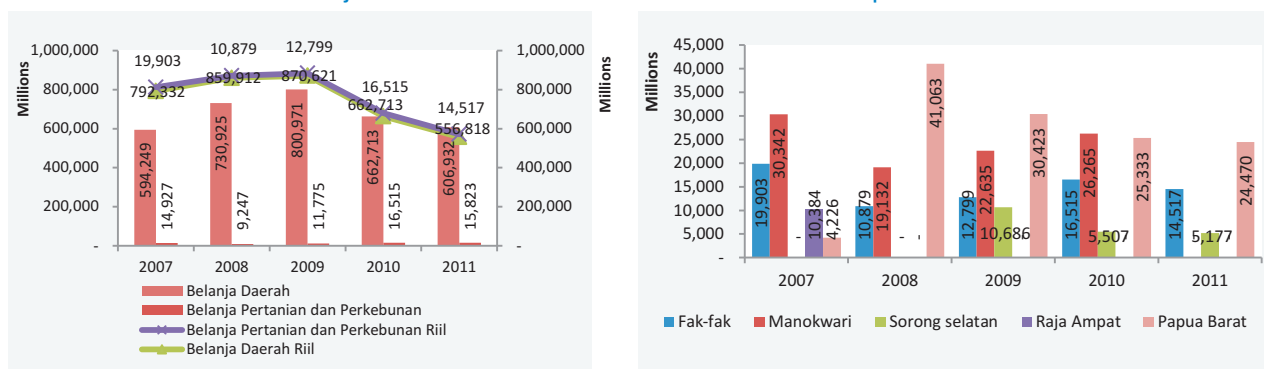
Alokasi belanja sektor infrastruktur Kabupaten Fakfak didominasi oleh belanja modal sebesar 92,4% dari total belanja sektor dengan kecenderungan terus meningkat dari tahun 2007-2011. Hal ini sejalan dengan perkembangan infrastruktur jalan setiap tahun yang juga terus meningkat, di kabupaten ini memiliki jalan terpanjang ke tiga di Provinsi Papua Barat. Sebagian besar jalan tersebut merupakan jalan kabupaten/kota namun dengan kualitas yang mengalami penurunan di tahun 2011. Kabupaten Fakfak memiliki sarana transportasi terbesar ke-empat di Provinsi Papua Barat setelah Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Manokwari, demikian pula dengan transportasi udara. Tingkat keramaian arus transportasi darat, udara dan laut menunjukkan perkembangan suatu kota atau kabupaten. Sementara itu, hasil dari pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa akses rumahtangga terhadap air bersih bergerak fluktuatif selama periode 2007-2010, namun masih memiliki persentase tertinggi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2007 dan 2009-2010. Walaupun kondisi geografis Kabupaten Fakfak berbukit-bukit, namun lebih dari 80% rumahtangga dapat mengakses air bersih. Sementara itu, proporsi rumahtangga yang dapat mengakses listrik selama periode 2007–2010 terlihat menurun hingga 1,8% dari 81,63% menjadi 79,83%. Penurunan jumlah rumahtangga dalam mengakses listrik mengindikasikan bertambahnya rumahtangga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan penerangan dan secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan di kabupaten ini hanya pada pelayanan fisik (jalan) saja. Kedepan, pemerintah daerah perlu meninjau ulang fasilitas yang telah dibangun dalam bentuk perawatannya, dimana telah banyak jalan yang rusak. serta secara perlahan, harus beralih kepada pembangunan fisik lainnya seperti infrastruktur yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat misalnya fasilitas penerangan, air bersih dan jaringan komunikasi.

## 5.4. Sektor Pertanian dan Perkebunan

### 5.4.1. Belanja Total Sektor Pertanian dan Perkebunan

Alokasi belanja sektor pertanian dan perkebunan rata-rata dibawah 2% dari total belanja daerah. Besarnya alokasi belanja sektor pertanian dan perkebunan dari total belanja daerah pada tahun 2007 sebesar 2,51%, pada tahun 2008 sebesar 1,27%, pada tahun 2009 sebesar 1,47%, 2010 sebesar 2,49% dan pada 2011 sebesar 2,61%. Belanja sektor pertanian dan perkebunan berada di urutan ke-dua dari 4 kabupaten yang diamati. Rata-rata belanja pertanian dan perkebunan sebesar 14.922.415.016 periode 2007-2011.

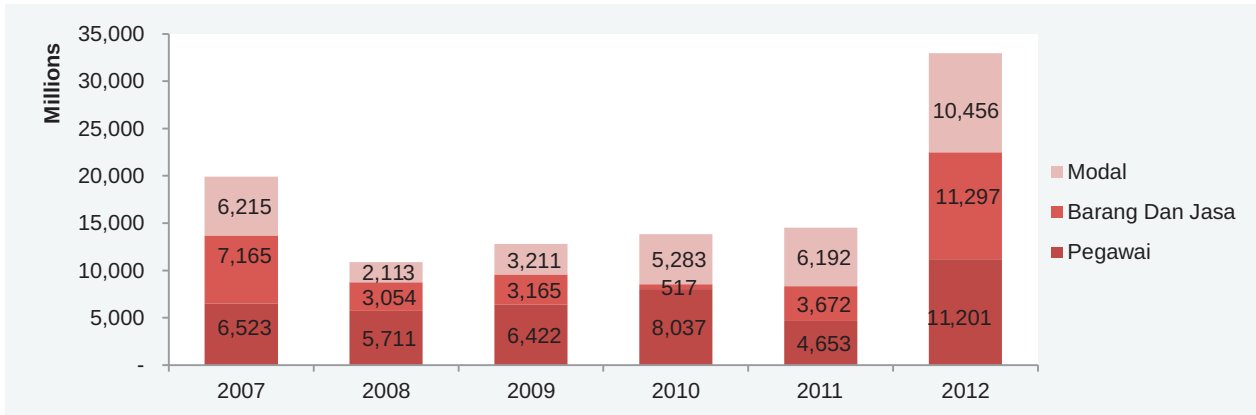
Gambar 5.24. Total Belanja Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Fakfak Tahun 2007-2011



Sumber : APBD Kab.Fakfak tahun 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi, 2012 Induk.

**Belanja sektor pertanian dan perkebunan berdasarkan klasifikasi ekonomi didominasi oleh belanja pegawai.** Rata-rata alokasi belanja pegawai sebesar 40,61% dari total belanja sektor, belanja modal sebesar 27,5% dari total belanja sektor dan belanja barang jasa sebesar 31,9% dari total belanja sektor.

Gambar 5.25 Belanja Klasifikasi Ekonomi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kab. Fakfak, Th. 2007-2011

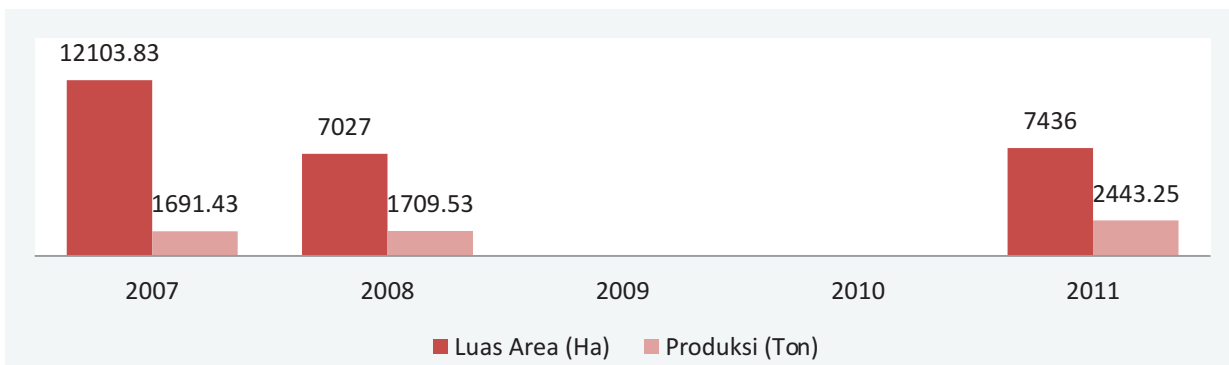


Sumber : APBD Kab.Fakfak tahun 2007 Perubahan, 2008-2011 Realisasi, 2012 Induk.

### 5.4.2. Kinerja Keluaran dan Hasil Sektor Pertanian dan Perkebunan

**Luas areal tanaman perkebunan selama periode 2007–2011 mengalami penurunan.** Walaupun sektor perkebunan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Fakfak, luas areal tanaman perkebunan ternyata setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peralihan fungsi lahan perkebunan ke sektor lainnya dengan fungsi bukan lagi untuk kegiatan produksi perkebunan. Meskipun luas lahan menurun, produksi perkebunan selama periode tahun 2007–2011 tetap meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat lahan-lahan pertanian yang mulai diintensifkan penggelolaannya guna meningkatkan produksi yang tentu saja memerlukan biaya produksi yang relatif besar.

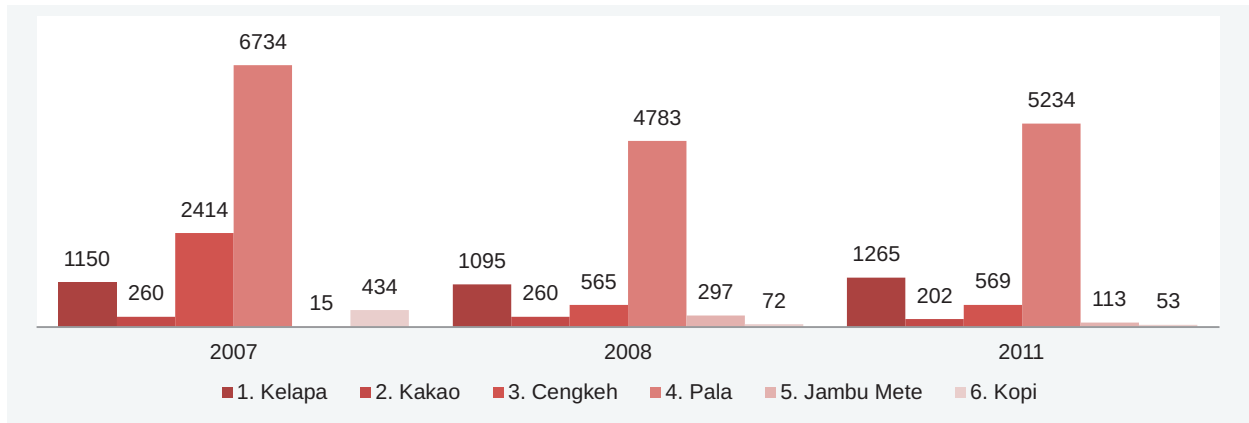
Gambar 5.26 Luas Areal dan Produksi Sektor Perkebunan



Sumber : DDA, BPS Kabupaten Fakfak.

**Luas areal komoditi perkebunan pala lebih besar dibandingkan komoditi lainnya dan diikuti oleh perkebunan cengkeh, kelapa, kakao, jambu mete dan kopi.** Namun demikian, luas areal perkebunan pala selama periode 2007–2011 mengalami penurunan menjadi 6734 hektar di tahun 2007 menjadi 5234 hektar di tahun 2011. Komoditi pala merupakan komoditi unggulan pertanian kabupaten yang seharusnya lebih diprioritaskan melalui peningkatan luas lahan produksi. Berkurangnya luas lahan, mengindikasikan bahwa telah terjadi pengalihan fungsi lahan, berkurangnya petani pala dan kurang adanya keberpihakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dengan cara ekstensifikasi pertanian.

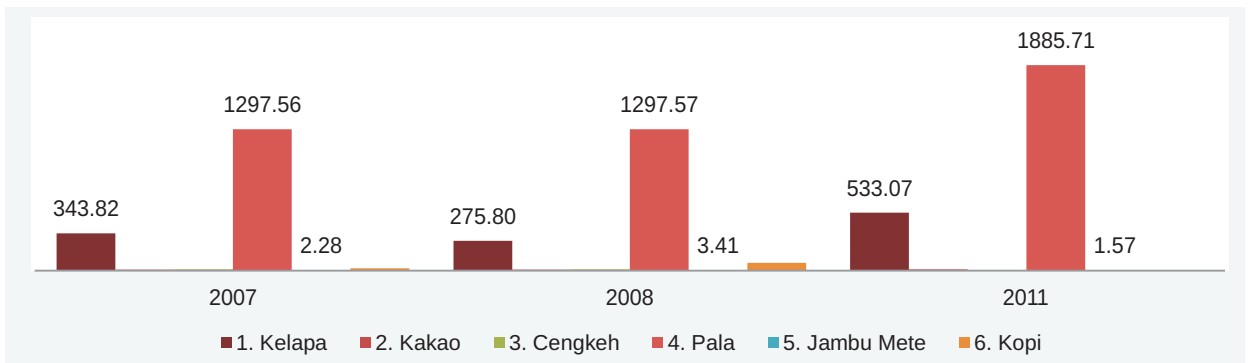
Gambar 5.27 Luas Area (Ha) Perkebunan Menurut Komoditi



Sumber : Fakfak dalam angka, BPS.

**Tanaman pala merupakan tanaman perkebunan yang memiliki produksi terbesar.** Tingginya produksi pala dipengaruhi oleh peruntukan luas lahan yang digunakan untuk perkebunan pala. Produksi pala selama periode 2007 meningkat dari 1297,56 ton di tahun 2007 ton menjadi 1885,71 ton di tahun 2011. Peningkatan produksi pala ini berbanding terbalik dengan luas areal perkebunan pala atau dengan kata lain produksi tanaman pala meningkat namun luas areal tanam menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa melalui program pemerintah, para petani pala di kabupaten ini melakukan intensifikasi pertanian dengan tidak menambah luas lahan, namun lebih menitik beratkan peningkatan produksi dengan cara perbaikan teknik budidaya, bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yang mendukung.

Gambar 5.28 Total Produksi (Ton) Perkebunan Per Komoditi



Sumber : Fakfak dalam angka, BPS.

### 5.4.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

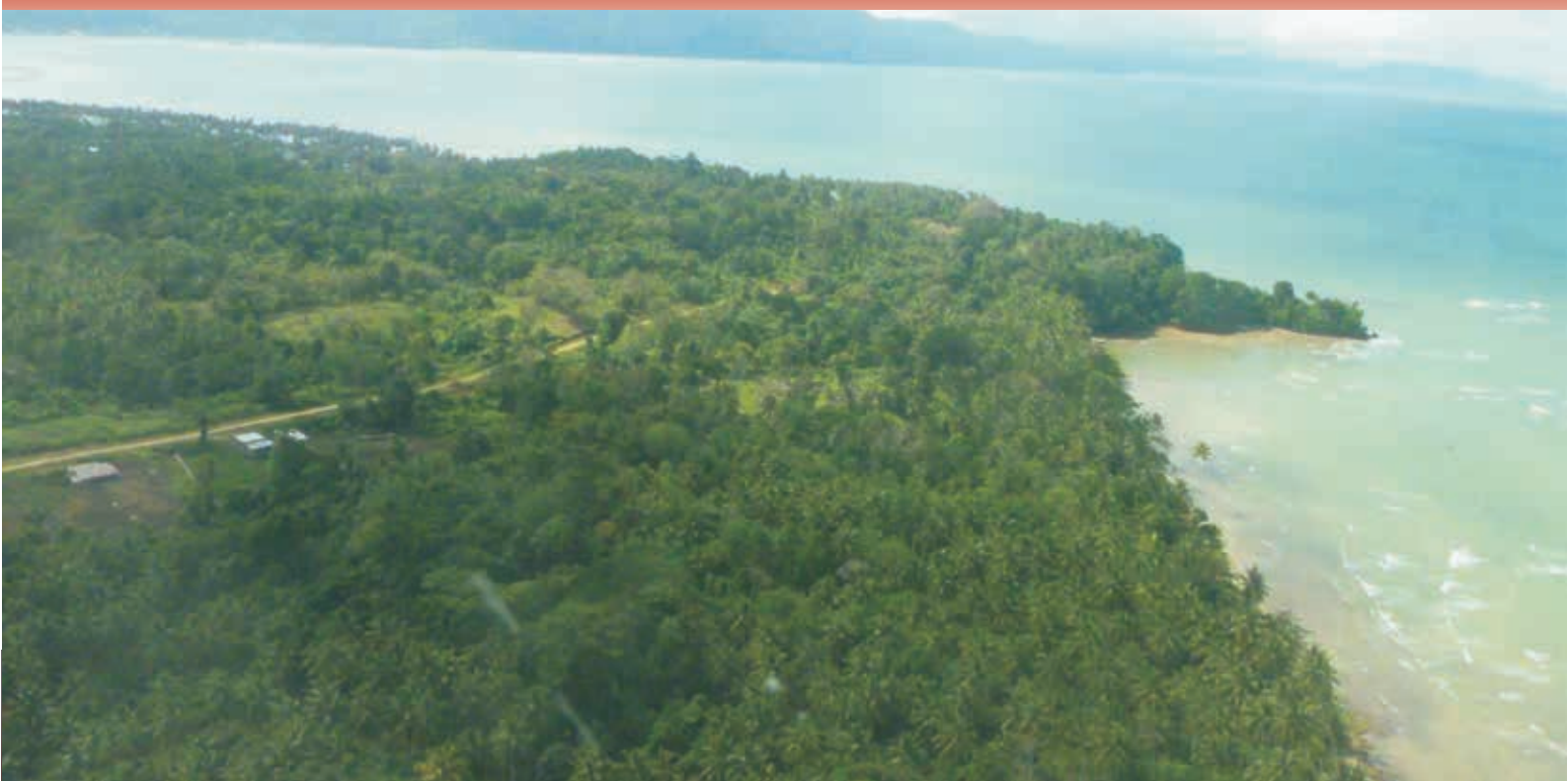
Sektor perkebunan sebagai sektor unggulan Kabupaten Fakfak ternyata belum didukung oleh ketersediaan areal tanam oleh karena luas areal untuk komoditi ini justru mengalami penurunan di setiap tahun. Namun demikian, ternyata produksi pala setiap tahun justru menunjukkan keadaan sebaliknya karena mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan produksi yang terjadi lebih disebabkan oleh karena kebijakan intensifikasi yang dilakukan oleh dinas terkait antara lain dengan adanya perbaikan teknik budidaya, bantuan bibit dan sarana produksi yang mendukung. Belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi di sektor ini menunjukkan adanya peningkatan belanja pegawai sebesar 40% dari total belanja sektor pertanian dan perkebunan dan cukup mendominasi, sementara untuk belanja program, hanya 2% yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah. Di masa mendatang, pemerintah diharapkan bisa menaikkan jumlah alokasi anggaran sektor pertanian dan perkebunan, agar bisa meningkatkan jumlah produksi dan juga dengan menetapkan kebijakan penambahan luas lahan perkebunan, khususnya untuk komoditi pala.





# 6

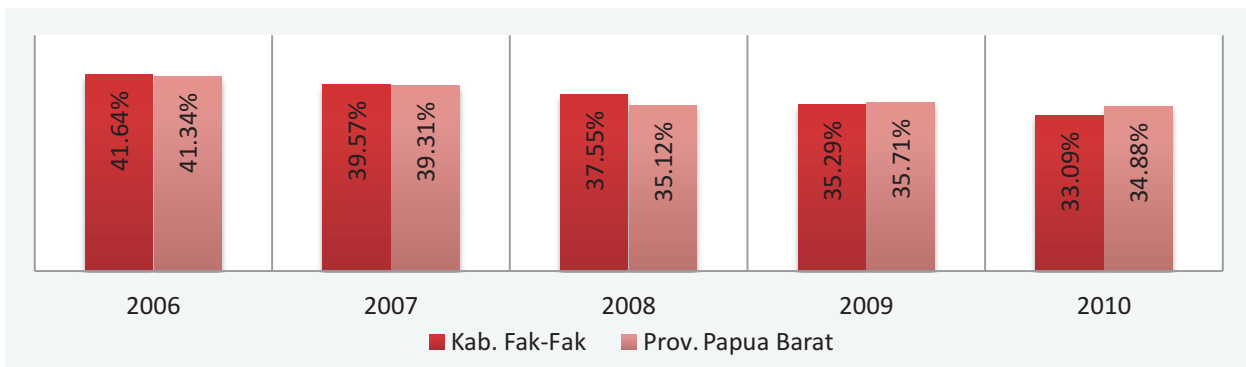
## Analisis Isu-isu Strategis



## 6.1. Analisis Kemiskinan Daerah

Meskipun berhasil menurun tajam, persentase penduduk miskin Kabupaten Fakfak masih sangat tinggi selama periode 2006-2010. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Fakfak mengalami penurunan dari 41,64 persen pada tahun 2006 menjadi hanya 33,09 persen pada tahun 2010. Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Fakfak, lebih akseleratif dibandingkan capaian penurunan Provinsi Papua Barat yang menurun dari 41,34 persen pada tahun 2006 menjadi hanya 34,88 persen pada tahun 2010. Meskipun menurun signifikan, persentase penduduk miskin, baik Kabupaten Fakfak maupun Provinsi Papua Barat masih tergolong tinggi, karena masih jauh lebih tinggi dari angka nasional yang dalam periode yang sama berada pada kisaran 11 persen. Hal ini mengindikasikan ketertinggalan pembangunan daerah secara nasional, sehingga perlu memacu pembangunan daerah Kabupaten Fakfak pada sektor-sektor strategis yang memiliki daya dorong kuat dalam mereduksi kemiskinan di daerah ini. Ke depan, penting untuk melakukan pemetaan penduduk miskin berbasis masyarakat, agar intervensi program pembangunan daerah tepat sasaran, bukan hanya pada wilayah yang tepat tetapi pada individu, rumah tangga, komunitas dan penduduk yang tepat.

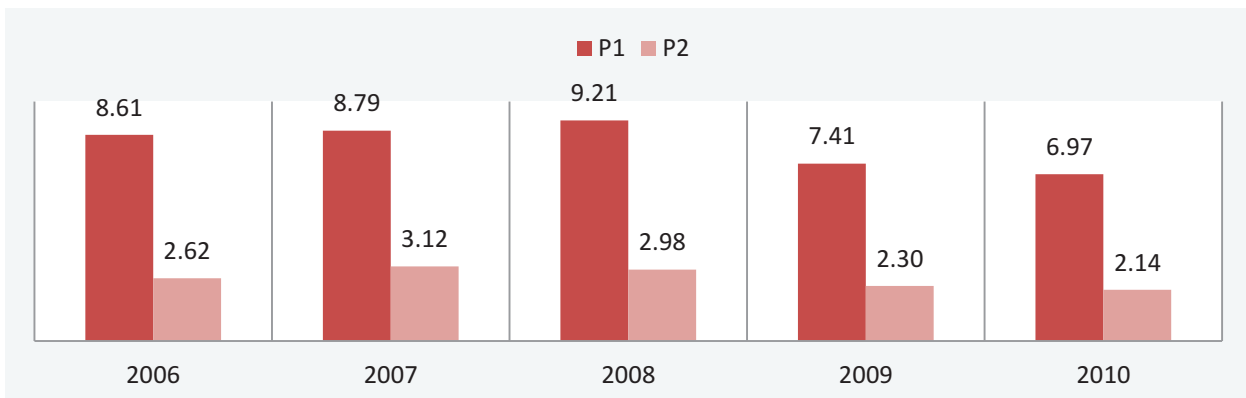
Gambar 6.1 Komparasi Persentasi Penduduk Miskin Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat, 2006-2010



Sumber: BPS Kabupaten Fakfak, Kabupaten Fakfak Dalam Angka, 2008-2012

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index- P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 6.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Fakfak, Tahun 2006-2010



Sumber : BPS Kabupaten Fakfak, Kabupaten Fakfak Dalam Angka, Tahun 2008-2012.

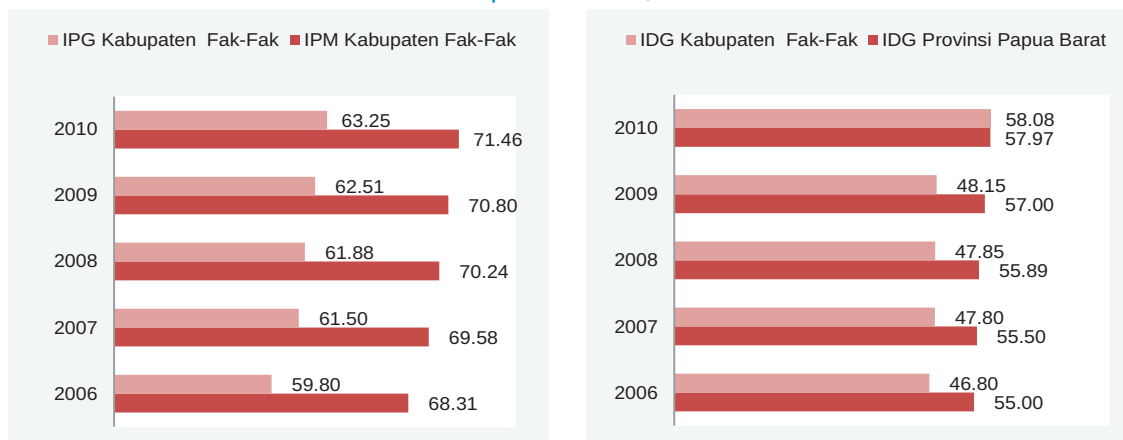
**Ketimpangan kemiskinan daerah Kabupaten Fakfak, secara menyeluruh menunjukkan perbaikan berarti selama periode 2006-2010.** Hal ini ditunjukkan pada terjadinya penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) secara umum di Kabupaten Fakfak selama periode 2006-2010, meskipun intensitas yang berbeda setiap tahunnya. Selama periode 2006-2008 P1 meningkat 8,61 persen menjadi 9,2 persen, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan, sehingga mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang semakin melebar dan menjauhi garis kesempurnaan. Hal yang sama P2 meningkat 2,62 persen menjadi 3,12 persen, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar atau tidak menunjukkan perbaikan. Hal ini menunjukkan kondisi kemiskinan penduduk miskin yang menurun, Namun keadaan itu berubah pada periode berikutnya, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Fakfak menunjukkan penurunan secara konsisten selama periode 2009-2010 untuk P1 dan periode 2008-2010 untuk P2. P1 menurun dari 9,21 persen menjadi 6,97 persen, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. P2 menurun 3,13 persen menjadi 2,14 persen, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit atau membaik. Membaiknya P1 dan P2 disebabkan oleh semakin membaiknya kinerja ekonomi makro daerah dan semakin intensifnya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

**Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Fakfak masih bertumpu pada program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah secara Nasional, terutama melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).** Program-program pengentasan kemiskinan yang dikreasikan secara lokal oleh pemerintah daerah, tampaknya masih sangat terbatas. Jika diamati, program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui dua skema utama, yaitu *pertama*, menurunkan atau memperkecil beban pengeluaran penduduk miskin. Skema ini muncul dalam bentuk pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis, raskin, BLT), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya). *Kedua*, meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin. Skema ini muncul terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur perdesaan (misalnya pasar, jalan desa, penyediaan transportasi, dsb), penyediaan skim bantuan modal usaha, dan lain sebagainya.

## 6.2. Analisis Isu Gender

**IPM Kabupaten Fakfak menunjukkan perbaikan, namun masih terjadi kesenjangan gender selama periode 2006-2010.** Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih di bawah rata-rata IPM Kabupaten Fakfak. Pada tahun 2010, IPG mencapai 63,25 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sementara IPM mencapai 71,46 point. Meskipun IPG berada di bawah rata-rata IPM, namun perkembangan setiap tahun meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2006, IPG berkisar pada poin 59,80 meningkat cukup signifikan menjadi 63,25 pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 3,45 poin. Hal ini menunjukkan kesenjangan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan dan pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Namun untuk melihat indikator mana yang paling berkontribusi terhadap meningkatnya IPG, tidak dapat ditunjukkan oleh instansi terkait atau BPS kabupaten Fakfak, karena belum tersedianya data terpilah dari indikator IPM. Untuk mendorong capaian IPG yang lebih tinggi maka perlu upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui program pengarusutamaan gender segala bidang yang didasari oleh kesediaan data terpilah pada setiap sektor khususnya pada indikator IPM.

Gambar 6.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender serta IPM di Kabupaten Fakfak, Tahun 2006-2010



Sumber: BPS Kabupaten Fakfak, Fakfak Dalam Angka, Tahun 2007-2012.

**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Fakfak terus mencapai peningkatan signifikan selama tahun 2006-2010.** Pada tahun 2010, IDG kabupaten Fakfak mencapai 58,08 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya bahkan lebih dari IDG Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2006, IDG berkisar pada poin 46,80 atau mengalami peningkatan sangat signifikan pada tahun 2010 sebesar 11,28 poin. Hal ini menunjukkan perempuan semakin mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya. Pada tahun 2010, jumlah perempuan menjadi anggota DPR berjumlah 2 dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak ada. Sedangkan partisipasi perempuan dalam bidang eksekutif dalam memegang jabatan eselon terus meningkat, menjadi 26,77 persen. Kenyataan ini menunjukkan adanya dukungan daerah dalam mewujudkan upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender

**Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Fakfak didominasi oleh kasus KDRT pada tahun 2010.** Sebanyak 18 kasus dari 28 kasus atau 64,3 persen kasus kekerasan terhadap perempuan yang terungkap adalah kasus KDRT. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam beberapa bentuk, KDRT ditemukan sebanyak 18 kasus, kasus pemerkosaan sebanyak 2 kasus, perzinahan sebanyak 4 kasus dan penganiayaan sebanyak 4 kasus. Tiga faktor utama kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Kabupaten Fakfak. *Pertama*, budaya patriarkis yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk yang dianggap superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. *Kedua*, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. *Ketiga*, peniruan anak laki-laki yang hidup dalam rumah tangga di mana kekerasan sering terjadi. Pada tiga faktor inilah penting untuk dicermati di Kabupaten Fakfak agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi secara masif pada berbagai tingkatan masyarakat.

Tabel 6.1 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Fakfak, Tahun 2010

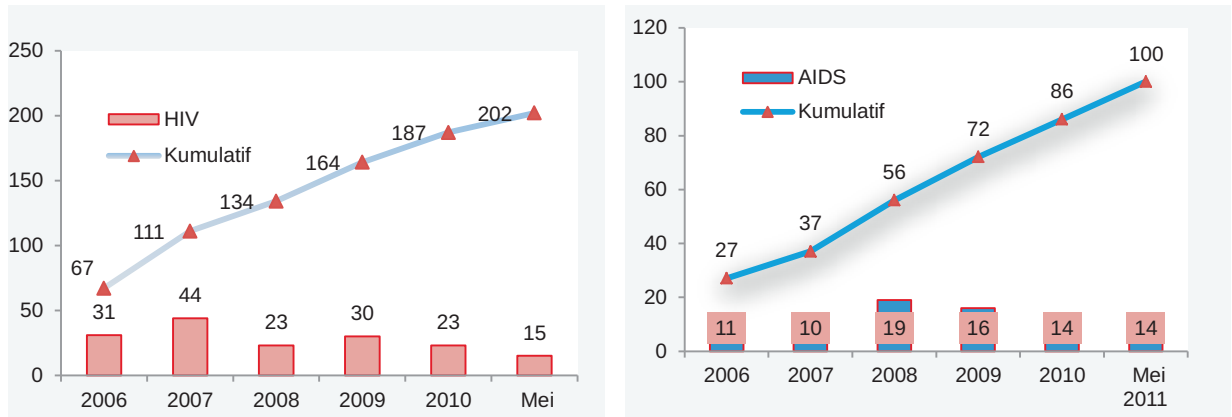
Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Terhadap Anak
KDRT	18	-
Pemerkosaan	2	-
Asusila/ Percabulan	-	9
Perzinahan	4	-
Persetubuhan di bawah umur	-	4
Penganiayaan	4	-
<b>Jumlah Kasus Kekerasan</b>	<b>28</b>	<b>13</b>

Sumber: BPS, Fakfak Dalam Angka, Tahun 2011.

### 6.3. Isu HIV dan AIDS

**Jumlah kasus pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Fakfak menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2006-2011.** Pada tahun 2010 berjumlah 303 orang, yang terdiri dari 202 penderita HIV dan 100 Penderita AIDS. Jumlah kasus HIV dan AIDS yang ditemukan bervariasi setiap tahun selama periode 2006-2011, kasus HIV berkisar antara 15-44 dan kasus AIDS berkisar antara 10-19 kasus selama periode yang sama. Jumlah pengidap HIV dan AIDS serta pertumbuhan kumulatif kasus HIV dan AIDS selama periode 2006 – 2011 di gambarkan sebagai berikut;

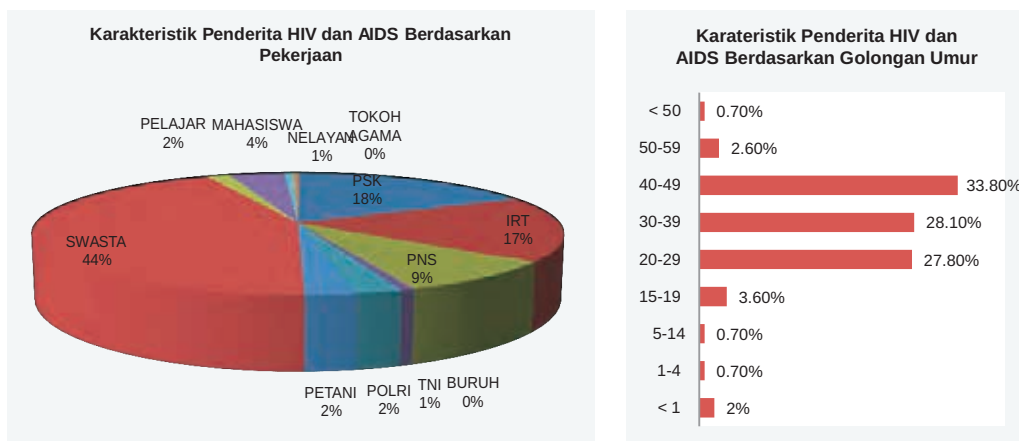
Gambar 6.4. Jumlah Pengidap dan Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Fakfak, Tahun 2006-2011



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012.

**Perilaku seks bebas di luar nikah tanpa menggunakan pengaman atau kondom merupakan faktor risiko terbesar penyebab meningkatnya kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Fakfak.** Kasus perilaku Heteroseks di 83,7 persen menjadi penyebab kasus HIV/AIDS di Kabupaten Fakfak, disusul penyebab perinatal atau melalui ibu hamil yang menderita HIV/AIDS 3,3 persen, homobiseks 1,6 persen dan tidak diketahui penularannya sebanyak 11 persen. Sebagian besar penderita HIV dan AIDS adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 persen dan selebihnya perempuan sebanyak 48 persen. Pengidap HIV dan AIDS cukup heterogen jika dilihat dari jenis pekerjaan, usia, tempat tinggal, sebagai PSK, Ibu rumahtangga, swasta. Sebagian besar pengidap HIV dan AIDS bekerja sebagai wiraswasta, PSK dan Ibu rumahtangga, dan menyebar pada usia 20-49 tahun.

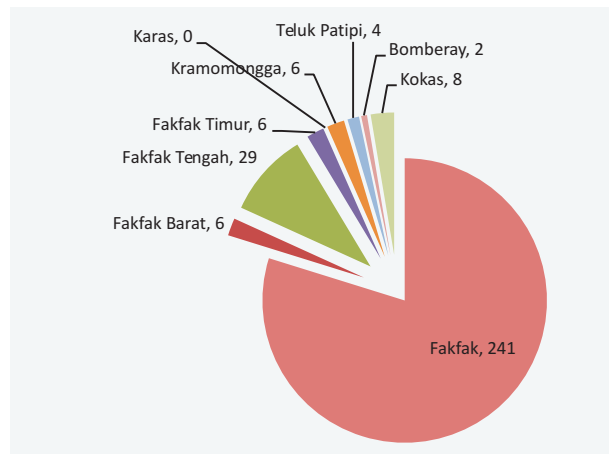
Gambar 6.5. Karakteristik Penderita HIV dan AIDS Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Fakfak, Tahun 2006-2011



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, 2007-2012

**Sebagian besar kasus HIV/AIDS terjadi di daerah perkotaan Kabupaten Fakfak.** Penyebaran pengidap HIV/AIDS berdasarkan distrik, menunjukkan bahwa sebagian besar pengidap HIV/AIDS berdomisili di daerah perkotaan, yaitu 80 persen di Distrik Fakfak, sembilan persen di Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak Barat sebanyak 2 persen, dan Distrik Fakfak Timur juga 2 persen. Selebihnya 13 persen terjadi di perdesaan, seperti di Distrik Kokas 3 persen, Distrik Kromomongga sebanyak 2 persen, Distrik Teluk Patipi 1 persen dan Distrik Bomberai sebanyak 1 persen. Tingginya penemuan kasus HIV dan AIDS di daerah perkotaan khususnya Distrik Fakfak karena kedudukannya sebagai Ibukota Kabupaten yang merupakan pintu gerbang lalulintas dari dan keluar Kabupaten Fakfak. Selain itu pelayanan kesehatan HIV/AIDS yang lebih diintegrasikan di kota sehingga pengungkapannya tercatat di daerah perkotaan. Di samping itu tingginya kesadaran masyarakat perkotaan untuk melakukan pemeriksaan status kesehatan HIV/AIDS.

Gambar 6.6. Penyebaran Jumlah Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Distrik di Kabupaten Fakfak, Th. 2006-2011



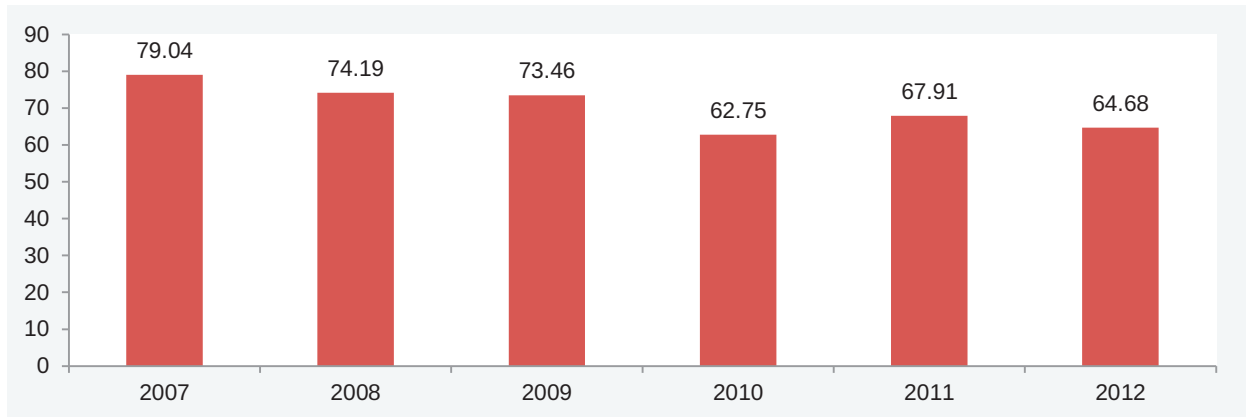
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, 2007-2012

**Upaya penanggulangan HIV/AIDS ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS (KPA) Kabupaten Fakfak.** Sumber pendanaan utama Dinas Kesehatan adalah dari APBD Kabupaten Fakfak. Hal ini menyebabkan kecilnya alokasi dana penanggulangan HIV dan AIDS karena harus dibagi dengan beberapa program kegiatan yang dilakukan di Dinas Kesehatan. Kelembagaan KPA masih berdiri sendiri dan memperoleh sumber bukan langsung dari APBD namun bersumber dari dana-dana bantuan pusat yang langsung ke KPA kabupaten. Terbatasnya dana yang dialokasikan ke KPA menjadi kurang intensifnya penanganan HIV dan AIDS yang dilakukan KPA dibandingkan Dinas Kesehatan. Mekanisme penanggulangan HIV dan AIDS juga dilakukan melalui pemeriksaan HIV dan AIDS gratis bagi ibu hamil. Upaya ini telah banyak membantu Dinas Kesehatan dalam mendeteksi virus HIV dan AIDS di kalangan ibu rumah tangga karena kurang adanya kesadaran untuk memeriksakan status kesehatan HIV dan AIDS.

## 6.4. Dana Otonomi Khusus

**Penerimaan Dana Otsus Kabupaten Fakfak cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan selama periode 2007-2012.** Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan dana otsus sepanjang tahun 2007-2012, sebesar 5,4 Persen Tahunan. Penerimaan yang bersumber dari Dana Otsus ini mengalami peningkatan sebesar Rp 11,28 milyar tahun 2011. Untuk tahun 2007 sampai 2009 mengalami peningkatan, namun 2010 dan 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 10,05 milyar dan Rp 3,52 milyar. Hal ini disebabkan pemekaran kabupaten provinsi.

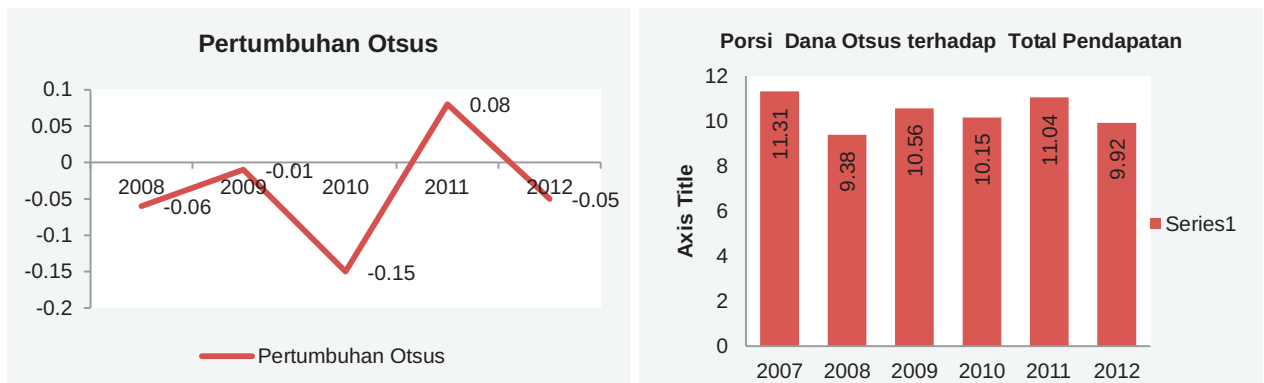
Gambar 6.7. Perkembangan Dana Otsus di Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012 (miliar rupiah)



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, 2007-2012.

**Kontribusi Dana Otsus terhadap total Pendapatan daerah sepanjang tahun 2007-2012 cenderung fluktuatif.** Tahun 2007, proporsi dana otsus mencapai 11,31 Persen dari total Pendapatan Daerah, Pada tahun 2008, 2010 dan 2012 mengalami penurunan, tahun 2009 dan 2011 mengalami peningkatan walaupun masih di bawah kontribusi pendapatan otsus tahun 2007. Penurunan kontribusi otsus tahun 2012 diindikasikan karena bertambahnya Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua Barat.

Gambar 6.8 Pertumbuhan dan Porsi Dana Otsus Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak, 2007-2012

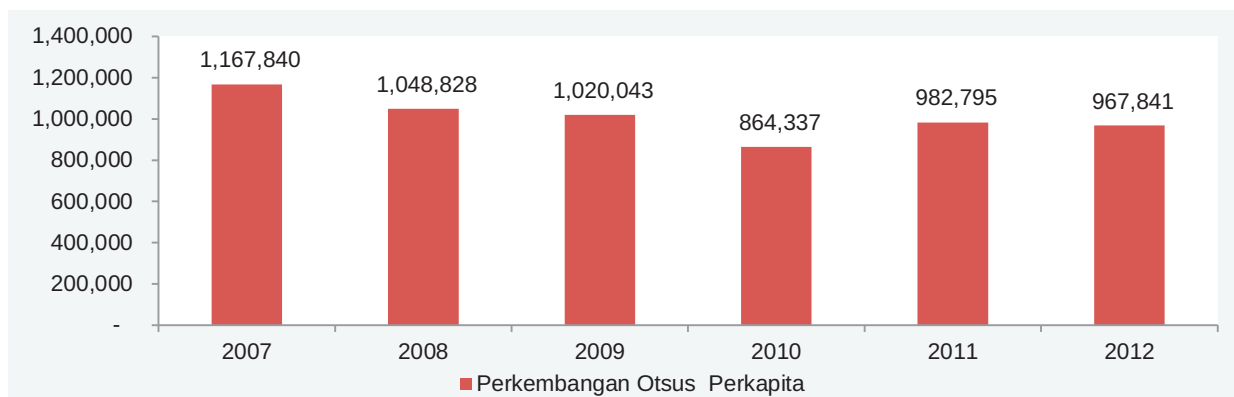


Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012.

**Dana Otsus per kapita Kabupaten Fakfak berfluktuasi dan cenderung menurun selama periode tahun 2007-2012.** Dana Otsus per kapita tertinggi dicapai pada tahun 2007, sebaliknya terendah ditunjukkan pada tahun 2010. Artinya, selama periode 2007-2010 dana otsus per kapita terus mengalami penurunan setiap tahun. Kembali mencapai peningkatan sedikit tahun 2011, tetapi nampaknya kembali mengalami penurunan tahun 2012. Penurunan dana otsus per kapita secara umum ini, selain disebabkan oleh penurunan nilai dana otsus sebagai akibat dari semakin bertambahnya daerah otonom baru dari sejumlah pemekaran daerah, baik di Papua dan Papua Barat maupun di provinsi lainnya, juga disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi yang dipicu oleh faktor migrasi masuk yang besar termasuk di Kabupaten Fakfak.



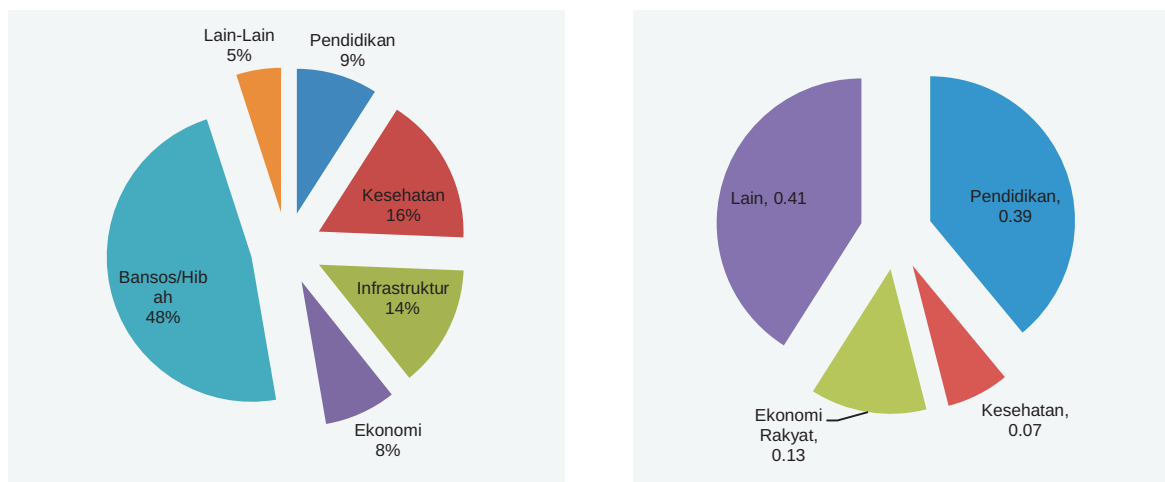
Gambar 6.9. Perkembangan Dana Otsus Per Kapita Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2007-2012.

**Alokasi dana Otsus Kabupaten Fakfak dominan dialokasikan untuk belanja bantuan hibah dan bantuan sosial.** Belanja dana otsus untuk bantuan hibah dan bantuan sosial Kabupaten Fakfak pada tahun 2011 sebesar 48 persen. Alokasi sektoral dana Otsus tahun 2011 untuk sektor Pendidikan belum terpenuhi seperti yang diamanatkan dalam undang-undang otonomi khusus karena belum mencapai 30 persen. Sedangkan untuk sektor kesehatan alokasi belanja yang bersumber dari dana otsus sudah memenuhi amanat Otonomi khusus yaitu 15 persen. Hanya saja, alokasi untuk bantuan sosial dan bantuan hibah ini sebagian juga berubah hibah pendidikan sehingga kalau diintegrasikan antara keduanya, maka belanja Otsus untuk pendidikan bisa saja lebih besar dari sembilan persen.

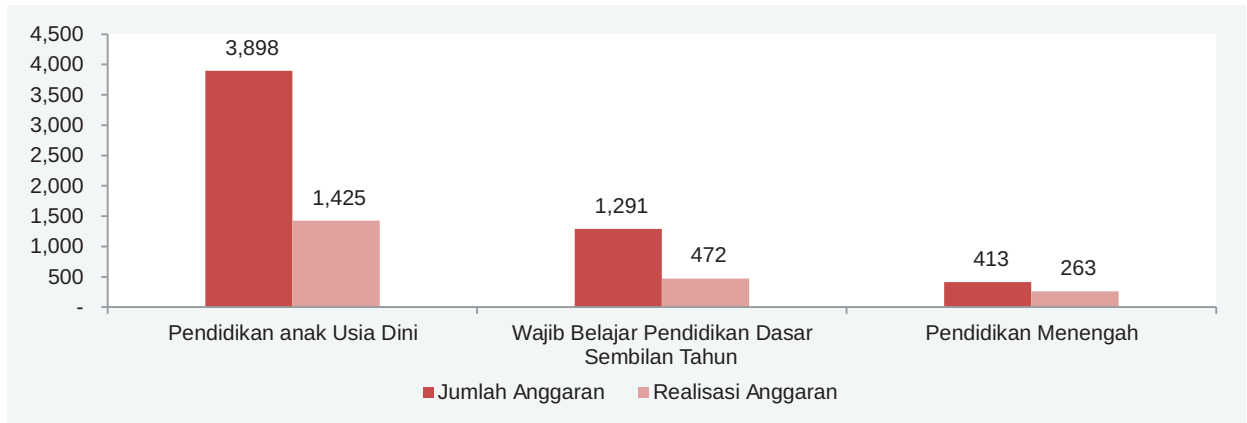
Gambar 6.10. Alokasi Sektoral Dana Otsus Kabupaten Fakfak, Tahun 2011



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2011.

**Alokasi anggaran pendidikan dana Otsus Kabupaten Fakfak lebih fokus pada program pendidikan usia dini pada tahun 2011.** Alokasi anggaran tertinggi pada Dinas Pendidikan adalah program pendidikan usia dini sebesar Rp 3,9 milyar atau 69,6 persen dari total anggaran pendidikan dana Otsus Kabupaten Fakfak pada tahun 2011. Selebihnya program pendidikan dasar sebesar Rp 1,3 milyar atau sebesar 23 persen dan alokasi terendah untuk program pendidikan menengah yang hanya sebesar Rp 413 juta atau hanya sebesar 7,4 persen dari total anggaran pendidikan dana Otsus Kabupaten Fakfak pada tahun 2011. Mencerati alokasi program pendidikan ini, nampaknya dana Otsus pendidikan Kabupaten Fakfak lebih ditujukan untuk membangun kesadaran dasar masyarakat akan pentingnya pendidikan sejak dini untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah ke depan.

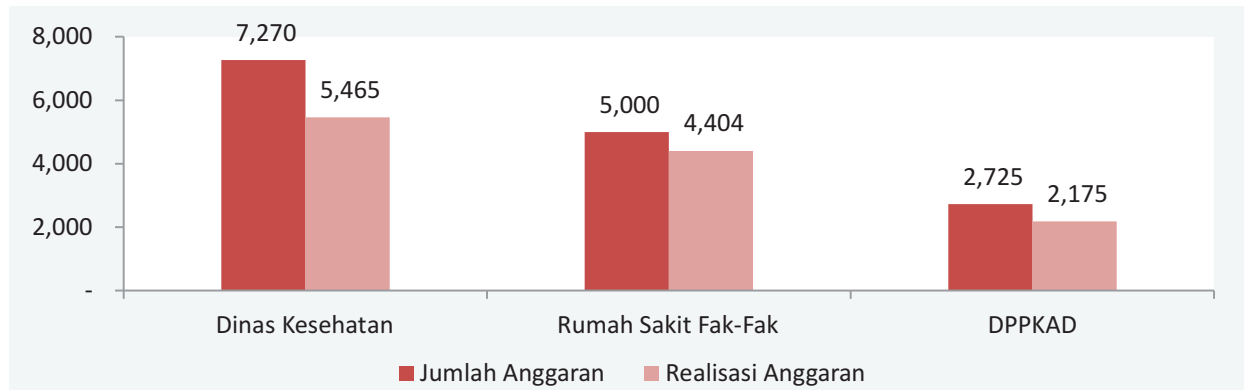
Gambar 6.11. Realisasi Anggaran Pendidikan Dana Otsus Berdasarkan Program Kabupaten Fakfak, Tahun 2011 (Juta Rupiah)



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2011.

**Implementasi program urusan kesehatan dari dana Otsus lebih banyak dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak pada tahun 2011.** Dinas Kesehatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 7,3 milyar atau sebesar 48,5 persen. Alokasi untuk Rumah Sakit Daerah sebesar Rp 5 milyar atau sebesar 33,3 persen. Selebihnya, 18,2 persen atau Rp 2,7 milyar dikelola DPPKAD Kabupaten Fakfak. Khusus untuk alokasi Dinas Kesehatan, lebih dari setengah dana Otsus Dinas Pendidikan ditujukan untuk program upaya kesehatan masyarakat yakni sebesar Rp 3,6 milyar. Sedang untuk Rumah Sakit Umum Daerah, sebagian besar untuk mendanai program pengadaan obat dan pembekalan kesehatan dan DPPKAD yang diperuntukan bagi pengobatan masyarakat. Semua program urusan kesehatan pada setiap unit kerja ini dianggap sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kualitas kesehatan masyarakat.

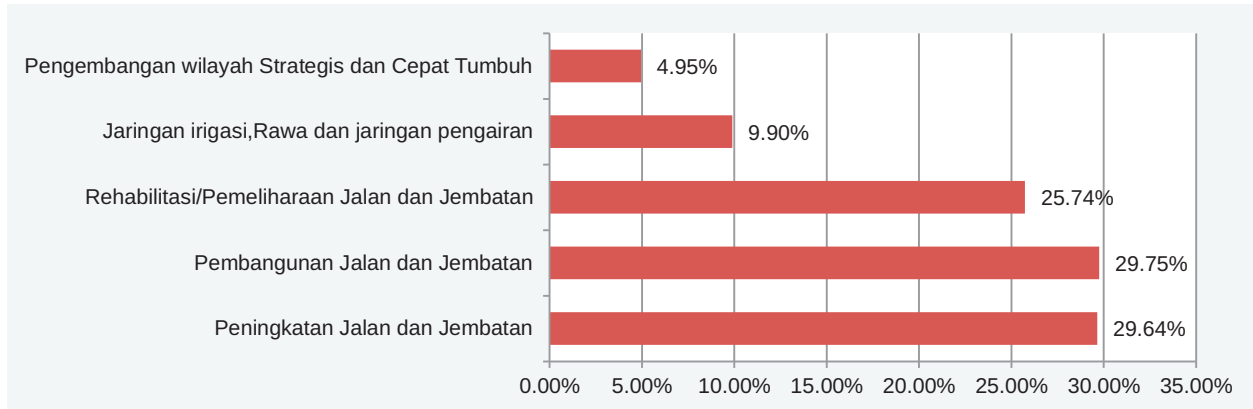
Gambar 6.12. Alokasi Dana Otsus Urusan Kesehatan Kabupaten Fakfak, Tahun 2011 (dalam juta rupiah)



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2011.

**Program pembangunan jalan dan jembatan memperoleh alokasi dana Otsus bidang infrastruktur terbesar Kabupaten Fakfak tahun 2011.** Alokasi dana sebesar Rp 3,005 milyar atau mencapai 29,75 persen dari total Dana Otsus untuk infrastruktur ditujukan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Program ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat untuk menghubungkan atau menjangkau daerah-daerah terpencil guna meningkatkan akses atau membuka isolasi suatu daerah yang bertujuan mempermudah mobilisasi dan distribusi barang dan jasa.

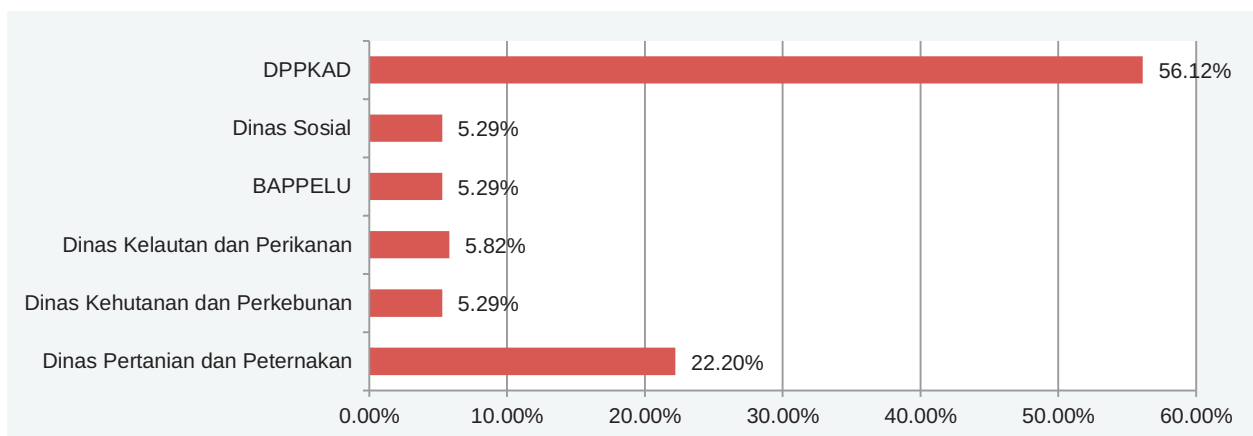
Gambar 6.13. Persentase Alokasi Dana Otsus Untuk Infrastruktur Kabupaten Fakfak Berdasarkan Program, Tahun 2011



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2011.

**DPPKAD merupakan SKPD yang terbanyak mengelola alokasi dana Otsus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Fakfak Tahun 2011.** Dana Otsus untuk urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Fakfak sebesar 56,12 persen dari total dana Otsus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada tahun 2011 di daerah ini. Fakta ini mengindikasikan besarnya alokasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dialokasikan dalam bentuk pemberian uang tunai. SKPD yang juga cukup besar mengalokasikan dana Otsus urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini adalah Dinas Pertanian dan Peternakan yang menyerap 22,2 persen anggaran. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat bergerak pada sektor pertanian dan peternakan, sehingga untuk pengembangan ekonomi masyarakat dapat dikembangkan secara operasional oleh SKPD terkait. Pola yang sama untuk SKPD bidang pertanian lainnya, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan, total kedua SKPD tersebut menyalurkan 11,11 persen dana Otsus urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keduanya, sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan mengembangkan program-program yang secara langsung menyentuh pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.

Gambar 6.14. Persentase Alokasi Dana Otsus Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Fakfak Berdasarkan SKPD Pengelola, Tahun 2011



Sumber: APBD Kabupaten Fakfak, Tahun 2011.

## 6.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Meskipun kemiskinan masih tergolong tinggi, tetapi indikator persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) dan indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Fakfak selama periode 2007-2010 menunjukkan penurunan secara konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin menyempit atau membaik. Menunjukkan kinerja ekonomi Daerah semakin intensif dalam upaya penanggulangan kemiskinan walaupun belum terbentuk lembaga khusus menangani kemiskinan daerah Kabupaten Fakfak. Agar penurunan tingkat kemiskinan dapat lebih akseleratif lagi, maka direkomendasikan sebagai berikut: (1) Perlu adanya lembaga khusus penanggulangan kemiskinan daerah; (2) Diperlukan Data lengkap kemiskinan Daerah antara Daerah Perkotaan dan Daerah Pedesaan dalam bentuk sensus, sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan berbasis masyarakat, *by name by address* untuk database kemiskinan daerah secara lengkap dan akurat.

IPM dan IPG Kabupaten Fakfak selama periode 2007-2010 meningkat cukup signifikan namun masih terjadi kesenjangan gender walaupun setiap tahun semakin mengecil atau membaik. Selain itu masih nampak peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Fakfak selama ini. Hal-hal yang perlu direkomendasikan untuk diperhatikan ke depan yaitu: (1) Perlu Partisipasi perempuan dalam bidang Pendidikan Kesehatan dan Pengambilan keputusan di sektor publik (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif); (2) Memasukkan Gender dalam indikator perencanaan dan penganggaran Daerah; (3) Perlu ada upaya pendampingan bagi korban kekerasan, sosialisasi dan penegakan hukum Undang-undang KDRT dan Undang-undang kekerasan pada anak bagi masyarakat umum.

Jumlah pengidap HIV dan AIDS terus meningkat setiap tahun di Kabupaten Fakfak. Sejumlah faktor penyebabnya antara lain perilaku tanpa menggunakan kondom dan lebih dominan menyebar di daerah Perkotaan, terbatasnya dana yang dialokasikan ke Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), menjadikan kurang intensifnya penanganan HIV dan AIDS yang dilakukan KPA dibandingkan Dinas Kesehatan. Upaya-upaya penanganan atau penanggulangan HIV dan AIDS melalui test darah gratis pada Ibu Hamil banyak membantu Dinas Kesehatan dalam menemukan kasus HIV dan AIDS di kalangan Ibu Rumah tangga tetapi secara keseluruhan kesadaran masyarakat masih sangat kurang untuk melakukan pemeriksaan HIV dan AIDS. Rekomendasi yang penting ke depan antara lain: (1) Meningkatkan Program pemeriksaan darah gratis bagi ibu hamil; (2) Perlu ada APBD untuk KPA; (3) Koordinasi lintas sektoral untuk menangani atau penanggulangan penyakit HIV dan AIDS; dan (4) Peningkatan belanja di sektor kesehatan dengan program yang khusus pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.

Pengalokasian Dana Otsus Kabupaten Fakfak belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perundangan, terutama masih cukup besar yang dialokasikan tidak sesuai dengan Undang-undang 21 tahun 2001 yang menitikberatkan pada 4 (empat) sektor yaitu Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Fakta menunjukkan dana Otsus lebih banyak dibelanjakan di Sektor Belanja Hibah dan Belanja Barang Jasa ini menyalahi aturan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 atas perubahan ke dua tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada banyak hal proses perencanaan dana otsus belum baik sehingga tidak terserap secara maksimal. Direkomendasikan langkah strategis kedepan, antara lain: (1) Dibuat aturan tersendiri di tingkat Daerah dalam pembelanjaan Otonomi khusus; (2) Pengalokasian Dana Otsus harus sesuai Undang-Undang 21 tahun 2001 yang menitikberatkan pada sektor pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi Rakyat; (3) Diutamakan Belanja di sektor belanja langsung daripada Belanja Tidak Langsung; (4) Untuk Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial diutamakan 4 Sektor diatas; (5) Perencanaan Dana Otsus harus lebih di tingkatkan untuk meningkatkan daya serap anggaran; dan (6) Mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, terutama komoditi-komoditi unggulan seperti pala yang ada di sektor pertanian Sub sektor Perkebunan.

## Daftar Pustaka

- APBD Perubahan Kabupaten Fak-Fak Tahun Anggaran 2007  
APBD Kabupaten Fak-Fak Tahun Anggaran 2008, Peraturan Bupati Fak-Fak Tahun 2008.  
APBD Kabupaten Fak-fak Tahun Anggaran 2009, Peraturan Bupati Fak-fak Tahun 2009.  
APBD Kabupaten Fak-Fak Tahun Anggaran 2010, Peraturan Bupati Fak-fak Tahun 2010.  
APBD Kabupaten Fak-fak Tahun Anggaran 2011, Peraturan Bupati Fak-fak Tahun 2011.  
APBD Perencanaan Kabupaten Fak-fak Tahun Anggaran 2012, Tahun 2012.  
Daerah Dalam Angka, Provinsi Papua Barat, BPS Tahun 2010 – 2011  
Daerah Dalam Angka, BPS Kabupaten Fak-Fak, Tahun 2006 – 2012  
Ikhtisar Hasil pemeriksaan LKPD BPK RI, Tahun 2012  
IPM Provinsi Papua Barat, Tahun 2009 – 2012  
Laporan Pemeriksaan BPK, Tahun 2012  
Laporan Realisasi Dana Otsus Provinsi Papua Barat, Tahun 2012  
Laporan Realisasi Dana Otsus Provinsi Papua Barat dan Kabupaten , Tahun 2007 - 2011  
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2011  
Profil Investasi kabupaten Fak-fak tahun 2011  
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2008  
RPJMD Kabupaten Fak-fak tahun 2010 – 2015  
Rincian Penerimaan Kabupaten Fak-Fak tahun 2008 – 2011

# Lampiran

## Lampiran A: Matriks Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab Pendahuluan	
Kesimpulan	Rekomendasi
Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2010-2011 masih dominan walaupun cenderung menurun dan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB masih yang terbesar yaitu sekitar 26% tapi lebih kecil dibanding pekerja di sektor pertanian sekitar 54%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Peningkatan alokasi anggaran sektor pertanian.</li> <li>(2) Program strategis untuk mendukung dan mendorong produksi sektor pertanian terutama di sektor hilir baik dari sisi permodalan, produksi, manajemen, maupun pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian.</li> <li>(3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi sektor pertanian melalui program penyuluhan dan pelatihan kepada petani.</li> </ol>
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Fakfak yang terus meningkat ternyata juga diikuti dengan meningkatnya TPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembangunan ekonomi Kabupaten Fakfak juga lebih diarahkan pada sektor-sektor kunci seperti sektor pertanian; tanpa mengabaikan sektor lain seperti perdagangan, hotel dan restoran; industri pengolahan; dan pertambangan dan penggalian</li> <li>(2) Perlu pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagai lokasi transit terutama antara Prov. Maluku dan Prov. Papua Barat</li> </ol>
Bab Keuangan Daerah	
Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas, peran anggota DPRD sebagai pengawas eksekutif, dan akses publik terhadap dokumen anggaran masih harus ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Meningkatkan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.</li> <li>(2) Meningkatkan sinergitas program antar SKPD dalam mewujudkan program prioritas pembangunan dengan menggunakan indikator dan target kinerja serta capaian yang terukur.</li> <li>(3) Meningkatkan kualitas dan kemampuan Aparatur Pemerintah dan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi.</li> <li>(4) Memberikan pemahaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tentang proses perencanaan dan penganggaran.</li> </ol>
Pengelolaan pendapatan dan pembenahan kelembagaan serta ketersediaan regulasi daerah terkait masih perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Meningkatkan kapasitas manajemen pendapatan.</li> <li>(2) Layanan pembayar pajak perlu di tingkatkan.</li> <li>(3) Peningkatan dan penanganan manajemen pendapatan harus dimaksimalkan</li> </ol>
Pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Fak-Fak seharusnya ditunjang melalui pengadaan layanan elektronik dan penguatan kelembagaan ULP dan peningkatan sumber daya manusia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Meningkatkan jumlah SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.</li> <li>(2) Pembuatan sistem Pengadaan Pelayanan Elektronik.</li> <li>(3) Pelatihan Penggunaan Pelayanan Pengadaan Elektronik kepada seluruh stakeholders.</li> <li>(4) Peningkatan Kapasitas Koneksi Internet</li> </ol>
Manajemen Aset Kabupaten FakFak berkinerja Paling Buruk dari semua bidang PKD	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mengadakan Pelatihan dan Pendampingan tentang Permendagri No 17 tahun 2007.</li> <li>(2) Pengadaan sistem informasi barang daerah (SIMBADA) berbasis komputer.</li> <li>(3) Pelatihan Simbada berbasis Komputer</li> </ol>
Pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Meningkatkan peran auditor internal melalui peningkatan sumberdaya anggaran serta SDM auditor fungsional yang berkualitas.</li> <li>(2) Meningkatkan komunikasi untuk mendukung audit eksternal serta tindak lanjut temuan audit eksternal</li> </ol>

<b>Bab Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kesimpulan</b>	<b>Rekomendasi</b>
Ketertanggungfiskal daerah Kabupaten Fakfak bukan hanya masih tinggi, tapi juga cenderung meningkat selama periode 2007-2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Melakukan inventarisasi aset dan identifikasi potensi aset daerah serta menyusun pemetaan pendapatan asli daerah berdasarkan obyek pendapatan, kewilayahan dan potensi ekonomi masyarakatnya.</li> <li>(2) Sebelum sampai kepada program intensifikasi pendapatan daerah, pemerintah daerah harus memiliki peta pajak daerah, peta retribusi daerah, dan peta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya dalam suatu sistem informasi keuangan daerah, setelah itu intensifikasi pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah.</li> <li>(3) Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah dalam manajemen, teknik inventarisasi, penilaian, akuntansi, dan pengelolaan aset.</li> </ol>
APBD Kabupaten Fakfak secara umum mengalami defisit, bahkan melebihi ketentuan perundangan maksimal tiga persen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah daerah menekan pembiayaan defisit pada level maksimal tiga persen serta fokus menutupi defisit yang tidak tergantung pada utang daerah dan mengelola alokasi defisit pada pembangunan fasilitas fisik daerah.</li> <li>(2) Memberikan perhatian pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.</li> <li>(3) Mencermati alokasi anggaran hingga satuan tiga, bahkan harus menciptakan keseimbangan belanja, antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, khususnya keseimbangan antara belanja pegawai dengan belanja modal</li> </ol>
<b>Bab Belanja Daerah</b>	
Belanja daerah Kabupaten Fakfak mengalami penurunan pada periode 2007-2011. Penurunan belanja daerah pada dua tahun terakhir terutama dikontribusi oleh penurunan belanja modal dan penurunan sektor pemerintahan umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Peningkatan kapasitas perencanaan program dalam menyusun rencana anggaran yang berbasis sektor prioritas.</li> <li>(2) Peningkatan porsi belanja untuk infrastruktur melalui penghematan belanja pada sektor pemerintahan umum.</li> <li>(3) Peningkatan porsi belanja untuk sektor pertanian sebagai leading sektor di Kabupaten Fakfak melalui penghematan belanja untuk barang dan jasa.</li> <li>(4) Peningkatan porsi belanja untuk sektor pendidikan hingga memenuhi regulasi nasional 20 persen.</li> </ol>
<b>Bab Sektor-sektor Strategis</b>	
<b>Sektor Pendidikan</b>	
Perkembangan belanja sektor pendidikan berfluktuatif dimana terjadi kenaikan pada alokasi belanja pegawai yang diikuti dengan peningkatan jumlah guru setiap tahunnya.	Mengalokasikan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keluaran dan hasil di sektor pendidikan terutama untuk peningkatan mutu dan sarana prasarana pendidikan.
<b>Sektor Kesehatan</b>	
Rasio fasilitas dan tenaga kesehatan per 10.000 penduduk di Kabupaten Fakfak mengalami kekurangan tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan.	Alokasi jumlah sumberdaya manusia sektor kesehatan harus ditentukan formasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan setiap unit kesehatan dengan memperhitungkan beban setiap tenaga.
<b>Sektor Infrastruktur</b>	
Alokasi belanja sektor infrastruktur Kabupaten Fakfak didominasi oleh belanja modal sebesar 92,4% dari total belanja sektor dengan kecenderungan terus meningkat dari tahun 2007-2011.	Pemerintah daerah perlu meninjau ulang fasilitas yang telah dibangun dalam bentuk perawatannya, dimana telah banyak jalan yang rusak. serta secara perlahan, harus beralih kepada pembangunan fisik lainnya seperti infrastruktur yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat misalnya fasilitas penerangan, air bersih dan jaringan komunikasi.



Kesimpulan	Rekomendasi
<b>Sektor Pertanian dan Perkebunan</b>	
Sektor perkebunan sebagai sektor unggulan Kabupaten Fakfak ternyata belum didukung oleh ketersediaan areal tanam oleh karena luas areal untuk komoditi ini justru mengalami penurunan di setiap tahun.	Pemerintah diharapkan bisa menaikkan jumlah alokasi anggaran sektor pertanian dan perkebunan, agar bisa meningkatkan jumlah produksi dan juga dengan menetapkan kebijakan penambahan luas lahan perkebunan, khususnya untuk komoditi pala.
<b>Bab isu-isu Strategis</b>	
Meskipun kemiskinan masih tergolong tinggi, tetapi indikator persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Fakfak selama periode 2007-2010 menunjukkan penurunan secara konsisiten.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perlu adanya lembaga khusus penanggulangan kemiskinan daerah.</li> <li>(2) Diperlukan Data lengkap kemiskinan Daerah antara Daerah Perkotaan dan Daerah Pedesaan dalam bentuk sensus, sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan berbasis masyarakat, <i>by name by address</i> untuk database kemiskinan daerah secara lengkap dan akurat</li> </ol>
IPM dan IPG Kabupaten Fakfak selama periode 2007-2010 meningkat cukup signifikan namun masih terjadi kesenjangan gender walaupun setiap tahun semakin mengecil atau membaik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perlu Partisipasi perempuan dalam bidang Pendidikan Kesehatan dan Pengambilan keputusan di sektor publik (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).</li> <li>(2) Memasukkan Gender dalam indikator perencanaan dan penganggaran Daerah.</li> <li>(3) Perlu ada upaya pendampingan bagi korban kekerasan, sosialisasi dan penegakan hukum Undang undang KDRT dan Undangundang kekerasan pada anak bagi masyarakat umum.</li> </ol>
Jumlah pengidap HIV dan AIDS terus meningkat setiap tahun di Kabupaten Fakfak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Meningkatkan Program pemeriksaan darah gratis bagi ibu hamil.</li> <li>(2) Perlu ada APBD untuk KPA.</li> <li>(3) Koordinasi lintas sektoral untuk menangani atau penanggulangan penyakit HIV dan AIDS.</li> <li>(4) Peningkatan belanja di sektor kesehatan dengan program yang khusus menangani HIV dan AIDS.</li> </ol>
Pengalokasian Dana Otsus Kabupaten Fakfak belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perundangan, terutama masih cukup besar yang dialokasikan tidak sesuai dengan Undang-undang 21 tahun 2001 yang menitikberatkan pada 4 (empat) sektor yaitu Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dibuat aturan tersendiri di tingkat Daerah dalam pembelanjaan Otonomi khusus.</li> <li>(2) Pengalokasian Dana Otsus harus sesuai Undang Undang 21 tahun 2001 yang menitikberatkan pada sektor pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi Rakyat.</li> <li>(3) Diutamakan Belanja di sektor belanja langsung daripada Belanja Tidak Langsung.</li> <li>(4) Untuk Bantuan Hibah atau Bantuan Sosial diutamakan empat Sektor di atas.</li> <li>(5) Perencanaan Dana Otsus harus lebih di tingkatkan untuk meningkatkan daya serap anggaran.</li> <li>(6) Mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, terutama komoditi-komoditi unggulan seperti pala yang ada di sektor pertanian Sub sektor Perkebunan.</li> </ol>

## Lampiran B: Master Tabel

### B1. Pendapatan Berdasarkan Sumber (juta rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011
<b>PENERIMAAN</b>					
<b>PAD</b>	9.744	8.647	5.661	11.538	14.839
<b>Pajak Daerah</b>	765	567	1.144	1.002	1.136
Pajak Hotel	280	-	10	108	165
Pajak Restoran	-	-	453	407	744
Pajak Hiburan	-	-	16	58	34
	12				
Pajak Reklame	20	-	47	44	50
Pajak Penerangan Jalan	58	-	52	72	143
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	246	-	567	312	-
Pajak Parkir	-	-	-	-	-
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-
Pajak Lingkungan	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bangunan	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor	150	567	-	-	-
<b>Retribusi Daerah</b>	1.543	2.659	2.023	2.448	2.409
Retribusi Jasa Umum	-	-	1.422	1.835	1.757
Retribusi Jasa Usaha	-	-	110	113	122
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	492	500	530
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	3.960	5.420	7.165	6.495	4.394
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-	7.165	6.495	4.394
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	-	-	-
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	-	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	3.476	18.740	2.494	1.593	6.901
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
Jasa Giro	3.038	-	2.494	-	2.361
Pendapatan Bunga Deposito	-	-	-	1.593	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	-	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-	-
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
Pendapatan lainlain	439	-	-	-	2.043
Penerimaan dari unit kerja	-	-	-	-	2.497
<b>Dana Perimbangan</b>	437.569	505.249	472.406	481.006	556.693
<b>Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak</b>	59.776	73.681	63.293	84.548	97.633
Dana Bagi Hasil Pajak	52.425	-	49.939	55.636	56.402

	2007	2008	2009	2010	2011
Bagi Hasil Bukan Pajak	7.351	-	13.354	28.912	41.231
<b>Dana Alokasi Umum</b>	333.914	378.324	361.806	365.634	403.750
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	43.879	53.244	47.308	30.824	55.309
<b>BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH</b>	18.500	168.500	150.192	125.672	103.483
<b>Pendapatan Hibah</b>	18.350	8.000	-	13.400	-
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	-	13.400	-
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	-	-	-	-	-
<b>Dana Darurat</b>	-	13.000	-	-	-
Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	-	-	-	-	-
<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	150	15.794	1.940	617	4.257
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	150	-	-	617	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)	-	-	1.940	-	4.257
Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)	-	-	-	-	-
<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	84.280	117.706	126.592	109.655	92.825
Dana Penyesuaian	25.000	-	59.010	46.909	18.804
Dana Otonomi Khusus	59.280	-	67.583	62.746	74.021
<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	-	14.000	21.659	2.000	6.401
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	-	-	21.659	2.000	6.401
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Dari Kota lainnya	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	465.813	682.396	628.259	618.217	675.015

## B2. Belanja Berdasarkan Urusan Wajib (juta rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011
Urusan Pendidikan	71.023	76.872	87.700	91.631	120.788
Urusan Kesehatan	52.126	55.969	51.932	43.539	59.900
Urusan Pekerjaan Umum	100.323	210.035	137.260	176.856	139.244
Urusan Perumahan Rakyat	52.009	36.676	8.701	9.983	-
Urusan Penataan Ruang	852	-	276	301	-
Urusan Perencanaan Pembangunan	12.954	12.649	10.113	8.519	11.499
Urusan Perhubungan	12.134	10.989	16.481	9.463	9.968
Urusan Lingkungan Hidup	5.353	4.449	4.245	4.854	4.370
Urusan Pertanahan	-	-	-	-	-
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	942	-	1.240	2.693	3.533
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	449	-	1.778	2.971	4.508
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.743	2.101	1.093	701	-
Urusan Sosial	6.930	6.955	3.981	4.118	4.302
Urusan Ketenagakerjaan	4.084	4.476	3.908	3.229	4.022

	2007	2008	2009	2010	2011
Urusan Koperasi dan UKM	3.094	-	2.447	3.575	5.861
Urusan Penanaman Modal	3.258	2.834	-	196	-
Urusan Kebudayaan	1.356	-	5.020	4.179	5.638
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	4.426	-	3.464	3.327	-
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Negeri	4.927	4.411	4.383	4.569	8.195
Urusan Pemerintahan Umum	180.235	231.229	396.751	301.679	177.177
Urusan Kepegawaian	10.947	11.794	7.741	-	-
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.370	7.927	6.399	14.032	9.119
Urusan Statistik	-	-	-	-	-
Urusan Kearsipan	-	-	1.558	1.602	2.012
Urusan Komunikasi dan Informatika	1.607	3.016	-	3	-
Perpustakaan	-	-	-	-	-
Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>546.143</b>	<b>682.384</b>	<b>756.469</b>	<b>692.019</b>	<b>570.137</b>

### B3. Belanja Berdasarkan Urusan Pilihan (juta rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011
Urusan Pertanian	14.874	9.247	11.775	16.515	15.823
Urusan Kehutanan	3.869	7.544	7.934	7.569	6.100
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	5.234	10.194	3.989	14.932	4.114
Urusan Pariwisata	3.464	4.949	-	-	-
Urusan Kelautan dan Perikanan	11.538	9.059	10.634	7.703	6.726
Urusan Perdagangan	3.928	-	4.986	4.461	-
Urusan Industri	2.628	7.021	5.183	3.996	4.032
Urusan Ketransmigrasian	-	-	-	315	-
<b>Total</b>	<b>45.536</b>	<b>48.014</b>	<b>44.502</b>	<b>55.492</b>	<b>36.795</b>

### B4. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Belanja tidak langsung</b>	<b>192.848</b>	<b>243.013</b>	<b>431.813</b>	<b>388.659</b>	<b>253.569</b>
Pegawai	155.797	150.339	302.930	183.073	209.652
Bunga	-	-	-	57.985	-
Hibah/subsidi	-	-	-	14.494	5.008
Bantuan Sosial	35.973	55.840	96.823	89.334	38.196
Bagi Hasil ke Daerah Bawahan	-	-	1.500	-	-
Bantuan ke Daerah Bawahan	78	34.583	30.060	1.500	-
Tidak Terduga	1.000	394	500	200	714
Bantuan kepada Lembaga Vertikal	-	1.857	-	42.074	-
<b>Belanja langsung</b>	<b>398.831</b>	<b>487.386</b>	<b>369.158</b>	<b>358.852</b>	<b>353.363</b>
Pegawai	40.411	28.259	19.596	108.905	32.743
Barang dan Jasa	158.083	165.749	144.421	106.423	125.969
Modal	200.337	293.377	205.141	143.524	194.651
<b>Total</b>	<b>591.679</b>	<b>730.399</b>	<b>800.971</b>	<b>747.511</b>	<b>606.932</b>

## Lampiran C: Catatan Metodologi PERA

Laporan studi *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) terbagi atas 6 (enam) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan; Bab II Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM); Bab III Analisis Pendapatan Daerah; Bab IV Analisis Belanja Daerah; Bab V Analisis Sektor Strategis, Bab VI Analisis Isu Lokal. Setiap bab ditutup dengan sub-bab kesimpulan dan rekomendasi. Khusus untuk analisis sektor strategis, masing-masing sektor dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Data yang digunakan untuk analisis studi PERA secara umum dibagi atas dua kategori, yaitu (i) Data Fiskal (Keuangan Daerah), (ii) Data Non-Fiskal. Data Fiskal meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok, APBD Perubahan, dan APBD Realisasi (Pertanggungjawaban Kepala Daerah). Sementara data Non-Fiskal meliputi data makro ekonomi daerah, indikator pembangunan sosial, data kinerja *output* dan *outcome* sektor-sektor strategis (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian), dan data pembangunan gender, serta data dokumen perencanaan.

### Data Fiskal (APBD)

Seluruh data APBD diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota yang menjadi wilayah studi PERA pada lima Provinsi di Indonesia (Jawa Timur, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat) dalam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Rentang waktu data tahun 2007 hingga 2011 dengan tiga kategori data, yaitu APBD Pokok, APBD Perubahan dan APBD Realisasi. Selain itu, data rincian objek PAD diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah masing-masing kabupaten.

Data pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah seluruhnya dinyatakan dalam angka/nilai riil dengan menggunakan tahun dasar (*base-year*) 2010. Artinya, angka tersebut telah dideflator berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2010 (2010=100) atau inflasi 2010. Cara ini dilakukan untuk mengamati dan mengukur perkembangan anggaran secara riil dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2007-2011.

Bagi kabupaten studi PERA yang tidak memiliki angka inflasi, ada dua alternatif yang dapat dilakukan untuk menghitung data keuangan secara riil yaitu: (i) menggunakan angka inflasi yang terdekat dengan kabupaten tersebut, (ii) menghitung melalui PDRB deflator.

Data APBD dipergunakan untuk menganalisis 3 bab dalam struktur Laporan PERA yaitu: (i) Bab III Pendapatan daerah yang meliputi gambaran pendapatan pendapatan daerah kabupaten PERA, Struktur pendapatan daerah dan analisis pembiayaan daerah, (II) Bab IV Belanja daerah yang meliputi Gambaran umum perkembangan belanja daerah, belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi, dan belanja daerah berdasarkan sektor, (iii) Bab V Isu Strategis khususnya menganalisis besaran alokasi belanja untuk masing-masing sektor-sektor strategis.

Analisis belanja untuk sektor strategis meliputi sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Data belanja sektor infrastruktur merupakan penggabungan atau penjumlahan belanja urusan pekerjaan umum, urusan permukiman, dan urusan perhubungan; Data belanja sektor pendidikan merupakan penjumlahan belanja urusan pendidikan, urusan kebudayaan dan urusan perpustakaan; Data belanja sektor kesehatan adalah belanja urusan kesehatan; dan data belanja sektor pertanian merupakan penjumlahan dari belanja urusan pertanian dan urusan ketahanan pangan. Selain itu, beberapa kabupaten menganalisis belanja pembangunan gender yang diproxy dari belanja urusan pemberdayaan perempuan dan urusan buruh migran; dan belanja pada urusan Kesbangpolinmas terkait dengan mitigasi bencana.

Selain data APBD, data APBN juga dianalisis terutama pada bagian belanja daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran besaran dana APBN yang dibelanjakan di masing-masing kabupaten yang menjadi studi PERA, baik berdasarkan organisasi, maupun berdasarkan fungsi.

Khusus untuk Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM) dianalisis dengan menggunakan hasil survey. Penilaian keuangan daerah mencakup aspek: (1) kerangka peraturan perundang-undangan; (2) perencanaan dan penganggaran; (3) pengelolaan kas; (4) pengadaan barang dan jasa; (5) akuntansi dan pelaporan; (6) pengawasan internal; (7) hutang dan investasi publik; (8) pengelolaan aset; dan (9) audit dan pengawasan eksternal. Kesembilan aspek tersebut dikelompokkan menjadi ke dalam tiga (3) bidang strategis, yakni: (1) perencanaan dan penganggaran; (2) pelaksanaan anggaran; dan (3) *oversight* dan akuntabilitas. Setiap bidang terdiri atas beberapa sub-bidang strategis dan setiap sub-bidang strategis terdiri atas beberapa pertanyaan (indikator penilaian).

Bidang Strategis	Sub-Bidang Strategis	Indikator
<b>Perencanaan dan Penganggaran</b>	Perencanaan Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah tersedia perencanaan dan penganggaran multi tahun, RPJMD, Renstra, dan Renja SKPD?</li> <li>Apakah target anggaran disusun realistis?</li> <li>Apakah terdapat sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif?</li> </ul>
	TAPD dan Tupoksinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah setiap elemen dalam TAPD menjalankan tupoksinya?</li> <li>Apakah terdapat evaluasi terhadap tupoksi?</li> <li>Bagaimana kapasitas perencanaan dan penganggaran di SKPD?</li> <li>Apakah koordinasi antar unit kerja sudah efektif?</li> </ul>
	Pembahasan APBD di DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana proses pembahasan?</li> <li>Bagaimana ketepatan waktu pembahasan APBD-APBD P?</li> <li>Bagaimana ketepatan waktu pengesahan APBD-APBDP?</li> <li>Apakah target anggaran disusun secara realistis?</li> <li>Permasalahan apa yang ditemukan?</li> </ul>
	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama APBD, dapat diakses oleh publik?</li> <li>Apakah disusun anggaran kas sebagai mekanisme pengendalian dan pengukuran kinerja?</li> <li>Apakah ada MIS yang digunakan? Bagaimana keterkaitannya dengan MIS lain?</li> <li>Apakah ada konsistensi antara RPJMD- RKPd dan RKPd-APBD?</li> </ul>
<b>Pelaksanaan Anggaran</b>	Institusi PKAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah sudah terbentuk SKPD Pengelola Keuangan dan aset daerah?</li> <li>Bagaimana struktur institusi PKD?</li> <li>Apakah terdapat kerangka transparansi dan keterlibatan publik</li> </ul>
	Kondisi SDM Pengelola Keuangan Daerah (PKD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana kondisi SDM PKD, baik di SKPKD dan SKPD?</li> <li>Apakah SDM PKD telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis secara terencana dan memadai?</li> </ul>
	Kerangka Regulasi PKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah kerangka regulasi daerah untuk PKD sudah tersedia?</li> <li>Apakah terdapat kebijakan, prosedur dan pengendalian untuk pengelolaan kas yang efisien dan efektif?</li> </ul>
	Optimalisasi PAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah terdapat sistem penagihan dan pemungutan PAD yang efisien?</li> <li>Apakah PAD sudah dikumpulkan secara optimal berdasarkan potensi daerah?</li> <li>Bagaimana dengan penerapan UU 28/ 2009?</li> </ul>
	E-Procurement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah terbentuk dan berfungsi?</li> </ul>
	Sistem Informasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada SIM yang digunakan? Bagaimana keterkaitannya dengan SIM lain?</li> <li>Bagaimana pencatatan sebuah aset dan cara menilai aset?</li> <li>Apakah transaksi keuangan pemerintah tercatat secara akurat dan disajikan tepat waktu?</li> <li>Apakah laporan keuangan dan informasi manajemen dapat diandalkan?</li> </ul>
<b>Oversight dan Accountability</b>	Struktur dan Kondisi SDM Pemeriksa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana struktur dan kondisi SDM Inspektorat?</li> </ul>
	Standar dan proses audit internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Inspektorat mempunyai SOP dan bisa menjalankan tugasnya secara efektif?</li> <li>Apakah Standar dan proses audit internal dapat diaplikasikan dengan baik?</li> <li>Apakah program audit secara regular dikaji dan direvisi?</li> <li>Apakah ada temuan signifikan dari internal audit?</li> </ul>
	Audit Eksternal dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apa saja temuan penting pada LHP LKPD beberapa tahun terakhir?</li> <li>Bagaimana tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut?</li> <li>Bagaimana status opini LHP LKPD selama 5 tahun terakhir?</li> </ul>
	Akses Publik atas LKPD dan LHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Publik dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan audit?</li> <li>Apakah LKPD dan LHP LKPD dipublikasikan ke masyarakat?</li> </ul>
	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah terdapat kebijakan, prosedur serta pengendalian pinjaman dan investasi daerah?</li> </ul>

Para responden diminta untuk menjawab “Ya” atau “Tidak” untuk setiap pertanyaan yang diwakili oleh masing-masing indikator. Skor dihitung berdasarkan presentase jawaban “Ya”. Jawaban “Ya” diberi score 1 dan 0 untuk jawaban “Tidak”. Untuk menjamin akurasi data, maka setiap jawaban “Ya” harus didukung oleh kelengkapan dokumen terkait dan atau diperiksa silang dengan responden tambahan. Tidak semua sub-bidang strategis memiliki jumlah indikator yang sama, sehingga berimplikasi terhadap bobot penilaian.

Responden PFM meliputi SKPD seperti Bappeda, Bagian Hukum Setda, bagian Keuangan Setda, bagian Humas Dinas Komunikasi dan Informasi, Seketaris DPRD, Bagian Akuntansi, Pembukuan dan Verifikasi BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Daerah, Inspektorat Daerah, dan beberapa lainnya. Bukti-bukti dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran seperti RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, APBD, dan dokumen lainnya. Interpretasi hasil analisis PFM dalam studi PERA menggunakan dua metode yaitu metode perbandingan dan metode pengkategorian yang telah dilakukan oleh World Bank. Metode perbandingan relatif yang dimaksud adalah interpretasi hasil yang didasarkan pada perbandingan relatif dari capaian skor antar sub-bidang strategis dalam setiap bidang strategis.

Metode pengkategorian adalah interpretasi hasil yang mengacu pada standar Bank Dunia dengan pemberian nilai sebagai berikut:

80 – 100	kategori sempurna/dapat diterima sepenuhnya
60 - 79	kategori sangat baik
40 - 59	kategori baik
20 - 39	kategori sedang/cukup
0 - 19	kategori kurang/tidak dapat diterima

Beberapa laporan studi PERA menggunakan metode perbandingan relatif dan beberapa lainnya menggunakan metode yang dikembangkan Bank Dunia.

## Data Non-Fiskal

Data non-fiskal digunakan untuk menganalisis Bab I Pendahuluan terkait dengan gambaran umum perekonomian kabupaten meliputi kinerja makro ekonomi dan pembangunan sosial; Bab V Analisis Sektor Strategis meliputi kinerja *output* dan *outcome* sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian; Bab VI Analisis Isu Lokal meliputi isu kemiskinan, isu gender, isu HIV/AIDS, dan Otonomi Khusus.

Seluruh data non-fiskal dipeoleh dari publikasi BPS seperti Daerah Dalam Angka, Statistik Daerah, Indikator Kesejahteraan Sosial, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Hasil Sensus Penduduk 2010, dll. Beberapa data teknis-sektoral diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA diperoleh dari Bappeda, dan SKPD terkait dengan sektor strategis.

Seluruh data non-fiskal dianalisis dengan menggunakan model analisis statistik-deskriptif untuk series 2007-2011 kecuali untuk Bab II Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah (PFM) dan data isu lokal terutama terkait dengan isu gender, dan HIV/AIDS (dianalisis sesuai dengan ketersediaan data).